



BANK INDONESIA

# LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Selatan

MEI 2025



Laporan Perekonomian  
**Provinsi Kalimantan Selatan**  
Mei 2025

# Visi, Misi, & Nilai-nilai Strategis

## Visi Bank Indonesia

---

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

## Misi Bank Indonesia

---

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

## Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

---

1. Kejujuran dan integritas (*trust and integrity*);
2. Profesionalisme (*professionalism*);
3. Keunggulan (*excellence*);
4. Mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan
5. Koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

# Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

## Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

## Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempublikasikan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan triwulan I 2025, sebagai perwujudan dari komitmen kami untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Bank Indonesia. LPP dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia Provinsi setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang membahas Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Laporan ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) merupakan pandangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dinamika perekonomian di Kalimantan Selatan; (ii) menyajikan informasi terkini mengenai kondisi makroekonomi, keuangan Pemerintah, stabilitas sistem keuangan, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian Kalimantan Selatan ke depan untuk mendukung pembentukan ekspektasi masyarakat yang menjadi pertimbangan penting dalam perumusan berbagai kebijakan di Bank Indonesia; (iii) sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Selatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai berbagai pertimbangan yang melandasi keputusan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia; dan (iv) menjadi referensi penting bagi seluruh *stakeholders* dalam melakukan perumusan kebijakan dan keputusan ekonominya.

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tumbuh 4,81% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh 5,15% (yoy). Dari sisi penawaran, perlambatan disebabkan oleh kontraksi pada kinerja LU Pertambangan akibat penurunan permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap tinggi terutama bersumber dari lapangan usaha (LU) Pertanian yang tumbuh 7,74% (yoy) sejalan dengan peningkatan produksi padi sejalan dengan realisasi program optimalisasi lahan (Oplah). Selain itu, peningkatan juga bersumber dari LU Perdagangan yang tumbuh 7,84% (yoy), yang tercermin dari naiknya Indeks Penjualan Ritel dan Indeks Keyakinan Konsumen di tengah momentum perayaan Haul Guru Sekumpul yang lebih meriah dari tahun sebelumnya serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor sejalan dengan kinerja LU Pertambangan. Namun, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap tinggi terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Kinerja konsumsi tumbuh kuat ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan masih tingginya NTP serta meningkatnya gaji ASN dan UMP.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,60% – 5,40% (yoy). Pertumbuhan positif ini ditopang oleh permintaan domestik yang masih tetap kuat sejalan dengan NTP yang tetap kuat serta kenaikan UMP dan gaji ASN yang lebih tinggi di tahun 2025. Lebih lanjut, pertumbuhan juga ditopang oleh rencana bantuan subsidi upah dan

bantuan sosial. Namun demikian, pertumbuhan tertahan oleh moderasi kinerja net ekspor, impor, dan Konsumsi Pemerintah. Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan IV 2024 sebesar 1,95% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,03% (yoy), dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,84% (yoy). Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu yang terendah di wilayah Kalimantan dan lebih rendah dibandingkan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, meski lebih tinggi dari Kalimantan Barat.

Ke depan, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2025. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan komoditas sewa rumah menjelang tahun ajaran baru serta kenaikan harga komoditas emas perhiasaan seiring tren harga emas global yang masih tinggi di tengah ketidakpastian global.

Selanjutnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap hubungan kemitraan strategis yang terjalin baik selama ini dapat terus dan bahkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas laporan ini, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Selatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

Banjarmasin, Mei 2025  
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ttd

**Fadjar Majardi**

Direktur

# Daftar Isi

Visi, Misi, & Nilai Strategis	II
Visi dan Misi KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Grafik	VIII
Daftar Tabel	X
Cakupan Pembahasan	XII
Infografik Perekonomian	XIII
Tabel Indikator	XIV
Ringkasan Eksekutif	XVII
Lampiran	74
Daftar Istilah	75
Tim Penyusun	77



## Bab I Perkembangan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan 1

1.1 Sisi Lapangan Usaha: Sektor Utama Ekonomi	4
1.1.1 LU Pertanian	4
1.1.2 LU Pertambangan	5
1.1.3 LU Industri Pengolahan	7
1.1.4 LU Perdagangan	8
1.1.5 LU Konstruksi	9
1.2 Sisi Pengeluaran	10
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga (RT)	11
1.2.2 Konsumsi Pemerintah	11
1.2.3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	13
1.2.4 Ekspor	14
1.2.5 Impor	16

### BOKS 1 AKSELERASI KINERJA INVESTASI MELALUI PENINGKATAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH



## Bab II Keuangan Pemerintah 21

2.1 Realisasi Pendapatan Daerah	17
2.1.1 Realisasi Pendapatan Provinsi	23
2.1.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota	25
2.2 Realisasi Belanja Daerah	25
2.2.1 Realisasi Belanja Provinsi	26
2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota	27



## Bab III Perkembangan Inflasi Daerah 29

3.1 Perkembangan Inflasi	31
3.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas Pengeluaran	32
3.3 Perkembangan Inflasi Triwulan II 2025	34
3.4 Pengendalian Inflasi Daerah	35

### BOKS 2 MENJAGA MOMENTUM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DALAM PENGENDALIAN INFLASI 37



Bab IV

**Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

41

<b>4.1 Pembiayaan Daerah</b>	<b>43</b>
4.1.1 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)	43
4.1.2 Pembiayaan Korporasi	45
4.1.3 Total Aset dan Intermediasi Perbankan	47
<b>4.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM</b>	<b>50</b>
4.2.1 Rasio Kredit UMKM	50
4.2.2 Penyaluran Kredit UMKM	50
4.2.3 Peningkatan Akses Keuangan UMKM	52



Bab V

**Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**

53

5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Di Kalimantan Selatan	55
5.2 Perkembangan Elektronifikasi Dan Keuangan Inklusif	56
5.3 Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	58



Bab VI

**Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**

61

6.1 Kondisi Ketenagakerjaan	63
6.2 Kondisi Kesejahteraan	64



Bab VII

**Prospek Perekonomian**

67

7.1 Prakiraan Kondisi Makro Ekonomi	69
7.2 Prakiraan Inflasi	71

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional	3	Grafik 1.23	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	13
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral	3	Grafik 1.24	Realisasi Pengadaan Semen	13
Grafik 1.3	Produksi Padi	4	Grafik 1.25	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)	14
Grafik 1.4	Luas Panen	5	Grafik 1.26	Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri	14
Grafik 1.5	Produksi Karet	5	Grafik 1.27	Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri Batu bara	14
Grafik 1.6	Harga Karet (TSR20)	5	Grafik 1.28	Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri CPO	15
Grafik 1.7	Produksi Batubara Kalimantan Selatan	6	Grafik 1.29	Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri Karet Alam & Olahan	15
Grafik 1.8	Pangsa Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan	6	Grafik 1.30	Distribusi Nilai Ekspor Triwulan I 2025 Berdasarkan Komoditas	15
Grafik 1.9	Perkembangan Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan	6	Grafik 1.31	Distribusi Nilai Ekspor Triwulan I 2025 Berdasarkan Negara Tujuan	15
Grafik 1.10	Produksi Batu Bara Tiongkok	6	Grafik 1.32	Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan	15
Grafik 1.11	Perkembangan Produksi Biodiesel Kalimantan Selatan	7	Grafik 1.33	Pertumbuhan Volume Impor Luar Negeri	16
Grafik 1.12	Perkembangan Volume Penjualan Ekspor Karet	7	Grafik 1.34	Perkembangan Volume Impor Material Mentah	16
Grafik 1.13	Perkembangan Volume Penjualan Domestik Karet	8	Grafik 1.35	Perkembangan Volume Impor Bahan Baku Industri	16
Grafik 1.14	Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil Kalimantan Selatan	8	Grafik 2.1	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan I 2025	24
Grafik 1.15	Indeks Keyakinan Konsumen	8	Grafik 2.2	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Triwulan I 2025	27
Grafik 1.16	Perkembangan Kredit Perdagangan di Kalimantan Selatan	9	Grafik 2.3	Realisasi Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) se-Kalimantan Selatan Menurut Fungsi	28
Grafik 1.17	Perkembangan Kredit Multiguna di Kalimantan Selatan	9	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan	31
Grafik 1.18	Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan	9	Grafik 3.2	Perbandingan Gabungan Kota Inflasi untuk Provinsi se-Kalimantan pada Triwulan I 2025	31
Grafik 1.19	Perkembangan Kredit Konstruksi Kalimantan Selatan	10	Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Kota Banjarmasin, Tanjung, Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Tanah Laut	31
Grafik 1.20	Perkembangan Kredit Ruko/Rukan di Kalimantan Selatan	10	Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	32
Grafik 1.21	Survei Konsumen Bank Indonesia	11			
Grafik 1.22	Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan	11			

Grafik 3.5	Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	33	Grafik 4.15	Pertumbuhan Aset, DPK, Kredit dan LDR Periode Triwulan I 2025	48
Grafik 3.6	Perkembangan Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	33	Grafik 4.16	Pertumbuhan DPK Periode Triwulan I 2025	48
Grafik 3.7	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	34	Grafik 4.17	Pertumbuhan Kredit Periode Triwulan I 2025	49
Grafik 4.1	Distribusi Kredit Konsumsi Periode Triwulan I 2025	43	Grafik 4.18	Pertumbuhan dan NPL Kredit Periode Triwulan I 2025	50
Grafik 4.2	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Berdasarkan Jenisnya Periode Triwulan I 2025	43	Grafik 4.19	Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Periode Triwulan I 2025	50
Grafik 4.3	Pertumbuhan Kredit Konsumsi – KPR s.d. Tipe 21, Tipe 22 s.d. 70, dan Tipe Di atas 70 Periode Triwulan I 2025	44	Grafik 4.20	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Periode Triwulan I 2025	51
Grafik 4.4	Pertumbuhan Kredit Konsumsi – Pemilikan Mobil Roda Empat dan Sepeda Bermotor Periode Triwulan I 2025	44	Grafik 4.21	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Periode Triwulan I 2025	51
Grafik 4.5	Pertumbuhan dan NPL Kredit Konsumsi Periode Triwulan I 2025	44	Grafik 4.22	Distribusi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Periode Triwulan I 2025	51
Grafik 4.6	Presentase Penggunaan Penghasilan RT Periode Triwulan I 2025	44	Grafik 4.23	Pertumbuhan Kredit UMKM Lapangan Usaha Utama Periode Triwulan I 2025	51
Grafik 4.7	Indeks Penghasilan Konsumen & Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini Periode Triwulan I 2025	45	Grafik 4.24	Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM Periode Triwulan I 2025	52
Grafik 4.8	Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha Ekonomi Utama Periode Triwulan I 2025	45	Grafik 4.25	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Kabupaten/Kota Periode Triwulan I 2025	52
Grafik 4.9	Komposisi Kredit Korporasi Periode Triwulan I 2025	46	Grafik 4.26	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Triwulan I 2025	52
Grafik 4.10	Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Pertambangan dan Pengalihan Periode Triwulan I 2025	46	Grafik 5.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	55
Grafik 4.11	Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Industri Pengolahan Periode Triwulan I 2025	46	Grafik 5.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	55
Grafik 4.12	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertanian Periode Triwulan I 2025	47	Grafik 5.3	Penarikan dan Setoran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia di Kalimantan Selatan	56
Grafik 4.13	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Perdagangan Periode Triwulan I 2025	47	Grafik 5.4	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kota/Kabupaten	57
Grafik 4.14	NPL Kredit Korporasi Periode Triwulan I 2025	47	Grafik 5.5	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS Menurut Skala Usaha	57
			Grafik 5.6	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)	58
			Grafik 5.7	Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	59

Grafik 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	63
Grafik 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63
Grafik 6.3	Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	64
Grafik 6.4	Indeks Penghasilan Konsumen	65
Grafik 6.5	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	65
Grafik 6.6	IPM Provinsi di Kalimantan dan Nasional	66
Grafik 7.1	Kondisi Negara Mitra Dagang Tahun 2024 dan Prospek ke Depan	69

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran (%yoy)	10
Tabel 1.3	Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan	12
Tabel 1.4	Perkembangan Realisasi Belanja APBD di Kalimantan Selatan	12
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	23
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	23
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	24
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	25
Tabel 2.5	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp miliar kecuali disebutkan lain)	25
Tabel 2.6	Realisasi Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	26
Tabel 2.7	Realisasi Belanja APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	26
Tabel 2.8	Realisasi Belanja APBD Kabupaten dan Kota Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	28
Tabel 2.9	Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	28
Tabel 3.1	Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025	32
Tabel 3.2	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi (yoy) pada Triwulan I 2025	32
Tabel 3.3	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi (yoy) pada Triwulan I 2025	32
Tabel 3.4	Komoditas Utama Pendorong Inflasi bulan April 2025 secara tahunan (%yoy)	34
Tabel 3.5	Komoditas Utama Penahan Inflasi bulan April 2025 secara tahunan (%yoy)	34
Tabel 3.6	Inflasi Kalimantan Selatan April 2025 Menurut Kelompok (yoy)	35
Tabel 4.1	Perubahan Tingkat Pendapatan RT Triwulan I 2025	45
Tabel 4.2	Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan I 2025 (Lokasi Proyek)	49
Tabel 4.3	Perkembangan Kredit di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan I 2025 (Lokasi Proyek)	50
Tabel 5.1	Data Triwulanan Kas Titipan Triwulan I 2025 (Rp Juta)	58
Tabel 5.2	Data Triwulanan Penukaran Uang Kartal Triwulan I 2025 (Rp Juta)	59
Tabel 6.1	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	64
Tabel 6.2	Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral	64
Tabel 6.3	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	66
Tabel 6.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan berisi kajian mengenai perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan terakhir sesuai rilis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Badan Pusat Statistik (BPS) dan tracking triwulan berjalan pada bulan penerbitan buku ini. Setiap bagian asesmen disertai oleh data dan informasi penjabar antara lain hasil survei, *prompt indicators*, hasil liaison, *focus group discussion* (FGD), informasi anekdotikal dan data-data lain yang relevan.

- Bab I** Asesmen ringkas terkait evaluasi realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan terakhir mencakup analisis evaluasi realisasi perkembangan masing-masing komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta arah pertumbuhan ekonomi triwulan berjalan secara tahunan (yoy), baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha (LU).
- Bab II** Asesmen perkembangan terkini realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dengan membandingkan realisasi periode terakhir, berjalan dan keseluruhan tahun terhadap periode yang sama tahun lalu, disertai faktor-faktor yang memengaruhi.
- Bab III** Asesmen terkait evaluasi realisasi inflasi triwulan terakhir dan arah perkembangan inflasi triwulan berjalan berdasarkan realisasi inflasi bulan terakhir, dilengkapi dengan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya inflasi dengan mengedepankan aspek dinamika pasokan, produksi dan distribusi daerah serta implikasi adanya kebijakan daerah yang berdampak kepada harga-harga. Informasi mengenai pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah juga disajikan dalam Bab ini.
- Bab IV** Asesmen pembiayaan daerah serta pengembangan akses keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilengkapi dengan informasi perkembangan intermediasi perbankan termasuk ketahanan korporasi dan kredit UMKM pada triwulan laporan.
- Bab V** Asesmen perkembangan penyelenggaraan layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang di Bank Indonesia dalam rangka menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran, pengembangan layanan keuangan nontunai, elektronifikasi, penyediaan uang layak edar dan upaya menekan peredaran uang palsu.
- Bab VI** Asesmen ketenagakerjaan menggambarkan perkembangan angkatan kerja dan pengangguran serta asesmen kesejahteraan antara lain mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data rilis resmi.
- Bab VII** Prospek perekonomian daerah mencakup prakiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi satu triwulan ke depan dan secara tahunan untuk keseluruhan tahun berjalan

# Infografis Perekonomian



Kinerja Ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025 tumbuh 4,81% (yoy), meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi penawaran, tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh LU Pertanian dan LU Perdagangan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi bersumber dari kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Inflasi Kalsel pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,20% (yoy) dan pada akhir tahun diprakirakan masih berada pada target inflasi Nasional, 2,5±1% (yoy).

## PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja Ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025 tumbuh 4,81% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi penawaran, tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh LU Pertanian dan LU Perdagangan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi bersumber dari kinerja Konsumsi Rumah Tangga.



**Pertanian** ▲ **7,74%** (yoy)

Peningkatan kinerja LU Pertanian sejalan dengan peningkatan produksi padi sebesar 22% (yoy) yang berasal dari program Optimalisasi Lahan (Oplah) seluas 17ribu Ha.

**Pengolahan** ▼ **7,86%** (yoy)

Kinerja LU Industri Pengolahan yang melambat sejalan dengan menurunnya produksi TBS sebagai bahan baku CPO, setelah berakhirnya panen raya (peak crop) dan penurunan produktivitas akibat meningkatnya Tanaman Tidak Menghasilkan.

**Konsumsi RT** ▲ **5,49%** (yoy)

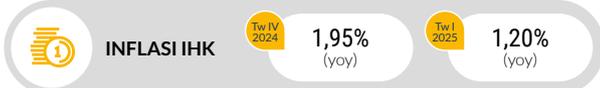
Kinerja Kons. RT tercatat meningkat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan masih tingginya Nilai Tukar Petani, gaji ASN dan UMP yang meningkat, serta aktivitas belanja masyarakat pada perayaan momen HBKN Idul Fitri 1446 H dan kegiatan Haul Guru Sekumpul.

**Pertambangan** ▼ **-0,07%** (yoy)

Melambatnya kinerja LU Pertambangan antara lain disebabkan oleh perlambatan permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama sejalan dengan masih tingginya stok batu bara Tiengkong, serta perlambatan kinerja industri India, serta menurunnya produksi akibat tingginya curah hujan sepanjang triwulan I 2025.

## INFLASI

Inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.



PENAHAN (ANDIL YOY)		PENDORONG (ANDIL YOY)	
Tarif Listrik	-1,11%	Emas Perhiasan	0,76%
Beras	-0,48%	Ikan Gabus	0,20%
Telur Ayam Ras	-0,09%	Tarif Parkir	0,13%

Sumber: BPS

## SISTEM KEUANGAN DI DAERAH

Stabilitas sistem keuangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga.



## OUTLOOK PEREKONOMIAN



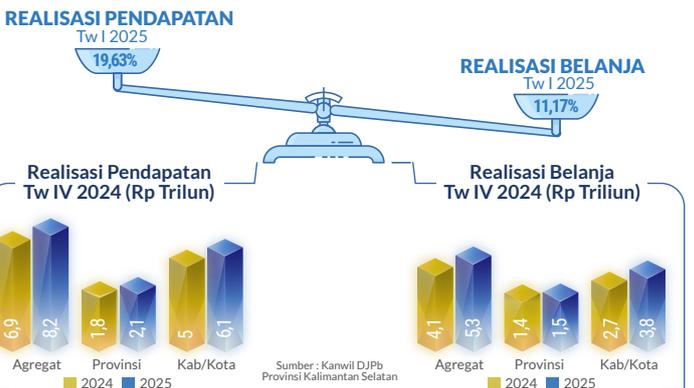
## SISTEM PEMBAYARAN & PUR

Kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga, eskalasi transaksi masyarakat yang beralih menggunakan BI-FAST.



## KEUANGAN DAERAH

Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terpantau mengalami kenaikan secara persentase dan nominal dibandingkan tahun 2024.



## KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi kesejahteraan dan ketenagakerjaan mengalami perbaikan.



## RISIKO

- Potensi perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama dan konflik geopolitik yang berdampak pada kinerja domestik
- Potensi peningkatan permintaan bahan pangan strategis secara serentak pada momen HBKN, festive event, atau kegiatan pemerintah

## I. Inflasi dan PDRB

Dalam Miliar Rupiah kecuali disebutkan lain

INDIKATOR	2022	2023	2022				2023				2024				2025
			Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I
<b>Pertumbuhan PDRB Harga Konstan (% yoy)</b>	<b>5,11%</b>	<b>4,84%</b>	<b>-20,91%</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,64%</b>	<b>5,32%</b>	<b>37,66%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,58%</b>	<b>4,69%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,81%</b>	<b>5,23%</b>	<b>5,15%</b>	<b>4,81%</b>
<b>PDRB Harga Konstan</b>	<b>142.341</b>	<b>149.231</b>	<b>25.248</b>	<b>35.653</b>	<b>36.870</b>	<b>36.764</b>	<b>34.756</b>	<b>37.429</b>	<b>38.559</b>	<b>38.488</b>	<b>36.489</b>	<b>39.231</b>	<b>40.574</b>	<b>40.463</b>	<b>38.244</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.911	19.510	3.861	5.104	5.638	4.308	4.009	5.247	5.927	4.326	4.039	5.496	6.278	4.538	4.352
Pertambangan dan Penggalian	35.079	36.171	v	8.927	9.146	9.200	8.282	8.951	9.144	9.794	8.822	9.133	9.503	9.812	8.816
Industri Pengolahan	17.850	18.387	4.349	4.187	4.301	5.014	4.534	4.504	4.562	4.787	4.671	4.676	4.748	5.188	5.038
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	185	200	43	44	44	54	48	48	49	54	52	53	53	55	58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	631	661	150	156	161	164	157	163	169	171	165	172	177	178	172
Konstruksi	10.791	11.470	2.531	2.553	2.757	2.950	2.634	2.677	2.955	3.205	2.765	2.879	3.074	3.433	2.755
Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor	13.202	14.017	3.232	3.335	3.287	3.348	3.364	3.516	3.541	3.596	3.525	3.765	3.769	3.849	3.802
Transportasi dan Pergudangan	9.304	10.344	2.126	2.325	2.412	2.442	2.395	2.563	2.683	2.703	2.541	2.682	2.782	2.929	2.794
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.966	3.242	717	748	706	795	793	828	777	843	847	891	843	922	912
Informasi dan Komunikasi	6.319	6.734	1.557	1.575	1.587	1.600	1.648	1.674	1.705	1.707	1.754	1.791	1.811	1.831	1.877
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.385	4.763	1.159	1.022	1.074	1.130	1.203	1.165	1.151	1.245	1.256	1.265	1.313	1.266	1.313
Real Estate	3.513	3.735	851	872	887	903	899	924	949	964	946	974	995	1.035	992
Jasa Perusahaan	898	966	214	225	227	232	229	243	245	250	244	260	262	268	263
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.182	7.392	1.761	1.795	1.829	1.797	1.791	1.929	1.806	1.865	1.948	2.044	1.901	2.012	2.010
Jasa Pendidikan	6.429	6.657	1.584	1.623	1.629	1.593	1.593	1.757	1.628	1.679	1.671	1.836	1.720	1.758	1.756
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.047	3.221	723	741	776	808	756	790	823	851	792	829	870	908	847
Jasa lainnya	1.647	1.761	389	422	408	427	420	450	444	447	450	486	474	482	488
<b>PDRB Harga Berlaku</b>	<b>251.229</b>	<b>269.296</b>	<b>52.508</b>	<b>64.059</b>	<b>67.100</b>	<b>67.562</b>	<b>63.266</b>	<b>67.980</b>	<b>69.221</b>	<b>68.829</b>	<b>65.913</b>	<b>72.360</b>	<b>75.544</b>	<b>75.797</b>	<b>70.864</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.680	30.631	5.848	7.684	8.502	6.647	6.286	8.240	9.410	6.694	6.475	8.985	10.223	7.437	7.318
Pertambangan dan Penggalian	80.520	82.992	12.924	21.694	23.001	22.901	19.946	21.218	20.640	21.188	18.912	20.852	22.096	22.653	20.074
Industri Pengolahan	28.569	28.936	7.171	6.941	6.719	7.739	7.127	7.092	7.175	7.542	7.411	7.450	7.756	8.794	8.572
Pengadaan Listrik dan Gas	321	351	75	75	77	93	84	85	86	95	92	94	95	97	103
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	913	985	214	223	231	245	234	243	252	255	247	263	273	278	271
Konstruksi	17.233	18.848	3.958	4.059	4.410	4.807	4.312	4.352	4.850	5.334	4.597	4.806	5.152	5.767	4.658
Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor	22.759	26.027	5.324	5.605	5.742	6.088	6.184	6.530	6.602	6.711	6.584	7.103	7.165	7.327	7.314
Transportasi dan Pergudangan	15.774	19.253	3.335	3.815	4.188	4.437	4.312	4.660	5.041	5.241	4.855	5.165	5.317	5.479	5.217
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.507	5.004	1.080	1.136	1.076	1.215	1.219	1.277	1.202	1.306	1.327	1.405	1.335	1.468	1.469
Informasi dan Komunikasi	8.299	8.936	2.028	2.073	2.090	2.108	2.172	2.224	2.267	2.273	2.346	2.409	2.439	2.463	2.527
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.462	8.261	1.907	1.736	1.855	1.963	2.094	2.022	1.991	2.154	2.184	2.215	2.305	2.221	2.320
Real Estate	5.072	5.524	1.215	1.255	1.285	1.317	1.320	1.363	1.403	1.438	1.511	1.550	1.631	1.544	1.525
Jasa Perusahaan	1.543	1.746	356	384	393	410	410	439	444	454	1.417	1.475	1.514	1.586	499
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.025	12.864	2.888	3.016	3.065	3.055	3.069	3.349	3.141	3.304	449	483	489	503	3.655
Jasa Pendidikan	9.932	10.538	2.422	2.484	2.537	2.489	2.528	2.792	2.573	2.645	3.494	3.721	3.432	3.629	2.985
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.865	5.297	1.130	1.173	1.243	1.319	1.240	1.305	1.354	1.398	2.692	2.991	2.847	2.983	1.464
Jasa lainnya	2.756	3.104	633	706	686	731	728	790	788	797	1.322	1.394	1.474	1.567	892
<b>IHK Kalimantan Selatan</b>	<b>117,15</b>	<b>119,99</b>	<b>111,16</b>	<b>114,04</b>	<b>115,58</b>	<b>117,15</b>	<b>118,45</b>	<b>118,94</b>	<b>118,73</b>	<b>119,99</b>	<b>106,32</b>	<b>106,73</b>	<b>105,95</b>	<b>107,14</b>	<b>107,6</b>
Inflasi Kalimantan Selatan (y-o-y)	6,99	2,43	3,65	5,95	7,35	6,99	6,56	4,30	2,73	2,43	2,58	2,34	1,98	1,95	1,57
<b>IHK Banjarmasin</b>	<b>117,05</b>	<b>119,72</b>	<b>111,04</b>	<b>113,80</b>	<b>115,42</b>	<b>117,05</b>	<b>118,38</b>	<b>118,79</b>	<b>118,51</b>	<b>119,72</b>	<b>106,45</b>	<b>106,7</b>	<b>106,25</b>	<b>107,17</b>	<b>107,26</b>
Inflasi Banjarmasin (y-o-y)	6,98	2,28	3,69	5,92	7,42	6,98	6,61	4,38	2,68	2,28	2,58	2,49	2,03	1,98	0,76
<b>IHK Tanjung</b>	<b>114,86</b>	<b>117,61</b>	<b>110,81</b>	<b>113,83</b>	<b>113,63</b>	<b>114,86</b>	<b>116,40</b>	<b>116,47</b>	<b>116,04</b>	<b>117,61</b>	<b>104,57</b>	<b>104,96</b>	<b>104,81</b>	<b>106,27</b>	<b>106,95</b>
Inflasi Tanjung (y-o-y)	5,01	2,39	3,20	5,37	5,09	5,01	5,04	2,32	2,12	2,39	1,64	1,96	2,28	2,24	2,28
<b>IHK Kotabaru</b>	<b>119,83</b>	<b>124,40</b>	<b>112,45</b>	<b>116,38</b>	<b>118,63</b>	<b>119,83</b>	<b>113,11</b>	<b>122,44</b>	<b>122,97</b>	<b>124,40</b>	<b>106,44</b>	<b>107,19</b>	<b>106,73</b>	<b>106,82</b>	<b>107,68</b>
Inflasi Kotabaru (y-o-y)	8,65	3,81	3,63	6,73	8,52	8,65	0,58	5,21	3,66	3,81	2,41	2,16	1,24	0,26	1,16
<b>IHK Hulu Sungai Tengah</b>											<b>108,92</b>	<b>109,47</b>	<b>106,47</b>	<b>108,53</b>	<b>109,73</b>
Inflasi Hulu Sungai Tengah (y-o-y)											3,68	3,53	1,97	1,11	0,74
<b>IHK Tanah Laut</b>											<b>104,91</b>	<b>105,61</b>	<b>104,82</b>	<b>106,63</b>	<b>107,55</b>
Inflasi Tanah Laut (y-o-y)											2,29	1,36	2,04	2,90	2,52

Sumber: BPS Kalsel (diolah)

## II. Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Dalam Miliar Rupiah kecuali disebutkan lain

INDIKATOR		2022				2023				2024				2025
		Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I
Total Asset	(Rp Miliar)	81.580	86.604	90.501	99.402	95.293	99.034	98.347	101.871	105.161	109.379	113.465	116.429	119.479
	(%, yoy)	12,55%	16,54%	17,91%	24,17%	16,81%	14,35%	8,67%	2,48%	10,35%	10,45%	15,37%	14,29%	13,62%
DPK	(Rp Miliar)	64.473	68.895	72.846	75.948	76.133	77.581	77.239	80.155	82.345	86.063	87.928	92.362	94.602
	(%, yoy)	14,40%	19,46%	14,41%	19,76%	18,08%	12,61%	6,03%	5,54%	8,16%	10,93%	13,84%	15,23%	14,88%
Giro	(Rp Miliar)	14.359	17.441	18.776	20.334	19.274	18.895	18.062	22.129	21.289	21.291	21.345	27.127	23.469
	(%, yoy)	23,11%	55,44%	28,79%	56,10%	34,24%	8,33%	-3,81%	8,83%	10,45%	12,68%	18,18%	22,59%	10,24%
Tabungan	(Rp Miliar)	34.363	36.057	36.417	38.521	38.451	39.284	38.508	40.546	41.198	42.301	42.204	44.607	44.376
	(%, yoy)	15,24%	14,55%	9,01%	12,51%	11,90%	8,95%	5,74%	5,26%	7,14%	7,68%	9,60%	10,01%	7,71%
Deposito	(Rp Miliar)	15.751	15.397	17.653	17.093	18.407	19.402	20.669	17.480	19.636	22.471	24.379	20.628	26.757
	(%, yoy)	5,91%	2,82%	12,52%	5,82%	16,86%	26,01%	17,09%	2,26%	6,67%	15,82%	17,95%	18,01%	36,27%
Kredit (L. Proyek)	(Rp Miliar)	72.168	77.851	82.851	89.687	90.518	88.212	90.274	92.259	92.462	95.275	93.889	100.994	103.714
	(%, yoy)	7,27%	12,18%	23,50%	24,62%	25,43%	13,31%	8,96%	2,87%	2,15%	8,01%	4,00%	9,47%	12,17%
Modal Kerja	(Rp Miliar)	27.989	30.515	32.475	33.007	31.842	30.705	31.261	32.629	32.574	36.182	35.677	40.210	34.816
	(%, yoy)	17,34%	21,90%	33,74%	17,57%	13,77%	0,62%	-3,74%	-1,15%	2,30%	17,84%	14,13%	23,23%	6,88%
Investasi	(Rp Miliar)	19.090	21.785	24.068	29.821	31.364	29.538	30.033	29.826	29.033	27.336	25.355	28.421	34.680
	(%, yoy)	-2,06%	7,34%	29,52%	53,87%	64,29%	35,59%	24,78%	0,02%	-7,43%	-7,46%	-15,58%	-4,71%	19,45%
Konsumsi	(Rp Miliar)	25.089	25.551	26.308	26.859	27.312	27.969	28.980	29.805	29.966	31.757	32.858	33.686	34.219
	(%, yoy)	4,85%	6,17%	8,61%	9,56%	8,86%	9,47%	10,15%	10,97%	9,72%	13,54%	13,38%	13,02%	14,19%
LDR - Lokasi Proyek		111,94%	113,00%	113,73%	118,09%	118,89%	113,70%	116,88%	115,10%	112,29%	110,70%	106,78%	109,35%	109,63%
NPL (gross)		2,51%	2,48%	2,21%	1,76%	1,74%	1,87%	2,04%	1,83%	2,01%	1,88%	1,98%	1,99%	2,19%

Sumber: LBU Bank Indonesia, Lokasi Proyek, Kredit Sektorial

## III. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Dalam Triliun Rupiah kecuali disebutkan lain

INDIKATOR	2021	2022	2021				2022				2023				2024				2025
			Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I
Transaksi RTGS	171,02	121,48	34,96	43,56	48,89	43,60	27,70	30,99	27,03	35,76	30,34	28,96	36,16	47,21	32,65	38,23	34,98	47,09	30,45
Pertumbuhan RTGS (%)	45,32	-28,96	16,64	73,56	52,77	42,48	-20,76	-28,87	-44,71	-17,98	9,51	-6,53	33,77	32,01	5,53	31,99	-3,27	-0,26	-4,89
Transaksi Kliring	28,36	24,84	6,43	6,73	6,93	8,26	6,72	6,44	5,60	6,09	4,87	4,41	5,16	5,63	4,62	4,29	4,83	5,34	4,17
Pertumbuhan Kliring (%)	2,37	-12,41	-8,33	6,12	0,98	10,51	4,41	-4,37	-19,27	-26,27	-27,53	-31,45	-7,94	-7,58	-5,14	-2,76	-6,37	-5,23	-9,75
Aliran Uang Masuk	12,90	13,69	4,16	3,54	2,94	2,26	4,08	3,91	3,44	2,27	4,25	3,83	3,71	1,72	4,15	3,98	2,65	1,56	2,67
Aliran Uang Keluar	8,63	9,85	951,45	3,04	1,73	2,91	1,30	3,29	2,18	3,07	1,65	3,70	1,71	3,51	2,73	2,93	-1,56	-3,01	2,52
Aliran Uang Masuk Neto	4,27	3,85	3,20	503,12	1,21	(651)	2,77	0,62	1,26	(803)	2,60	135,55	2,00	(1,784)	1,41	1,05	1,10	-1,45	0,15

Sumber: Bank Indonesia

# Ringkasan Eksekutif

---



## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KALIMANTAN SELATAN

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tumbuh 4,81% (yoy), melambat dibandingkan Triwulan IV 2024 yang sebesar 5,15% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh kontraksi pada kinerja LU Pertambangan akibat perlambatan permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ditopang oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan. LU Pertanian tercatat tumbuh 7,74% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih tinggi dari triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 4,53%. Pertumbuhan LU Pertanian seiring dengan peningkatan produksi padi sebesar 22% (yoy) sejalan dengan realisasi program ekstensifikasi dan optimalisasi lahan. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang masih tumbuh positif turut ditopang oleh pertumbuhan LU Perdagangan, yang tumbuh 7,84% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,02% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor sejalan dengan kinerja LU Pertambangan. Namun, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap tinggi terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT). Pertumbuhan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan masih tingginya NTP, meningkatnya gaji ASN dan UMP; serta peningkatan aktivitas belanja masyarakat pada perayaan momen HBKN Idul Fitri 1446 H dan kegiatan tahunan Haul Guru Sekumpul yang lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya.

## KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara agregat, persentase realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 secara nominal dan realisasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 meski terjadi penurunan pagu pendapatan tahun 2025. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan yang terjadi di seluruh komponen Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Secara spasial, persentase realisasi pendapatan yang meningkat terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi tersebut ditopang oleh peningkatan semua komponen Pendapatan Daerah.

Secara agregat, persentase realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 mengalami peningkatan, meski terjadi penurunan pagu belanja tahun 2025. Hal tersebut diakibatkan oleh peningkatan belanja operasional, utamanya belanja pegawai, sejalan dengan realisasi penyaluran THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 yang terealisasi pada triwulan I.

## PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan IV 2024 sebesar 1,95% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,03%

(yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,84% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan I 2025 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,76% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi ketidakpastian global.

Pada April 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,20% (yoy). Tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan komoditas sewa rumah menjelang tahun ajaran baru serta kenaikan harga komoditas emas perhiasan seiring tren harga emas global yang masih tinggi di tengah ketidakpastian global.

## **PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Kredit perbankan tetap tumbuh positif sebesar 12,17% (yoy) dengan *outstanding* Rp103,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tumbuh 9,47% (yoy) dengan *outstanding* Rp100,99 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tecermin dari NPL yang terjaga pada level 2,58%.

Kredit konsumsi pada triwulan I 2025 dengan *outstanding* sebesar Rp34,21 triliun, tumbuh 14,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,02% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp33,69 triliun, sejalan dengan peningkatan kinerja LU Perdagangan dan indeks penghasilan konsumen pada triwulan I 2025. Berdasarkan distribusinya, kredit multiguna (42,00%), kredit kepemilikan rumah/KPR (37,83%) dan kredit kendaraan bermotor/KKB (8,28%) memiliki pangsa terbesar terhadap seluruh penyaluran kredit di Kalimantan Selatan.

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 19,70% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp51,72 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,12% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp 50,65 triliun. Perlambatan pertumbuhan pada kredit korporasi terutama bersumber dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan (dengan proporsi terbesar mencapai 55,01% dari kredit korporasi) yang tumbuh 45,91% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp28,45 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 71,15% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp27,82 triliun, sejalan dengan kinerja LU Pertambangan yang berkontraksi pada triwulan I 2025 akibat melambatnya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama.

Pada triwulan I 2025, kredit UMKM di Kalimantan Selatan berkontraksi 0,12% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp23,66 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 2,18% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp23,88 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 22,81%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 23,65%.

## **PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat berkontraksi 4,89% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,26% (yoy). Sementara itu, transaksi Kliring (SKNBI) juga berkontraksi sebesar 9,75% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,23% (yoy). Penurunan transaksi bernilai besar (RTGS) sejalan dengan melambatnya kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2025 akibat adanya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran. Sementara itu, penurunan transaksi kliring (SKNBI) terjadi seiring dengan masifnya penggunaan kanal pembayaran real-time seperti BI-FAST dan QRIS dalam aktivitas transaksi ritel. yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal.

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan pada triwulan laporan mengalami *net inflow* sebesar Rp0,15 triliun, kondisi yang berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp1,45 triliun. *Net inflow* pada triwulan I 2025 sejalan dengan pola historis penurunan kebutuhan uang kartal pasca momen HBKN Nataru dan libur akhir tahun. Namun, peningkatan *net inflow* yang lebih tinggi tertahan oleh adanya peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri.

Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi terus mengalami peningkatan, tecermin dari peningkatan jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 23,85% (yoy) atau mencapai 441,48 ribu *merchant*. Selain itu, Kalimantan Selatan mampu mempertahankan pencapaian skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2024 dengan status 100% digital.

## **KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN**

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan semester I 2024. Hal tersebut terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meskipun terdapat sedikit peningkatan di Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) karena ada tenaga kerja yang belum terserap secara optimal. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan lapangan pekerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I 2025 (Februari 2025) didominasi oleh LU Pertanian dengan pangsa sebesar 31,42%, relatif tidak berubah dibandingkan triwulan dan tahun sebelumnya.

Optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan menunjukkan peningkatan sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 120,69 lebih tinggi dibanding triwulan IV 2024 yang sebesar 115,43.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 75,19, meningkat dari tahun 2023 sebesar 74,66. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan

bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat yakni Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), serta pengetahuan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

### **PROSPEK PEREKONOMIAN KALIMANTAN SELATAN**

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,60% – 5,40% (yoy). Ekspor luar negeri diperkirakan melambat akibat moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diperkirakan menurun. Konsumsi Pemerintah diperkirakan melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun demikian, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan masih terjaga seiring dengan masih tingginya NTP serta meningkatnya gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada 2025 serta rencana bantuan subsidi upah dan bantuan sosial. Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Perlambatan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan masifnya pengembangan renewable energy. Sementara perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diperkirakan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diproyeksikan meningkat sejalan dengan penambahan luas lahan panen didukung program optimalisasi lahan, kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, serta implementasi kebijakan B40.

Secara keseluruhan 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) komoditas rokok yang sudah mulai diterapkan pada awal tahun 2025. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan meningkat didorong oleh harga emas perhiasan seiring harga emas global yang diperkirakan masih tinggi sejalan dengan ketidakpastian global yang masih berlanjut. Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas nasi dengan lauk sejalan dengan peningkatan harga pada komoditas pangan strategis.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## BAB I

# Perkembangan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Pada triwulan I 2025, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh 4,81% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy).

Dari sisi penawaran, perlambatan disebabkan oleh kontraksi pada kinerja LU Pertambangan akibat perlambatan permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama. LU Industri Pengolahan tercatat melambat akibat menurunnya produksi TBS sebagai bahan baku CPO. Selain itu, perlambatan juga diakibatkan kontraksi LU Konstruksi sejalan dengan penundaan

sejumlah proyek konstruksi pemerintah, serta keterlambatan juknis penyesuaian anggaran dari Kemendagri. Namun demikian, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh meningkatnya kinerja LU Pertanian seiring dengan peningkatan produksi padi yang berasal dari program Optimalisasi Lahan (Oplah).

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Selatan yang termoderasi terutama disebabkan oleh kontraksi ekspor sejalan dengan perlambatan kinerja LU Pertambangan. Selain itu, kinerja Konsumsi Pemerintah juga tercatat



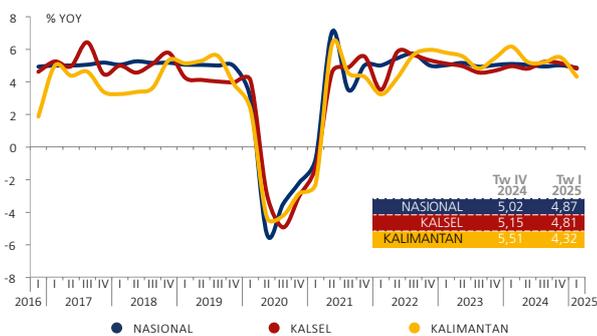
melambat terutama disebabkan menurunnya belanja APBD setelah berakhirnya Pilkada pada akhir tahun 2024, serta menurunnya belanja APBN diakibatkan oleh masih terblokirnya beberapa alokasi belanja pemerintah pusat di daerah. Namun demikian, kinerja Konsumsi Rumah Tangga tercatat meningkat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan masih tingginya NTP, meningkatnya gaji ASN dan UMP, serta peningkatan aktivitas belanja masyarakat pada perayaan momen HBKN Idul Fitri 1446 H dan kegiatan tahunan Haul Guru Sekumpul yang lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya

Pada 2025, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,60% – 5,40% (yoy). Dari sisi penawaran, Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi. Namun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, kinerja Net Ekspor Net Ekspor dan Konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh melambat. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih dalam tertahan oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang diperkirakan masih terjaga.

**Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tetap tumbuh positif, meskipun melambat dibandingkan triwulan IV 2024.** Ekonomi Kalimantan Selatan termoderasi ke level 4,81% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,15% (yoy) dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,87% (yoy). Namun, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang sebesar 4,32% (yoy) (Grafik 1.1).

**Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan bersumber dari kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi.** Pertumbuhan LU Pertambangan pada triwulan I 2025 yang terkontraksi sebesar 0,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh positif sebesar 0,34% (yoy). Penurunan kinerja LU Pertambangan disebabkan oleh perlambatan permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama sejalan dengan tingginya stok batu bara Tiongkok, perlambatan kinerja industri India, di tengah adanya perlambatan produksi akibat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025.

LU Industri Pengolahan juga tercatat tumbuh melambat sebesar 7,86% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih rendah dari triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 8,38% (yoy). LU Industri Pengolahan tercatat melambat akibat produksi TBS sebagai bahan baku CPO yang menurun, pasca berakhirnya panen raya (*peak crop*) dan penurunan produktivitas akibat meningkatnya Tanaman Tidak Menghasilkan.



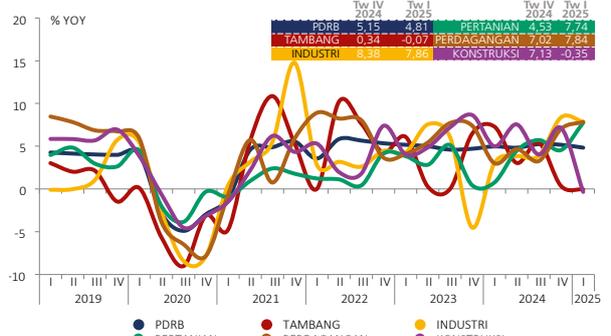
Sumber : BPS (diolah)

**Grafik 1.1** Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional

Lebih lanjut, kinerja LU Konstruksi pada Triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,35% (yoy), menurun dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh 7,13% (yoy). Kontraksi pada kinerja LU Konstruksi disebabkan oleh penundaan sejumlah proyek konstruksi pemerintah seiring dengan proses realokasi anggaran pasca diterbitkannya kebijakan efisiensi anggaran serta pergantian kepala daerah

**Namun demikian, perekonomian Kalimantan Selatan yang masih positif ditopang oleh kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan.** LU Pertanian tercatat tumbuh 7,74% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih tinggi dari triwulan IV 2024 yang sebesar 4,53% (yoy). Peningkatan LU Pertanian seiring dengan peningkatan produksi padi sebesar 22% (yoy) yang berasal dari program Optimalisasi Lahan (Oplah) seluas 17 ribu hektar. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang masih tumbuh positif juga ditopang oleh Pertumbuhan LU Perdagangan, yang tumbuh 7,84% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,02% (yoy). Hal tersebut terutama didorong oleh konsumsi yang meningkat akibat perayaan Haul Guru Sekumpul yang lebih meriah dari tahun sebelumnya serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H (Grafik 1.2).

**Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang termoderasi utamanya disebabkan oleh kinerja ekspor yang terkontraksi dan konsumsi pemerintah yang tumbuh melambat.** Kinerja ekspor yang melambat sejalan dengan perlambatan kinerja LU Pertambangan. Kinerja Konsumsi Pemerintah juga tercatat melambat



Sumber : BPS (diolah)

**Grafik 1.2** Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024				2025
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian	4,09	3,73	3,59	-0,91	1,17	1,59	3,85	2,82	5,33	0,78	0,72	4,73	5,72	4,53	7,74
Pertambangan	4,09	4,11	1,36	-4,44	4,14	5,57	6,15	0,38	0,04	6,30	6,46	1,92	3,87	0,34	-0,07
Pengolahan	5,69	4,34	1,72	-3,63	6,01	3,31	4,27	7,56	6,27	-4,53	3,01	3,84	3,88	8,38	7,86
Konstruksi	5,78	5,89	6,08	-1,29	2,87	4,12	4,04	4,85	7,19	8,63	4,98	7,54	4,02	7,13	-0,35
Perdagangan	7,80	7,54	7,42	-3,38	2,91	7,15	4,09	5,44	7,71	7,40	4,79	7,08	6,45	7,02	7,84
<b>Total PDRB</b>	<b>5,28</b>	<b>5,08</b>	<b>4,09</b>	<b>-1,82</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>5,15</b>	<b>4,98</b>	<b>4,58</b>	<b>4,67</b>	<b>4,98</b>	<b>4,81</b>	<b>5,23</b>	<b>5,15</b>	<b>4,81</b>

Sumber: BPS, diolah

disebabkan menurunnya belanja APBD setelah berakhirnya Pilkada pada akhir tahun 2024, serta menurunnya belanja APBN diakibatkan oleh masih terblokirnya beberapa alokasi belanja pemerintah pusat di daerah.

**Namun, kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh meningkat menahan perlambatan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan.** Komponen Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 5,49% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2024 yang sebesar 5,13% (yoy). Pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga tetap kuat sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan terjaganya Nilai Tukar Petani pada level yang tinggi, adanya kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara dan Upah Minimum Provinsi, serta peningkatan aktivitas belanja masyarakat pada perayaan momen Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan kegiatan tahunan Haul Guru Sekumpul yang lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya.

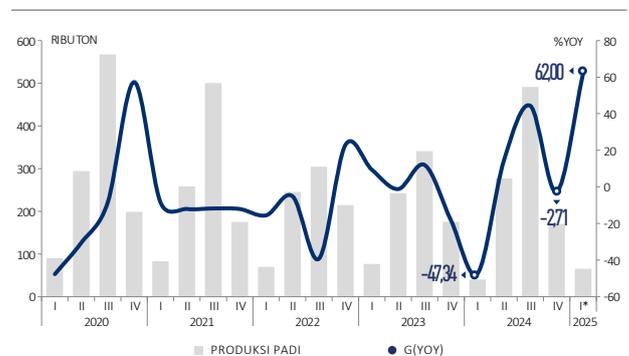
## 1.1 SISI LAPANGAN USAHA: SEKTOR UTAMA EKONOMI

Dari sisi penawaran, struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 didominasi oleh LU Pertambangan dengan andil sebesar 28,33%; diikuti oleh LU Industri Pengolahan (12,10%), LU Pertanian (10,33%), LU Perdagangan (10,32%).

### 1.1.1 LU Pertanian

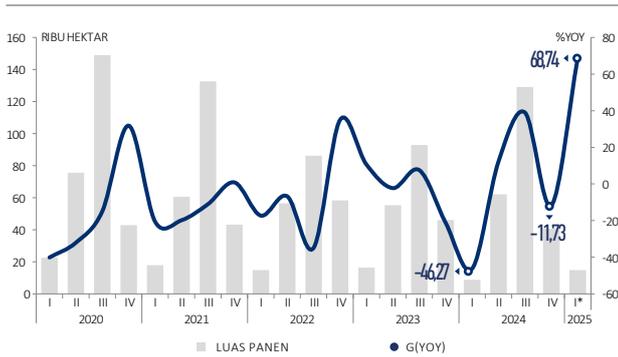
**Kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2025 tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** LU Pertanian tercatat tumbuh sebesar 7,74% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih tinggi dari triwulan IV 2024 yang sebesar 4,53% (yoy). Produksi padi pada triwulan I 2025 tumbuh sekitar 62% dibandingkan triwulan I 2024, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 2,71% (yoy). (Grafik 1.3). Tingginya peningkatan produksi padi tersebut sejalan dengan realisasi program ekstensifikasi dan optimalisasi lahan sejak triwulan II 2024 yang hingga kini telah terealisasi sekitar 41 ribu hektare.

Peningkatan produksi padi tersebut terkonfirmasi dari luas lahan yang juga diperkirakan meningkat. Luas lahan pada triwulan I 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 68,74% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2024 yang mengalami kontraksi 11,73% (yoy). (Grafik 1.4).



Sumber: DPKP Kalsel (Diolah)

Grafik 1.3 Produksi Padi

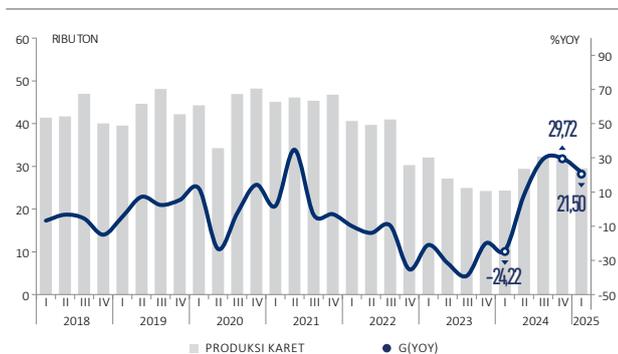


Sumber : DPKP Kalsel (Diolah)

Grafik 1.4 Luas Panen

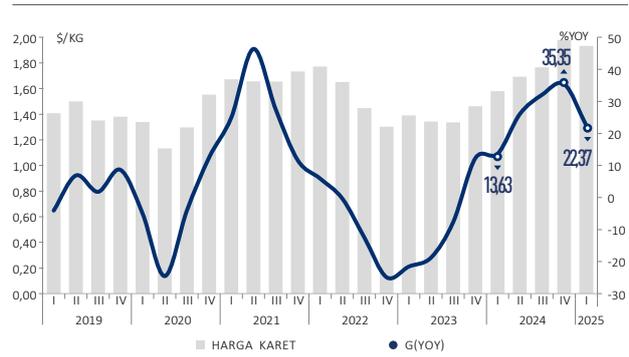
Lebih lanjut, pertumbuhan LU Pertanian yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja produksi karet yang mengalami perlambatan. Pada triwulan laporan, produksi karet tercatat tumbuh sebesar 21,50% (yoy) atau sebesar 29.551 ribu ton, tumbuh melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 29,72% (yoy) atau sebesar 20.584 ribu ton (Grafik 1.5).

Perlambatan kinerja produksi karet sejalan dengan tren harga karet dunia. Harga karet TSR20 pada triwulan I 2025 tercatat \$1,93/kg tumbuh sebesar 41,52% (yoy), namun lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar \$1,98/kg. Lebih lanjut, curah hujan yang relatif tinggi pada Tw I'25 turut menahan petani untuk melakukan penyadapan getah karet.



Sumber: GAPKINDO KalselTeng (diolah)

Grafik 1.5 Produksi Karet



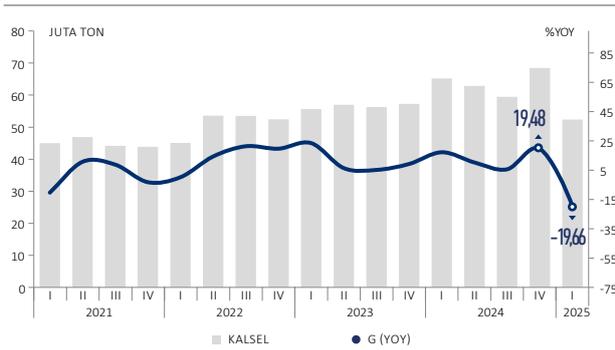
Sumber: Pink Sheet World Bank (diolah)

Grafik 1.6 Harga Karet (TSR20)

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian pada triwulan II 2025 diprakirakan tetap tumbuh positif, meskipun mengalami moderasi. Pertumbuhan luas panen padi diprediksi melandai, sementara produksi TBS juga diperkirakan menurun, dipengaruhi oleh dominasi tanaman kelapa sawit rakyat berusia 20–30 tahun serta terbatasnya realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat. Meskipun demikian, produksi padi diperkirakan tetap tumbuh, didukung oleh berlanjutnya program OPLAH yang telah berjalan sejak tahun 2024, serta potensi panen varietas unggul pada periode Mei–Juni 2025. Peningkatan produktivitas juga didorong oleh optimalisasi sumber daya melalui penugasan anggota brigade pangan dan pemanfaatan alat pertanian modern seperti traktor dan pompa air. Di sisi lain, potensi penurunan produktivitas tanaman kelapa sawit terdampak banyaknya usia tanaman kelapa sawit rakyat yang lebih dari 20thn diprakirakan menahan pertumbuhan LU pertanian yang lebih tinggi.

### 1.1.2 LU Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi. Pertumbuhan LU Pertambangan pada triwulan I 2025 tumbuh negatif pada level 0,07% (yoy), menurun dari triwulan IV 2024 yang masih tercatat positif 0,34% (yoy). Hal ini disebabkan oleh musim hujan yang relatif tinggi pada triwulan I 2025 sehingga mengganggu operasional tambang serta melambatnya permintaan dari negara mitra dagang utama.

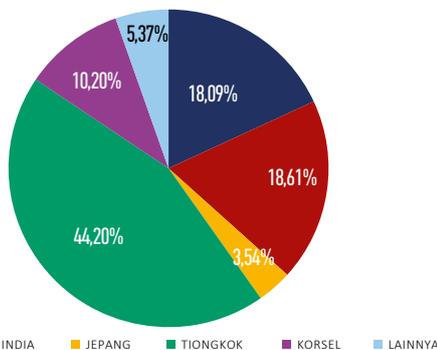


Sumber: Kementerian ESDM, Diolah

**Grafik 1.7** Produksi Batubara Kalimantan Selatan

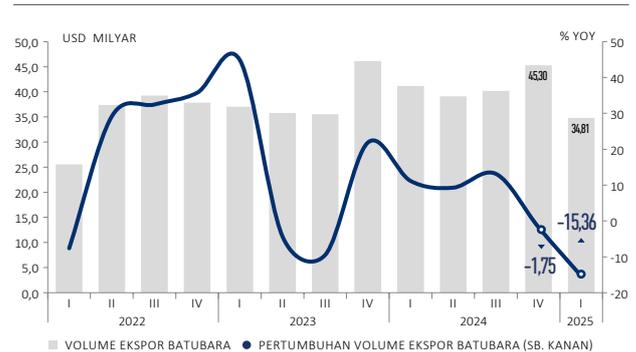
Penurunan kinerja LU Pertambangan tercermin dari produksi batu bara Kalimantan Selatan yang berkontraksi cukup dalam pada Triwulan I 2025, yang tercatat tumbuh negatif 22,75% (yoy) atau 47.982 ribu ton. Angka produksi tersebut menurun dibandingkan triwulan IV 2024 yang masih mencatatkan pertumbuhan positif 2,55% (yoy), atau sebesar 2,55% (yoy). (Grafik 1.7).

Pangsa ekspor batu bara Kalimantan Selatan didominasi oleh Tiongkok (44,20%) dan India (18,61%) (Grafik 1.8). Kinerja ekspor batu bara Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025 mengalami perlambatan sebesar -15,36% (yoy), lebih dalam dibandingkan perlambatan sebesar -1,75% (yoy) pada Triwulan IV 2024 (Grafik 1.9). Perlambatan ekspor tersebut antara lain dipengaruhi oleh penurunan pengiriman ke sejumlah negara tujuan utama. Ekspor ke Tiongkok tercatat turun sebesar 28,62% (yoy), berbalik arah dari pertumbuhan 10,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, ekspor ke India tetap



Sumber: Dirjen Bea dan Cukai (Diolah)

**Grafik 1.8** Pangsa Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan

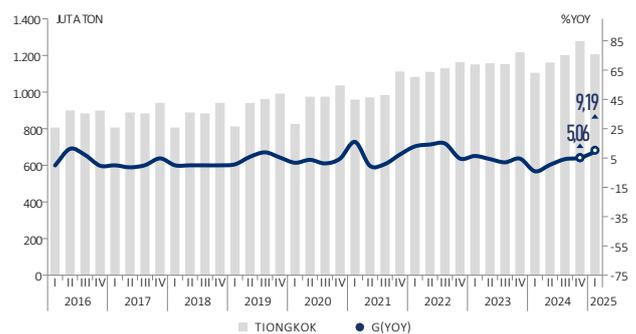


Sumber: Dirjen Bea dan cukai, diolah

**Grafik 1.9** Perkembangan Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan

mengalami kontraksi sebesar 21,27% (yoy), namun menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan penurunan 58,01% (yoy) pada Triwulan IV 2024.

Lebih lanjut, perlambatan kinerja ekspor batu bara Kalimantan Selatan antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kinerja produksi batu bara Tiongkok selaku mitra dagang utama batu bara Kalimantan Selatan. Produksi domestik Tiongkok pada triwulan I 2025 tercatat meningkat. Pada triwulan I 2025, Tiongkok memproduksi batu bara sebesar 1.205 juta ton, atau tumbuh 9,19% (yoy). Angka produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan produksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 1.278 juta ton, atau tumbuh sebesar 5,06% (yoy). (Grafik 1.10).



Sumber: McCloskey, diolah

**Grafik 1.10** Produksi Batu Bara Tiongkok

Pada triwulan II 2025, LU Pertambangan diperkirakan mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan I 2025. Kondisi ini sejalan dengan melemahnya permintaan batu bara dari negara

mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India, yang terdampak oleh perlambatan ekonomi serta kebijakan pemenuhan energi melalui peningkatan produksi domestik. Stok batu bara di Tiongkok pada triwulan I 2025 masih tinggi, sementara indeks PMI Tiongkok diperkirakan melambat pada triwulan II. Produksi batubara Kalimantan Selatan hingga April 2025 berkontraksi tajam sebesar -45,12% (yoy), seiring meningkatnya produksi domestik di kedua negara tersebut. Di dalam negeri, permintaan listrik rumah tangga melemah akibat normalisasi pasca libur dan berakhirnya diskon listrik, sedangkan permintaan industri semen melambat karena sektor konstruksi yang belum pulih penuh.

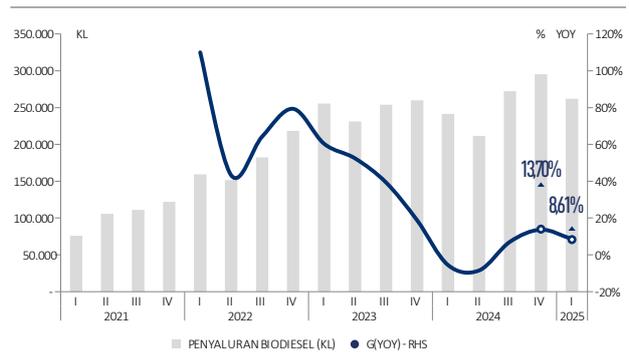
Meski demikian, terdapat potensi peningkatan permintaan dari India terutama untuk kebutuhan batubara termal menjelang puncak konsumsi listrik pada musim panas serta batubara kokas guna mendukung ekspansi industri baja, dengan PMI India yang masih kuat. Selain itu, permintaan domestik diperkirakan masih kuat seiring beroperasinya smelter alumina dan PLTU Jawa 9 dan 10 yang direncanakan mulai beroperasi pada Juni 2025.

### 1.1.3 LU Industri Pengolahan

**Pada Triwulan I 2025, kinerja LU Industri Pengolahan tetap tumbuh solid meski melambat.**

LU Industri Pengolahan pada Triwulan I 2025 tumbuh sebesar 7,86% (yoy), termoderasi dibandingkan dengan pertumbuhan 8,38% (yoy) pada triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan yang melambat utamanya disebabkan oleh penurunan produksi TBS sebagai bahan baku CPO, seiring resiko penurunan produktivitas tanaman kelapa sawit seiring banyaknya tanaman sawit rakyat yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal tersebut terkonfirmasi dari penerbitan rekomendasi teknis pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 5.989 hektare.

Lebih lanjut, penurunan produksi CPO berdampak pada penyaluran biodiesel yang melandai pada triwulan I 2025. Penyaluran biodiesel pada periode

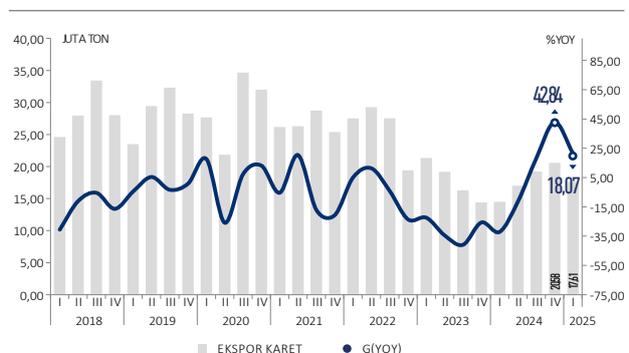


Sumber: Asosiasi Produsen Biodiesel (diolah)

**Grafik 1.11** Perkembangan Produksi Biodiesel Kalimantan Selatan

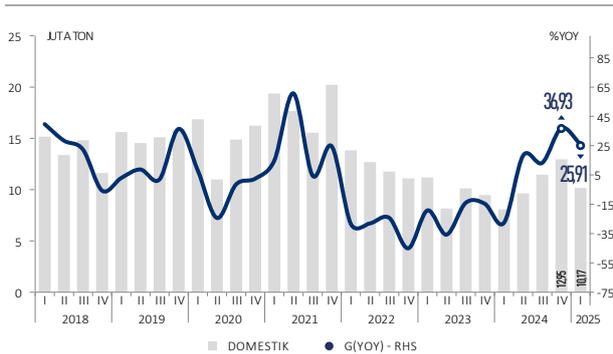
laporan tumbuh 8,61% (yoy) dengan realisasi produksi sebesar 262.141 kL, melambat dibandingkan Triwulan IV 2024 yang mencapai 295.403 kL dengan pertumbuhan 13,7% (yoy) (Grafik 1.11). Perlambatan dimaksud juga disebabkan oleh perlambatan penetapan implementasi B40.

**Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan yang lebih kuat tertahan oleh moderasi pertumbuhan pada industri karet.** Volume ekspor karet pada Triwulan I 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,07% (yoy), melanjutkan tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan capaian Triwulan IV 2024 yang tumbuh 42,84% (yoy) (Grafik 1.12). Di sisi lain, penjualan domestik karet tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 25,91% (yoy), meski sedikit termoderasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 36,93% (yoy) (Grafik 1.13).



Sumber: GAPKINDO KalselTeng (diolah)

**Grafik 1.12** Perkembangan Volume Penjualan Ekspor Karet



Sumber: GAPKINDO KalselTeng (diolah)

**Grafik 1.13** Perkembangan Volume Penjualan Domestik Karet

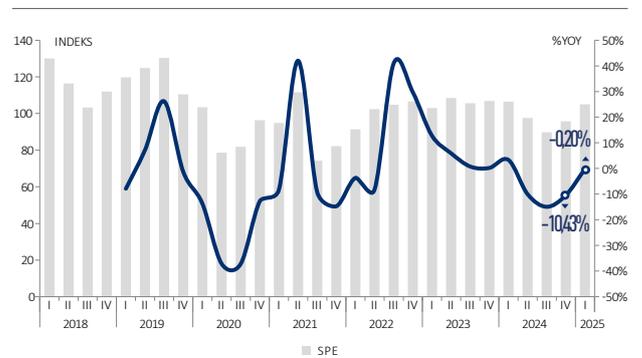
Pada triwulan II 2025, LU Industri Pengolahan diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh positif. Perlambatan ini terutama dipicu oleh penurunan produksi CPO yang disebabkan oleh usia tanaman yang tua dan periode replanting, serta menurunnya produksi biodiesel akibat melemahnya permintaan. Produksi minyak goreng juga melandai setelah percepatan produksi untuk memenuhi kebutuhan selama periode libur Idul Fitri. Selain itu, ekspor CPO diperkirakan menurun karena kebijakan kenaikan pungutan ekspor yang mulai berlaku sejak Mei 2025, di tengah peningkatan pasokan global dari Malaysia dan harga CPO yang kurang kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya. Selain itu, perlambatan di LU Industri pengolahan juga tercermin dari perlambatan konsumsi listrik pada April 2025. Meski demikian, terdapat faktor pendorong seperti penetapan alokasi B40 untuk perusahaan BUBBN (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) yang sebelumnya B35, serta peningkatan produksi beras yang didukung oleh panen komoditas padi unggul di Kalimantan Selatan.

### 1.1.4 LU Perdagangan

Pada Triwulan I 2025, kinerja LU Perdagangan melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. LU Perdagangan tumbuh 7,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,02% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh perbaikan aktivitas penjualan eceran seiring tetap tingginya keyakinan konsumen. Indikator Survei

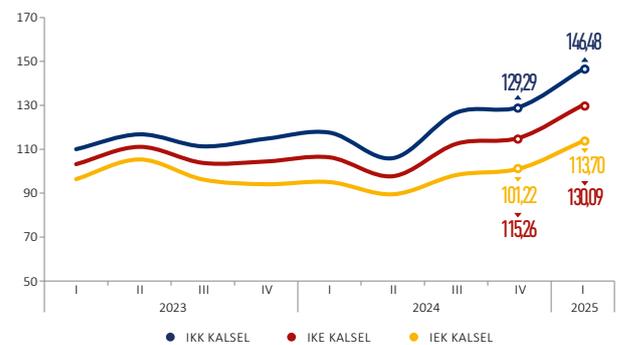
Penjualan Eceran dan Indeks Keyakinan Konsumen menunjukkan perbaikan selama periode laporan. Peningkatan ini selaras dengan momentum spesial seperti perayaan Haul Guru Sekumpul, HBKN termasuk Hari Raya Idul Fitri 1446H, serta libur Tahun Baru dan cuti bersama yang mendorong kenaikan permintaan barang konsumsi, perputaran sektor transportasi dan akomodasi, serta intensitas transaksi perdagangan di pasar tradisional maupun ritel modern.

Indeks Penjualan Riil (IPR) Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 melanjutkan tren perbaikan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, pertumbuhan IPR tercatat sebesar -0,20% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tercatat kontraksi sedalam -10,43% (yoy) (Grafik 1.14). Sejalan dengan itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga menunjukkan peningkatan, tercatat sebesar 130,09 pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya yang sebesar 115,26 (Grafik 1.15).



Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (Diolah)

**Grafik 1.14** Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil Kalimantan Selatan



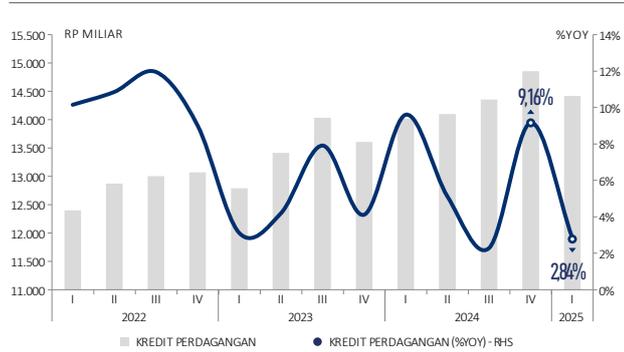
Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (Diolah)

**Grafik 1.15** Indeks Keyakinan Konsumen

Walaupun LU Perdagangan tercatat meningkat, penyaluran kredit perdagangan tercatat tumbuh melambat pada triwulan I 2025 sebesar 2,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,16% (yoy) (Grafik 1.16)

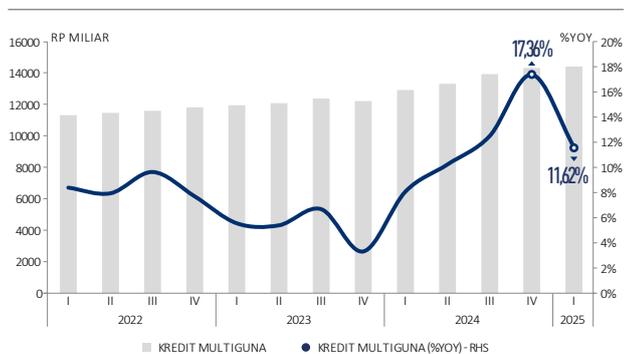
Selain itu, LU Perdagangan yang meningkat sejalan dengan realisasi penyaluran kredit multiguna yang memiliki proporsi terbesar dalam struktur kredit konsumsi pada triwulan I 2024 (48,24%). Kredit multiguna tercatat tumbuh melambat sebesar 11,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,36% (yoy) (Grafik 1.17).

Lebih lanjut, kredit kendaraan bermotor juga tercatat tumbuh melambat sebesar 17,77% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,64% (yoy) (Grafik 1.18).



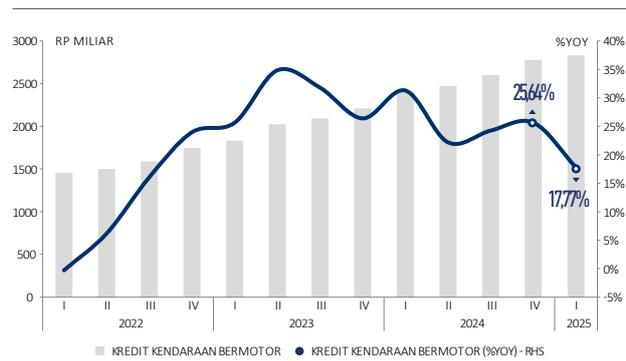
Sumber: LBU, diolah

**Grafik 1.16** Perkembangan Kredit Perdagangan di Kalimantan Selatan



Sumber: LBU, diolah

**Grafik 1.17** Perkembangan Kredit Multiguna di Kalimantan Selatan



Sumber: LBU, diolah

**Grafik 1.18** Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan

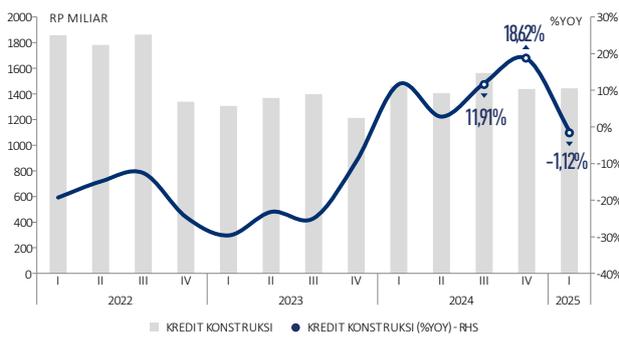
**LU Perdagangan pada triwulan II 2025 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh cukup tinggi.** Perlambatan ini dipengaruhi oleh melemahnya sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan yang sebelumnya menjadi pendorong utama. Indeks keyakinan konsumen pada triwulan II diperkirakan menurun dibandingkan periode sebelumnya, terutama akibat berkurangnya optimisme terkait penghasilan dan lapangan pekerjaan.

Normalisasi permintaan setelah libur panjang Idul Fitri juga diperkirakan akan menurunkan indeks penjualan ritel. Kredit konsumsi, seperti kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor, juga diperkirakan melambat karena masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Namun demikian, beberapa faktor masih dapat mendorong kinerja LU Perdagangan, antara lain pencairan gaji dan pensiun ASN ke-13 serta bantuan sosial dari PKH yang disalurkan sepanjang Mei hingga Juni diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat.

### 1.1.5 LU Konstruksi

**Pada triwulan I 2025, sektor konstruksi menunjukkan perlambatan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya.** LU Konstruksi mencatat kontraksi sebesar 0,35% (yoy), turun dari pertumbuhan 7,13% (yoy) pada Triwulan IV 2024. Penurunan LU Konstruksi sejalan dengan penyaluran Kredit Konstruksi pada triwulan I yang tercatat kontraksi sebesar 1,12% (yoy), menurun dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 18,62% (yoy).

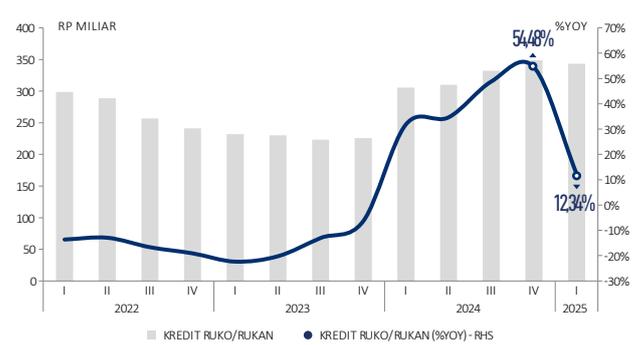


Sumber: LBU, diolah

**Grafik 1.19** Perkembangan Kredit Konstruksi Kalimantan Selatan

Hal serupa juga terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit ruko/rukan yang melambat menjadi 12,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 54,48% (yoy) (Grafik 1.20). Hal ini mengindikasikan adanya penurunan permintaan terhadap kebutuhan biaya untuk pembangunan ruko/rukan baik untuk ekspansi maupun renovasi, yang turut berkontribusi pada peningkatan permintaan bahan bangunan dan tenaga kerja pada LU Konstruksi.

**Pada triwulan II 2025, LU Konstruksi diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan I 2025 yang masih mengalami kontraksi.** Peningkatan ini terutama didorong oleh mulai direalisasinya beberapa proyek pemerintah yang sempat tertunda, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan, pengembangan irigasi, serta pemeliharaan bangunan. Aktivitas pengadaan proyek juga berlanjut pasca diterbitkannya Instruksi Presiden pada awal 2025. Selain itu, pertumbuhan kredit konstruksi, terutama untuk investasi, menunjukkan kenaikan signifikan pada bulan April, mencerminkan mulai berjalannya



Sumber: LBU, diolah

**Grafik 1.20** Perkembangan Kredit Ruko/Rukan di Kalimantan Selatan

belanja modal yang sempat terhenti sejak awal tahun.

Namun, pertumbuhan ini diperkirakan masih tertahan oleh penurunan pagu belanja modal APBD Kalimantan Selatan sebesar 20,26% serta proses pengadaan dan lelang proyek pemerintah yang sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran dan masa transisi pergantian kepala daerah. Selain itu, hingga pertengahan Mei 2025 belum ada proyek pemerintah baru yang memasuki tahap konstruksi meskipun blokir anggaran telah dibuka pada akhir April.

## 1.2 SISI PENGELUARAN

**Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 yang melambat disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor sejalan dengan kinerja LU Pertambangan. Namun, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap tinggi terutama ditopang oleh kinerja konsumsi Rumah Tangga, yang tetap tumbuh kuat dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.**

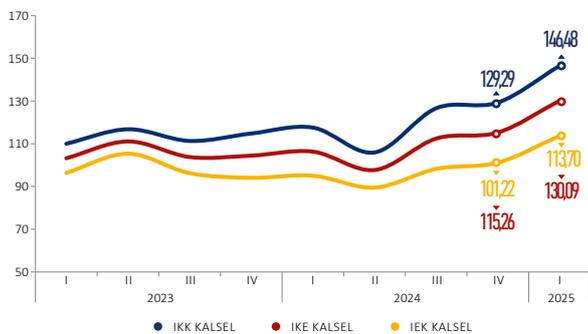
**Tabel 1.2** Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran (%yoy)

Permintaan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Tw. I-2025		
							(%) (yoy)	Pangsa (%)	SOG
Konsumsi Rumah Tangga	4,01	-0,26	1,11	5,21	5,19	5,37	5,49	48,55	2,67
Konsumsi LNPRT	7,97	-2,40	1,10	5,02	8,32	13,61	2,98	1,09	0,03
Konsumsi Pemerintah	2,91	-2,49	3,69	-0,64	4,97	4,76	1,19	7,49	0,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,37	-1,35	0,84	5,34	5,08	4,97	-0,78	21,42	-0,17
Perubahan Stok & Diskrepansi Statistik	-47,04	-89,30	30,16	-908,12	71,82	-55,92	-81,85	-0,15	0,12
Ekspor Barang dan Jasa	2,16	-11,17	18,58	13,29	7,54	4,95	-14,98	75,91	-11,37
Impor Barang dan Jasa	1,57	-13,54	20,74	14,49	8,45	5,80	-21,42	54,31	-11,64
<b>PDRB</b>	<b>4,09</b>	<b>-1,82</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,84</b>	<b>5,05</b>	<b>4,81</b>	<b>100,00</b>	<b>4,81</b>

Sumber: BPS Kalsel (diolah), % yoy menunjukkan pertumbuhan tahunan, SOG = source of growth

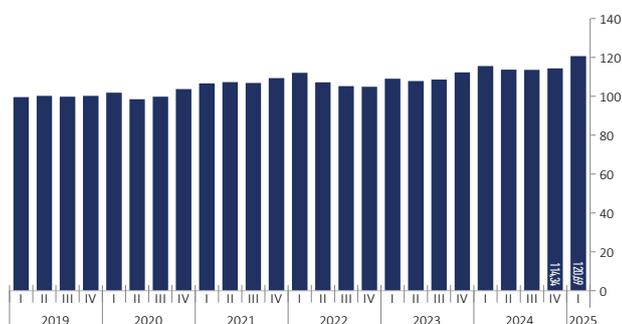
### 1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Pada triwulan I 2025, konsumsi RT tumbuh kuat sebesar **5,49% (yoy)**. Pertumbuhan konsumsi RT tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang mampu tumbuh 5,13% (yoy). Pertumbuhan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan masih tingginya NTP, meningkatnya gaji ASN dan UMP, serta peningkatan aktivitas belanja masyarakat pada perayaan momen HBKN Idul Fitri 1446 H dan kegiatan tahunan Haul Guru Sekumpul yang lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, kuatnya pertumbuhan kinerja Konsumsi RT tecermin melalui Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Grafik 1.21). Di samping itu, indeks penerimaan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dengan pangsa tenaga kerja terbesar mencatatkan kenaikan, terkonfirmasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat dari 115,43 menjadi 120,69 (Grafik 1.22).



Sumber : Survei Konsumen KPwBI Kalsel

**Grafik 1.21** Survei Konsumen Bank Indonesia



Sumber : BPS Kalsel (diolah)

**Grafik 1.22** Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan

Pada triwulan II 2025, konsumsi RT diprakirakan melanjutkan pertumbuhan positif dan akseleratif, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan akselerasi belanja masyarakat seiring dengan meningkatnya prakiraan produksi padi sejalan dengan realisasi program Optimalisasi Lahan (Oplah) seluas 17.000 Ha. Lebih lanjut, kenaikan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% serta penyaluran gaji ke-13 diperkirakan turut menopang daya beli masyarakat pada triwulan II 2025. Optimisme masyarakat pada triwulan II 2025 diproyeksikan meningkat sejalan dengan aktivitas dan permintaan yang lebih baik.

### 1.2.2 Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar **1,19% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar **2,57% (yoy)**. Kinerja konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh positif bersumber dari realisasi APBN maupun APBD yang meningkat meski pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD hingga triwulan I 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Perlambatan konsumsi pemerintah antara lain bersumber dari realisasi belanja negara pada triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar **3,10% (yoy)** (Tabel 1.3), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar **25,30% (yoy)**. Perlambatan komponen belanja negara disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dimana pertumbuhan pagu anggaran pada triwulan I 2025 adalah sebesar **-11,83% (yoy)**, terkontraksi lebih dalam dibandingkan pertumbuhan pagu anggaran dimaksud pada triwulan I 2024 yang sebesar **-0,60% (yoy)**. Lebih lanjut, pertumbuhan komponen belanja pemerintah pusat pada triwulan laporan juga terkontraksi, yakni sebesar **-26,98% (yoy)** (Tabel 1.3), menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh positif **50,73% (yoy)**.

**Tabel 1.3** Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan

Komponen	Pagu		Realisasi		% APBN 2025	% Growth (yoy)
	2024	2025	s.d. 31 Maret 2024	s.d. 31 Maret 2025		
<b>Belanja Negara</b>	<b>41.686,43</b>	<b>37.824,09</b>	<b>8.281,18</b>	<b>8.537,60</b>	<b>22,57</b>	<b>3,10</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>10.044,14</b>	<b>9.923,97</b>	<b>2.091,54</b>	<b>1.527,23</b>	<b>15,39</b>	<b>-26,98</b>
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>31.642,29</b>	<b>27.900,11</b>	<b>6.189,64</b>	<b>7.010,36</b>	<b>25,13</b>	<b>13,26</b>
Dana Bagi Hasil	17.852,61	13.968,40	2.778,43	3.192,57	22,86	14,91
Dana Alokasi Umum	8.525,78	8.842,87	2.294,81	2.418,62	27,35	5,40
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.065,95	796,73	0,00	2,62	0,33	0,00
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.354,44	2.622,50	467,18	674,77	25,73	44,43
Hibah	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otsus & DID	314,61	183,41	7,54	11,30	6,16	49,87
Dana Desa	1.514,40	1.486,20	641,68	710,48	47,81	10,72

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalsel

Lebih lanjut, realisasi pendapatan APBD (Provinsi dan Kabupaten Kota) pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh melambat sebesar 19,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,79% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pendapatan APBD antara lain disebabkan oleh perlambatan komponen pendapatan APBD utamanya disebabkan oleh penurunan pagu pendapatan APBD yang berkontraksi sebesar 7,52% (yoy), dimana nominal pagu pendapatan APBD triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp41,82 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu pendapatan APBD pada triwulan yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp45,22 triliun (Tabel 1.4).

Namun demikian, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi belanja APBD (Provinsi

dan Kabupaten Kota) pada triwulan I 2025 yang tumbuh 29,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,14% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan realisasi belanja APBD (Provinsi dan Kabupaten Kota) yang meningkat, bersumber dari peningkatan belanja operasional yang terealisasi sebesar Rp3,74 triliun, atau sebesar 12,57% terhadap pagu, lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja operasional pada periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi Rp2,55 triliun, atau sebesar 8,65% terhadap pagu (Tabel 1.4).

Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama ditopang oleh komponen belanja pegawai pada

**Tabel 1.4** Perkembangan Realisasi Belanja APBD di Kalimantan Selatan

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan IV		Realisasi s.d. Triwulan I	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>45.224,56</b>	<b>41.821,50</b>	<b>6.863,77</b>	<b>8.211,38</b>	<b>15,18%</b>	<b>19,63%</b>
Pendapatan Asli Daerah	7.789,94	8.438,55	1.301,96	1.675,00	16,71%	19,85%
Pendapatan Transfer	36.281,76	32.739,56	5.558,14	6.388,72	15,32%	19,51%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.152,86	643,40	3,67	147,67	0,32%	22,95%
<b>Belanja Daerah</b>	<b>51.224,38</b>	<b>47.435,59</b>	<b>4.082,25</b>	<b>5.300,51</b>	<b>7,97%</b>	<b>11,17%</b>
Belanja Operasional	29.499,42	29.776,01	2.550,86	3.742,64	8,65%	12,57%
Belanja Modal	15.036,23	11.457,38	221,69	171,32	1,47%	1,50%
Belanja Tak Terduga	330,82	674,36	1,64	1,71	0,50%	0,25%
Dana Transfer Pemda	6.357,91	5.527,83	1.308,06	1.384,84	20,57%	25,05%

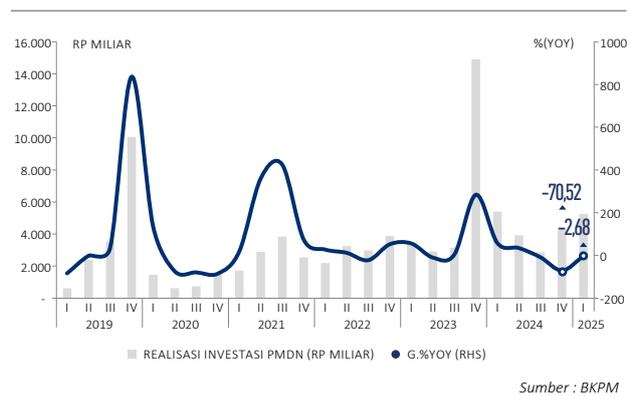
Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

tahun 2025 seiring dengan kenaikan gaji ASN/TNI/Polri sebesar 8%<sup>1</sup> dan belanja untuk kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat menopang peningkatan realisasi belanja daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, kenaikan yang lebih tinggi tertahan akibat normalisasi pengeluaran belanja APBD setelah berakhirnya momen Pilkada pada akhir tahun 2024. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak terhadap akselerasi belanja pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres 1 tahun 2025<sup>2</sup> ditujukan untuk *refocusing* belanja yang kurang efisien kepada komponen belanja yang lebih memberikan nilai tambah. Kebijakan efisiensi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan Pemerintah terhadap kebutuhan publik. Adapun fokus efisiensi anggaran belanja Pemerintah di antaranya dilakukan pada belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.

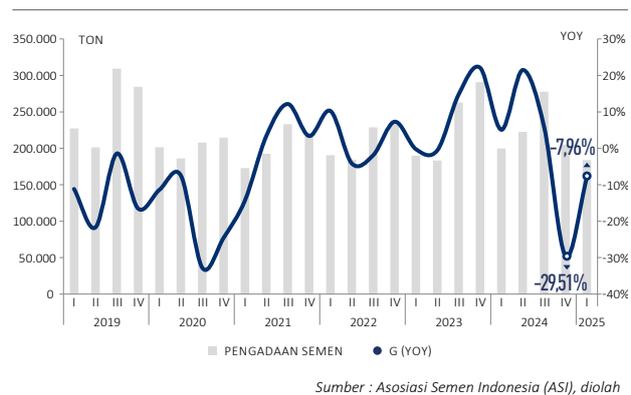
### 1.2.3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)

Kinerja investasi pada triwulan I 2025 tercatat kontraksi sedalam 0,78% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 4,41% (yoy). Melambatnya kinerja investasi terkonfirmasi dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masih mengalami kontraksi, sebesar 2,68 % (yoy) pada triwulan I 2025 (Grafik 1.23). Perlambatan PMTB juga sejalan dengan realisasi belanja modal Pemerintah pada triwulan laporan yang mencatatkan kontraksi sedalam 93,15% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,14% (yoy). Perlambatan PMTB di daerah terutama disebabkan oleh tertahannya belanja pemerintah terdampak kebijakan efisiensi anggaran di tengah masa transisi pergantian kepala daerah. Perlambatan aktivitas investasi dan konstruksi juga sejalan dengan realisasi pengadaan semen yang menurun dari 3,90% (yoy) menjadi -7,96 % (yoy) (Grafik 1.24).

Namun demikian, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar -52,79% (yoy) (Grafik 1.24). Di sisi lain, walaupun meningkat dari triwulan sebelumnya, pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih tercatat kontraksi, sebesar 2,68% (yoy) (Grafik 1.25). Secara umum, investasi baik PMA maupun PMDN masih didominasi oleh sektor pertambangan dan pertanian. Pertumbuhan investasi juga didukung oleh pembiayaan perbankan khususnya kredit pada komponen investasi yang tercatat tumbuh, sebesar 19,37% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi, sebesar 4,66% (yoy).

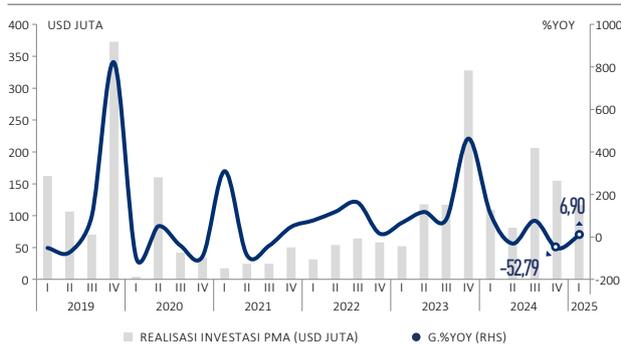


**Grafik 1.23** Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



**Grafik 1.24** Realisasi Pengadaan Semen

1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  
 2 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025



Sumber : BKPM

**Grafik 1.25** Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

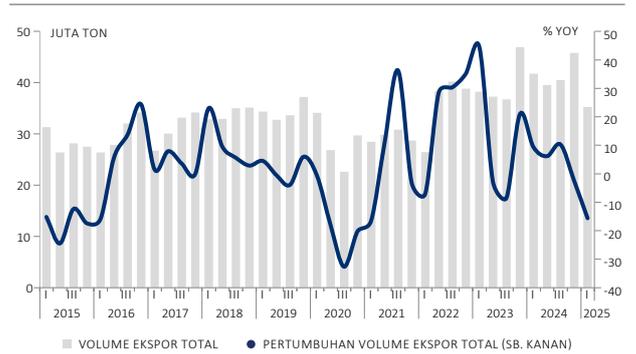
**Kinerja investasi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.**

Pertumbuhan yang lebih tinggi terutama didorong oleh akselerasi proyek-proyek pemerintah yang mulai berjalan pasca pembukaan blokir anggaran dan masa transisi pergantian kepala daerah. Di samping itu, penyesuaian pagu pendapatan khususnya pada komponen TKDD DAK Fisik akibat efisiensi anggaran diperkirakan menahan kinerja investasi bangunan.

### 1.2.4 Ekspor

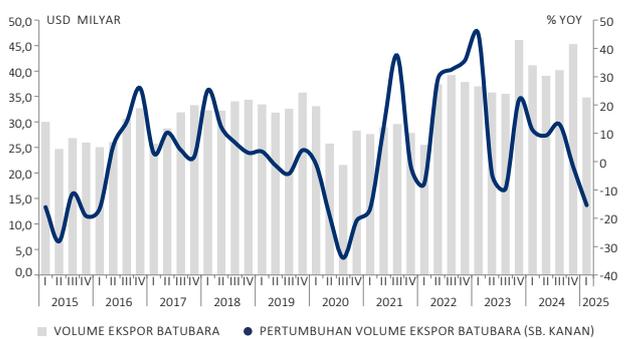
**Pada triwulan I 2025, total ekspor tercatat kontraksi, sebesar 9,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 0,43% (yoy).** Melambatnya kinerja ekspor terutama bersumber dari penurunan volume ekspor batu bara seiring tertahannya permintaan negara mitra dagang utama (Tiongkok dan India), di tengah curah hujan yang menghambat produksi batu bara Kalimantan Selatan. Selain itu, volume ekspor kayu lapis turut melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, volume ekspor total luar negeri terkontraksi lebih dalam dari -2,42% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi -15,66% (yoy) pada triwulan I 2025 (Grafik 1.26).

**Volume ekspor batu bara triwulan I 2025 tercatat kontraksi, sebesar 15,36% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan IV 2024, sebesar 1,75% (yoy) (Grafik 1.27).** Kontraksi



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

**Grafik 1.26** Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

**Grafik 1.27** Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri Batu bara

pertumbuhan volume ekspor batu bara terjadi akibat menurunnya permintaan negara mitra dagang utama yaitu Tiongkok dan India. Penurunan permintaan batu bara disebabkan oleh peningkatan produksi energi bersih/EBT (*hydropower*) oleh India dan Tiongkok, serta peningkatan produksi batu bara domestik dalam mengantisipasi permintaan listrik pada musim dingin. Selain itu, curah hujan yang tinggi di Kalsel menahan kenaikan produksi batu bara pada triwulan laporan.

**Sementara itu, volume ekspor CPO pada triwulan I 2025 tercatat kontraksi sebesar 33,43% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi -2,61% (yoy) (Grafik 1.28).** Kinerja ekspor CPO yang menurun sejalan dengan meningkatnya permintaan dalam negeri, khususnya terkait pengolahan biodiesel (B40) dan percepatan produksi menjelang periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

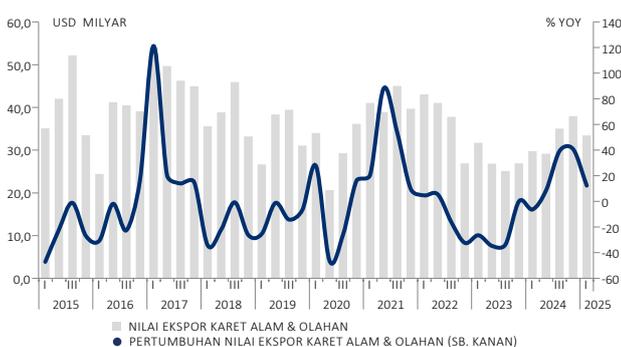


Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

**Grafik 1.28** Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri CPO

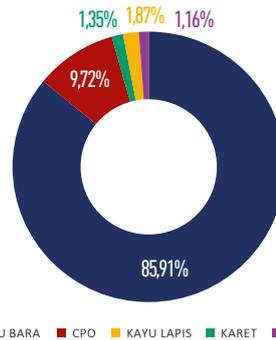
Pertumbuhan nilai ekspor karet alam dan olahan Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 mengalami penurunan. Pada triwulan I 2025, nilai ekspor karet tercatat melambat, sebesar 12,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 40,82% (yoy) (Grafik 1.29). Hal tersebut dipengaruhi oleh produksi tanaman karet yang menurun akibat curah hujan yang cukup tinggi sepanjang triwulan I 2025 yang berdampak pada penurunan produktivitas.

Komposisi nilai ekspor berdasarkan komoditas sampai dengan triwulan I 2025 masih didominasi oleh komoditas batu bara. Dominasi batu bara dalam struktur ekspor Kalimantan Selatan tecermin dari pangsa yang signifikan, yaitu 85,91% dari total ekspor Kalimantan Selatan. Sementara itu, CPO menjadi komoditas ekspor terbesar kedua dengan pangsa sebesar 9,72%, diikuti kayu lapis sebesar 1,87% dan karet sebesar 1,35% (Grafik 1.30).



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

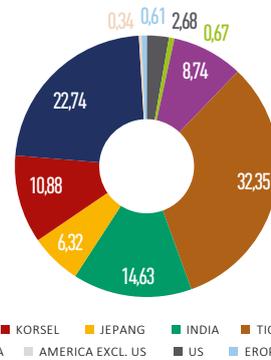
**Grafik 1.29** Pertumbuhan Volume Ekspor Luar Negeri Karet Alam & Olahan



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

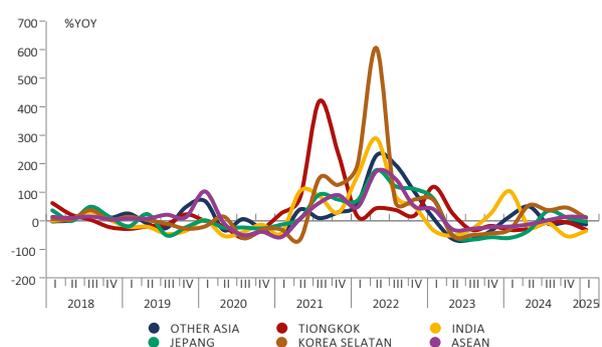
**Grafik 1.30** Distribusi Nilai Ekspor Triwulan I 2025 Berdasarkan Komoditas

Berdasarkan negara tujuan, pangsa ekspor Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 ditujukan ke negara Tiongkok (32,35%), India (14,63%), ASEAN (22,74%), Jepang (6,32%) dan Korea Selatan (10,88%) (Grafik 1.31). Secara umum, Pertumbuhan nilai ekspor negara mitra dagang utama tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan melandainya permintaan negara Tiongkok dan India di tengah ketidakpastian global dan tensi geopolitik yang masih berlangsung (Grafik 1.32).



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

**Grafik 1.31** Distribusi Nilai Ekspor Triwulan I 2025 Berdasarkan Negara Tujuan



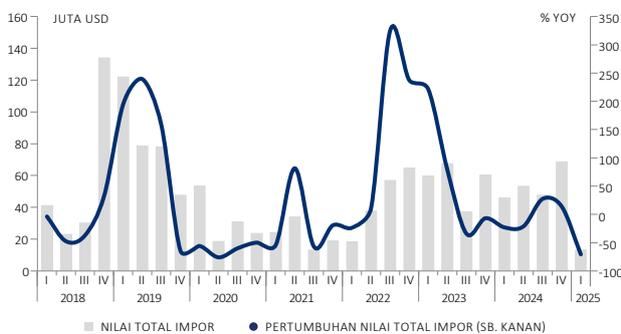
Sumber : Data Ekspor Impor Bank Indonesia (diolah)

**Grafik 1.32** Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

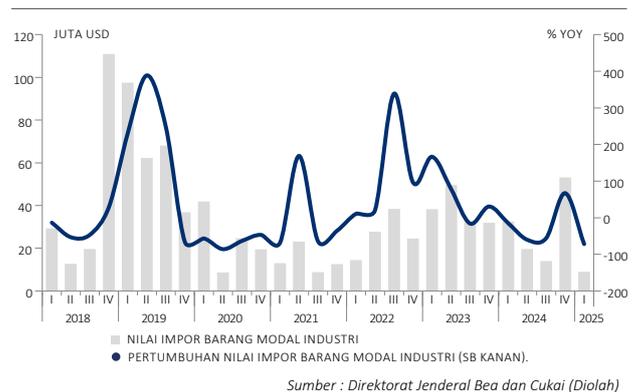
**Kinerja ekspor Kalimantan Selatan pada triwulan II 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Perbaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan permintaan batu bara domestik (antar provinsi) utamanya untuk mendukung kebutuhan listrik domestik RT dan operasionalisasi *smelter* di Sulawesi. Di sisi lain, ekspor CPO diperkirakan tetap tumbuh walaupun melambat. Perlambatan ini seiring dengan semakin dominannya permintaan CPO untuk kebutuhan domestik sejalan implementasi Biodiesel B40 di tengah produksi tandan buah segar (TBS) yang telah melewati periode *peak crop*.

### 1.2.5 Impor

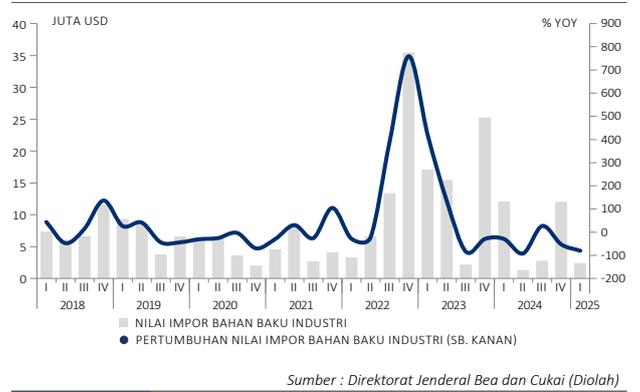
**Impor Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tercatat kontraksi, sebesar 70,88% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,81% (yoy).** Secara umum, pertumbuhan impor pada triwulan I 2025 tumbuh negatif 70,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang masih tumbuh di level positif sebesar 13,81% (yoy) (Grafik 1.33). Penurunan kinerja impor luar negeri terutama berasal dari impor barang modal industri yang terkontraksi sebesar 72,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 66,85% (yoy) (Grafik 1.34). Selain itu, impor bahan baku industri juga tercatat kontraksi sebesar 79,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -52,31% (yoy) (Grafik 1.35).



**Grafik 1.33** Pertumbuhan Volume Impor Luar Negeri



**Grafik 1.34** Perkembangan Volume Impor Material Mentah



**Grafik 1.35** Perkembangan Volume Impor Bahan Baku Industri

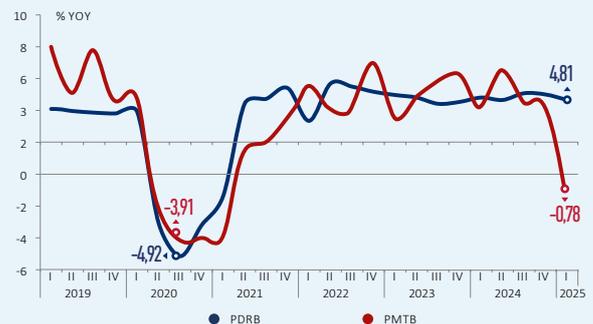
**Pada triwulan II 2025, impor Kalimantan Selatan diperkirakan sedikit lebih baik meski masih mengalami kontraksi.** Hal tersebut sejalan dengan kinerja LU utama, antara lain LU Pertambangan, LU Pertanian, dan LU Industri Pengolahan yang diperkirakan terkontraksi. Namun demikian, kinerja impor yang sedikit membaik ditopang oleh kinerja LU Konstruksi yang diperkirakan membaik seiring dengan dimulainya kontrak pembangunan proyek-proyek pemerintah.

## AKSELERASI KINERJA INVESTASI MELALUI PENINGKATAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH





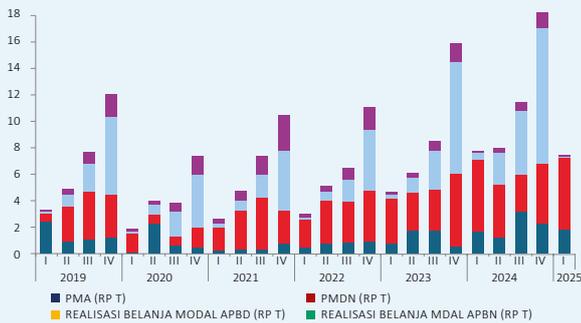
Berdasarkan data rilis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, kinerja investasi atau Pembentukan Modal Tetap Domestik (PMTB) terkontraksi sebesar 0,78% (yoy) pada triwulan I 2025. Terkontraksinya kinerja investasi Kalimantan Selatan merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak terakhir pandemi covid-19 pada triwulan II 2020 (Grafik B1.1).



Sumber: BPS Kalsel, diolah

**Grafik B1.1** Kinerja PDRB dan PMTB Kalimantan Selatan

Penurunan kinerja PMTB Kalimantan Selatan diakibatkan oleh menurunnya seluruh komponen penyusun PMTB, yang terdiri dari Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah. Jika dilihat berdasarkan komponennya, penurunan terbesar berasal dari realisasi Belanja Modal Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Grafik B1.2). Penurunan realisasi APBD tersebut disinyalir akibat kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran Pemerintah, sehingga menunda aktivitas transaksi Pemerintah Daerah.



Sumber: BPS Kalsel, DJPb Kalsel, diolah

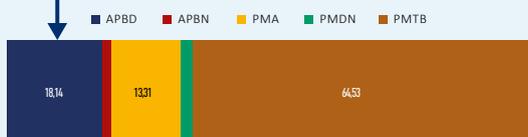
**Grafik B1.2** Kinerja Komponen Penyusun PMTB Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil estimasi sederhana menggunakan metode *variance decomposition* yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa fluktuasi belanja modal APBD berkontribusi paling besar terhadap fluktuasi PMTB sebesar rata-rata 18,14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa APBD memiliki pengaruh yang cukup tinggi dibandingkan komponen penyusun lainnya seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam menentukan kinerja PMTB (Grafik B1.3).

**Hasil dari pengujian tersebut, terkonfirmasi pada triwulan I 2025, Belanja Modal yang bersumber dari APBD berkontraksi dalam sebesar 71% akibat kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran.** Selain itu, kinerja PMA juga mengalami penurunan yang cukup dalam, namun korelasi Belanja Modal APBD terhadap PMTB memiliki korelasi lebih tinggi dari PMA (Grafik B1.4).

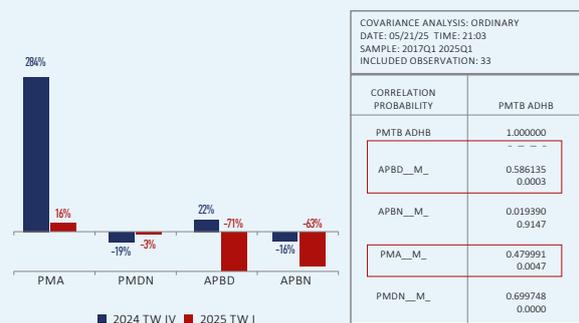
VARIANCE DECOMPOSITION OF D (PMTB\_ADHB):

PERIOD	S.E.	D(PMTB_A...	D(APBD_...	D(APBN_...	PMA_M_...	D(PMDN_...
1	547.0282	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	692.1067	62.49865	24.68265	2.136427	9.871220	0.811053
3	889.9699	62.48158	18.47809	1.402596	17.13274	0.504990
4	960.7272	53.79231	21.65866	2.359259	18.20537	3.984406
5	1069.270	57.97465	19.15188	2.113224	17.10671	3.653540
6	114.153	50.48653	24.87573	1.876160	17.56413	5.197457



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

**Grafik B1.3** Hasil Pengujian *Variance Decomposition*



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

**Grafik B1.4** Hasil Uji Korelasi Komponen Penyusun PMTB

Oleh karena itu, diperlukan upaya oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga pagu khususnya belanja modal dan peningkatan efektivitas penganggaran pasca dilakukannya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran. Menurut kajian empiris (Bayraktar, 2021) belanja modal pemerintah memengaruhi investasi swasta. Selain dari sisi pagu, dibutuhkan juga akselerasi realisasi APBD khususnya belanja modal dan melakukan optimalisasi penggunaan belanja modal yang diarahkan pada proyek prioritas nasional dan daerah. Harapannya, dengan dilakukan berbagai upaya tersebut, kinerja PMTB Kalsel dan perekonomian Kalimantan Selatan dapat terus meningkat untuk mencapai target pertumbuhan 8,1% pada tahun 2029.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## BAB II

# Keuangan Pemerintah

Secara agregat, nominal dan persentase realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2025 yang tercatat meningkat. Peningkatan pendapatan terjadi pada Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah didorong oleh pagu komponen pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan.



Secara agregat, nominal dan persentase realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh realisasi penyaluran THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 yang terealisasi pada triwulan I.

## 2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Secara agregat, persentase realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan I 2025 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp8,21 triliun atau 19,63% dari pagu tahun 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp6,86 triliun atau sebesar 15,18% (Tabel 2.1). Peningkatan nominal dan persentase realisasi pendapatan diakibatkan utamanya oleh meningkatnya realisasi semua komponen Pendapatan Daerah. Untuk peningkatan persentase realisasi juga didukung dengan menurunnya pagu Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp3,4 triliun dibandingkan dengan tahun 2024. Pada

periode laporan, rasio kemandirian agregat tercatat sebesar 20,40%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 18,97% (Grafik 2.1). Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja daerah yang tumbuh 29,84% (yoy) sejalan dengan realisasi penyaluran THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 yang terealisasi pada triwulan I.

### 2.1.1 Realisasi Pendapatan Provinsi

Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025, secara nominal dan realisasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp2,13 triliun atau sebesar 21,22% terhadap pagu, meningkat jika dibandingkan persentase

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

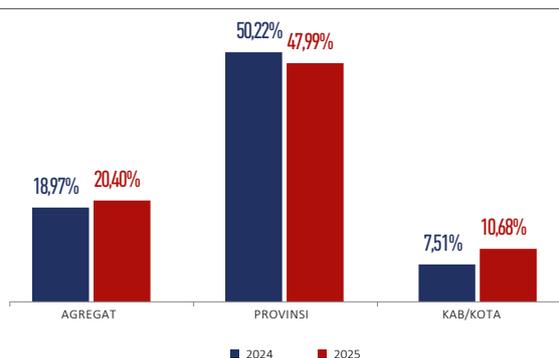
Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>45.224,56</b>	<b>41.821,50</b>	<b>6.863,77</b>	<b>8.211,38</b>	<b>15,18%</b>	<b>19,63%</b>
Pendapatan Asli Daerah	7.789,94	8.438,55	1.301,96	1.675,00	16,71%	19,85%
Pendapatan Transfer	36.281,76	32.739,56	5.558,14	6.388,72	15,32%	19,51%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.152,86	643,40	3,67	147,67	0,32%	22,95%
<b>Belanja Daerah</b>	<b>51.224,38</b>	<b>47.435,59</b>	<b>4.082,25</b>	<b>5.300,51</b>	<b>7,97%</b>	<b>11,17%</b>
Belanja Operasional	29.499,42	29.776,01	2.550,86	3.742,64	8,65%	12,57%
Belanja Modal	15.036,23	11.457,38	221,69	171,32	1,47%	1,50%
Belanja Tak Terduga	330,82	674,36	1,64	1,71	0,50%	0,25%
Dana Transfer Pemda	6.357,91	5.527,83	1.308,06	1.384,84	20,57%	25,05%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>7.789,94</b>	<b>8.438,55</b>	<b>1.301,96</b>	<b>1.675,00</b>	<b>16,71%</b>	<b>19,85%</b>
Hasil Pajak Daerah	5.158,70	5.513,98	913,03	1.260,64	17,70%	22,86%
Hasil Retribusi Daerah	1.108,23	1.256,97	56,00	145,08	5,05%	11,54%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	265,80	330,19	171,59	107,33	64,55%	32,51%
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.257,21	1.337,40	161,34	161,94	12,83%	12,11%
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>36.281,76</b>	<b>32.739,56</b>	<b>5.558,14</b>	<b>6.388,72</b>	<b>15,32%</b>	<b>19,51%</b>
Transfer Pemerintah Pusat	33.921,39	30.833,64	4.996,60	5.723,35	14,73%	18,56%
Transfer Antar Daerah	2.360,37	1.905,91	561,54	665,37	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>1.152,86</b>	<b>643,40</b>	<b>3,67</b>	<b>147,67</b>	<b>0,32%</b>	<b>22,95%</b>
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>45.224,56</b>	<b>41.821,50</b>	<b>6.863,77</b>	<b>8.211,38</b>	<b>15,18%</b>	<b>19,63%</b>

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu



Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

**Grafik 2.1** Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan I 2025

realisasi tahun 2024 dengan persentase realisasi terhadap pagu mencapai 15,85%. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan yang terjadi di seluruh komponen Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Tabel 2.3). Sampai dengan triwulan I 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp1,02 triliun atau 22,17% dari pagu APBD 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2024 sebesar Rp924 miliar atau 19,26% dari target APBD 2024 (Tabel 2.3). Pendapatan Transfer juga menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar Rp1,11 triliun atau 20,46% dari pagu 2025 (Tabel 2.3). Selain itu, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah dengan persentase realisasi sebesar 5,84% dari pagu 2025, sedangkan persentase realisasi tahun lalu di periode yang sama hanya 0,24%

dari pagu 2024. Tingkat kenaikan realisasi komponen PAD secara agregat (Provinsi dan Kab/Kota) pada triwulan I tahun 2025 mampu mendorong perbaikan rasio kemandirian daerah. Pada periode laporan, rasio kemandirian agregat tercatat sebesar 20,40%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 18,97% sejalan dengan naiknya rasio kemandirian fiskal kab/kota (Grafik 2.1). Rasio kemandirian provinsi tercatat sebesar 47,99%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 50,22% (Grafik 2.1). Sedangkan, rasio kemandirian kab/kota tercatat sebesar 10,68%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 7,51% (Grafik 2.1).

Penurunan rasio kemandirian provinsi disebabkan oleh nominal Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PAD. Masih rendahnya derajat kemandirian fiskal juga menunjukkan Pemerintah Provinsi di Kalimantan Selatan masih membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dalam membiayai kegiatan belanjanya. Meskipun derajat kemandirian fiskal menurun, namun realisasi komponen PAD terus membaik. Tren positif realisasi PAD didorong oleh meningkatnya realisasi komponen pajak daerah Provinsi, dari sebesar Rp755 miliar pada 2024, menjadi Rp893 miliar pada 2025. Di sisi lain, terdapat kenaikan dari komponen retribusi daerah yang cukup signifikan, dari Rp34 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp51 miliar pada tahun 2025.

**Tabel 2.3** Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>4.799,50</b>	<b>4.629,58</b>	<b>924,53</b>	<b>1.026,29</b>	<b>19,26%</b>	<b>22,17%</b>
Hasil Pajak Daerah	3.980,00	3.711,66	755,10	893,71	18,97%	24,08%
Hasil Retribusi Daerah	632,06	687,33	34,39	51,34	5,44%	7,47%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	62,29	74,10	62,78	57,31	100,79%	77,34%
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125,16	156,48	72,26	23,92	57,74%	15,29%
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>6.632,54</b>	<b>5.431,22</b>	<b>916,08</b>	<b>1.111,41</b>	<b>13,81%</b>	<b>20,46%</b>
Transfer Pemerintah Pusat	6.349,94	5.231,22	916,08	1.111,41	14,43%	21,25%
Transfer Antar Daerah	282,59	200,00	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>182,44</b>	<b>16,64</b>	<b>0,43</b>	<b>0,97</b>	<b>0,24%</b>	<b>5,84%</b>
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>11.614,48</b>	<b>10.077,44</b>	<b>1.841,04</b>	<b>2.138,67</b>	<b>15,85%</b>	<b>21,22%</b>

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.990,44</b>	<b>3.808,97</b>	<b>377,43</b>	<b>648,71</b>	<b>12,62%</b>	<b>17,03%</b>
Hasil Pajak Daerah	1.178,70	1.802,32	157,93	366,94	13,40%	20,36%
Hasil Retribusi Daerah	476,17	569,64	21,61	93,74	4,54%	16,46%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	203,52	256,09	108,81	50,02	53,46%	19,53%
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.132,05	1.180,91	89,08	138,02	7,87%	11,69%
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>29.649,22</b>	<b>27.308,34</b>	<b>4.642,06</b>	<b>5.277,31</b>	<b>15,66%</b>	<b>19,32%</b>
Transfer Pemerintah Pusat	27.571,44	25.602,42	4.080,52	4.611,94	14,80%	18,01%
Transfer Antar Daerah	2.077,77	1.705,91	561,54	665,37	27,03%	39,00%
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>970,42</b>	<b>626,76</b>	<b>3,23</b>	<b>146,69</b>	<b>0,33%</b>	<b>23,41%</b>
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>33.610,08</b>	<b>31.744,07</b>	<b>5.022,73</b>	<b>6.072,71</b>	<b>14,94%</b>	<b>19,13%</b>

Sumber: KFR Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

## 2.1.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota

Secara nominal dan persentase realisasi, total Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut ditopang oleh peningkatan semua komponen Pendapatan Daerah baik secara nominal dan persentase (Tabel 2.4).

Pada triwulan I 2025, realisasi PAD Kabupaten dan Kota sebesar Rp648 miliar atau 17,03% dari pagu APBD 2025, meningkat secara nominal dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp377 miliar atau 12,62% dari pagu APBD 2024. Kenaikan realisasi persentase PAD terutama disumbang oleh kenaikan pada komponen pajak daerah. Sementara itu, berdasarkan pangsa setiap komponen pendapatan, hasil pajak daerah menyumbang Rp366 miliar atau 20,36% dari total PAD, di samping itu 21,28% merupakan kontribusi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan 14,45% bersumber dari hasil retribusi daerah, serta 7,71% berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Secara spasial, persentase realisasi pendapatan tertinggi tercatat di Kab. Tanah Laut yakni sebesar Rp609,83 miliar atau 29,39% dari pagu 2025, sedangkan persentase realisasi terendah terdapat di Kab. Kotabaru, sebesar Rp352,96 miliar atau 7,11% dari pagu 2025 (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp miliar kecuali disebutkan lain)

No	Kota/Kab	Pagu 2025	Realisasi s.d. Tw I 2025	% Realisasi s.d. Tw I 2025
1	Kab. Banjar	2.553,90	606,11	23,73%
2	Kab. Barito Kuala	2.074,83	609,83	29,39%
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.244,38	562,59	25,07%
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.627,95	400,41	24,60%
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.666,80	319,31	19,16%
6	Kab. Kotabaru	1.632,56	338,36	20,73%
7	Kab. Tabalong	2.994,83	602,64	20,12%
8	Kab. Tanah Laut	4.965,39	352,96	7,11%
9	Kab. Tapin	1.560,30	290,47	18,62%
10	Kota Banjarbaru	3.090,94	724,59	23,44%
11	Kota Banjarmasin	3.506,65	465,92	13,29%
12	Kab. Balangan	2.345,48	494,80	21,10%
13	Kab. Tanah Bumbu	1.480,05	304,73	20,59%

Sumber: KFR Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

## 2.2 REALISASI BELANJA DAERAH

Secara agregat, nominal dan persentase realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 mengalami peningkatan. Hal tersebut diakibatkan oleh peningkatan belanja operasional yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan besaran 46,72%. Adapun realisasi belanja pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp5,3 triliun atau 11,17% dari pagu 2025. Realisasi ini lebih tinggi secara nominal dan persentase dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp4,08 triliun atau 7,97% pagu (Tabel 2.1).

Meski pagu belanja APBD dan komponen belanja penyusun lainnya secara umum terkontraksi pada tahun 2025, pagu belanja pegawai pada tahun 2025 secara khusus tumbuh 13,98% (yoy). Senada dengan itu, realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 tumbuh sebesar 53,48% (yoy).

## 2.2.1 Realisasi Belanja Provinsi

Secara nominal dan persentase, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2024. Realisasi terhadap pagu di tahun 2025 juga masih mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2024 (Tabel 2.7). Realisasi Belanja Daerah Provinsi tercatat sebesar Rp1,53 triliun atau sebesar 13,04% dari total pagu 2025, meningkat dibandingkan dengan

periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp1,42 triliun atau sebesar 10,69%. Akselerasi realisasi belanja pemerintah utamanya didorong oleh realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.

**Realisasi Belanja Operasional pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp809 miliar atau 12,01% dari pagu APBD 2025.** Realisasi tersebut lebih tinggi secara persentase dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp520 miliar atau 7,7% dari pagu APBD 2024 (Tabel 2.7). Kenaikan realisasi secara nominal dan persentase terjadi pada komponen belanja barang dan jasa dengan besaran Rp334 miliar atau 10,7% dari pagu 2025, sedangkan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar Rp266 miliar atau 7,6%

**Tabel 2.6** Realisasi Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I		% Growth s.d. Triwulan I
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
<b>Belanja Operasional</b>	<b>29.499,42</b>	<b>29.776,01</b>	<b>2.550,86</b>	<b>3.742,64</b>	<b>8,65%</b>	<b>12,57%</b>	<b>46,72%</b>
Belanja Pegawai	12.250,38	13.962,76	1.546,26	2.373,17	12,62%	17,00%	53,48%
Belanja Barang dan Jasa	14.621,97	13.936,33	917,05	1.269,25	6,27%	9,11%	38,41%
Hibah	2.314,79	1.613,31	67,38	69,13	2,91%	4,29%	2,61%
<b>Belanja Modal</b>	<b>15.036,23</b>	<b>11.457,38</b>	<b>221,69</b>	<b>171,32</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,50%</b>	<b>-22,72%</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>330,82</b>	<b>674,36</b>	<b>1,64</b>	<b>1,71</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,25%</b>	<b>4,19%</b>
<b>Transfer Pemda</b>	<b>6.357,91</b>	<b>5.527,83</b>	<b>1.308,06</b>	<b>1.384,84</b>	<b>20,57%</b>	<b>25,05%</b>	<b>5,87%</b>
Transfer Bagi Hasil	2.486,35	1.801,66	878,41	714,71	35,33%	39,67%	-18,64%
Transfer Bantuan Keuangan	3.871,56	3.723,67	429,65	670,13	11,10%	18,00%	55,97%
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>51.224,38</b>	<b>47.435,59</b>	<b>4.082,25</b>	<b>5.300,51</b>	<b>7,97%</b>	<b>11,17%</b>	<b>29,84%</b>

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

**Tabel 2.7** Realisasi Belanja APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Belanja Operasional</b>	<b>6.759,45</b>	<b>6.737,35</b>	<b>520,36</b>	<b>809,07</b>	<b>7,70%</b>	<b>12,01%</b>
Belanja Pegawai	2.717,77	3.326,46	253,89	461,34	9,34%	13,87%
Belanja Barang dan Jasa	3.505,14	3.126,88	266,47	334,70	7,60%	10,70%
Hibah	518,14	261,32	0,00	13,03	0,00%	4,99%
<b>Belanja Modal</b>	<b>4.049,85</b>	<b>3.093,04</b>	<b>29,18</b>	<b>25,04</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,81%</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>97,03</b>	<b>250,67</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Transfer Pemda</b>	<b>2.412,87</b>	<b>1.692,77</b>	<b>873,53</b>	<b>700,73</b>	<b>36,20%</b>	<b>41,40%</b>
Transfer Bagi Hasil	2.412,87	1.690,27	873,53	700,73	36,20%	41,46%
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>13.319,21</b>	<b>11.773,84</b>	<b>1.424,27</b>	<b>1.534,83</b>	<b>10,69%</b>	<b>13,04%</b>

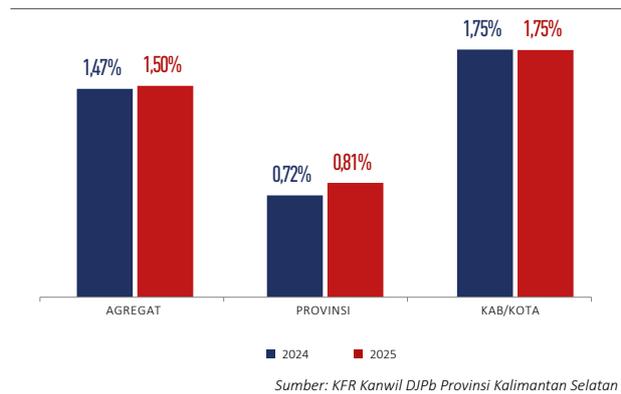
Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

dari pagu 2024. Sejalan dengan belanja barang dan jasa, realisasi belanja pegawai secara nominal dan persentase juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan triwulan I 2025 tercatat Rp461 miliar atau 13,87% dari pagu 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp253 miliar atau 9,34% dari pagu 2024. Sejalan dengan komponen belanja operasional lain, nominal Belanja Hibah menunjukkan tren peningkatan. Pada akhir triwulan I 2025, Belanja Hibah tercatat terealisasi sebesar Rp13 miliar atau 4,99% dari pagu 2025, pada periode yang sama di tahun 2024 tidak terdapat realisasi sama sekali dari pagu.

**Sampai dengan triwulan I 2025, belanja modal tercatat sebesar Rp25,03 miliar atau 0,81% dari pagu, lebih rendah secara nominal dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang sebesar 0,72% dengan nominal mencapai Rp29,17 miliar.** Seiring dengan penurunan pagu belanja modal, realisasi belanja modal pada tahun 2025 (hingga Maret 2025) terkonsentrasi sebesar 14,19% (yoy), yang antara lain disebabkan oleh kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran Pemerintah. Hal tersebut juga berdampak pada belum terealisasinya belanja tak terduga pada triwulan I 2025, berbeda dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 yang telah terealisasi 1,23% terhadap pagu.

### 2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota

**Realisasi belanja seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2025 meningkat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024.** Total realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp3,77 triliun atau 10,56% dari pagu, meningkat dibandingkan dengan belanja periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp2,66 triliun atau 7,01% dari pagu (Tabel 2.8). Realisasi belanja Kabupaten dan Kota didorong oleh kenaikan realisasi komponen belanja operasional, belanja tak terduga, dan transfer pemda sejalan dengan realisasi belanja pada masa Pemilu dan Pilkada,



Grafik 2.2

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Triwulan I 2025

bansos, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

**Realisasi Belanja Operasional sampai dengan triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp2,93 triliun atau 12,73% dari pagu.** Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2024 sebesar Rp2,03 triliun atau 8,93% dari pagu (Tabel 2.8). Berdasarkan pangasanya, belanja pegawai memiliki sumbangan terbesar dalam belanja operasional, yakni sebesar 65,17%. Selanjutnya, belanja barang dan jasa memiliki pangsa sebesar 31,86% terhadap belanja operasional. Kenaikan realisasi belanja operasional didorong oleh realisasi yang lebih tinggi pada komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa (Tabel 2.8). Realisasi belanja pegawai hingga triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp1,91 triliun, atau sebesar 17,97% terhadap pagu. Realisasi belanja pegawai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,29 triliun, atau sebesar 13,56% terhadap pagu. Senada dengan itu, realisasi belanja barang dan jasa hingga triwulan I 2025 juga mengalami peningkatan. Hingga triwulan I 2025, realisasi belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp934 miliar (atau terealisasi 8,65% terhadap pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp650 miliar (atau terealisasi 5,85% terhadap pagu).

**Realisasi belanja modal sampai dengan triwulan I 2025 tercatat stagnan secara persentase, meski mengalami penurunan secara nominal.** Realisasi

**Tabel 2.8** Realisasi Belanja APBD Kabupaten dan Kota Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Belanja Operasional</b>	<b>22.739,97</b>	<b>23.038,66</b>	<b>2.030,50</b>	<b>2.933,57</b>	<b>8,93%</b>	<b>12,73%</b>
Belanja Pegawai	9.532,61	10.636,30	1.292,37	1.911,83	13,56%	17,97%
Belanja Barang dan Jasa	11.116,83	10.809,44	650,58	934,55	5,85%	8,65%
Belanja Bunga	14,11	8,35	3,90	1,16	27,62%	13,85%
Belanja Subsidi	6,20	5,99	0,12	0,52	1,87%	8,60%
Belanja Hibah	1.796,65	1.351,99	67,38	56,10	3,75%	4,15%
Belanja Bansos	273,57	226,58	16,16	29,42	5,91%	12,99%
<b>Belanja Modal</b>	<b>10.986,38</b>	<b>8.364,34</b>	<b>192,51</b>	<b>146,28</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>233,78</b>	<b>423,68</b>	<b>0,45</b>	<b>1,71</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,40%</b>
<b>Transfer Pemda</b>	<b>3.945,04</b>	<b>3.835,06</b>	<b>434,53</b>	<b>684,12</b>	<b>11,01%</b>	<b>17,84%</b>
Transfer Bagi Hasil	73,48	111,39	4,88	13,99	6,64%	12,56%
Transfer Bantuan Keuangan	3.871,56	3.723,67	429,65	670,13	11,10%	18,00%
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>37.905,18</b>	<b>35.661,75</b>	<b>2.657,99</b>	<b>3.765,68</b>	<b>7,01%</b>	<b>10,56%</b>

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

belanja modal secara persentase adalah sebesar 1,76% terhadap pagu hingga triwulan I 2025 maupun triwulan I 2024. Sementara itu, realisasi belanja modal secara nominal hingga triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp146 miliar, menurun dibandingkan triwulan yang

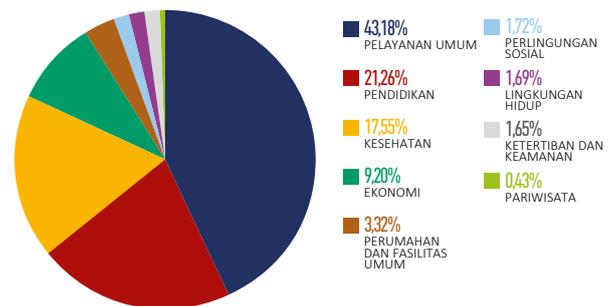
sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp192 miliar. Dari 13 Kabupaten/Kota, capaian persentase realisasi belanja tertinggi adalah Kab. Tanah Laut yaitu sebesar 17,02% dari pagu, sementara persentase realisasi terendah di Kabupaten Kotabaru sebesar 5,89% dari pagu (Tabel 2.9).

**Tabel 2.9** Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

No	Kota/Kab	Pagu 2025	Realisasi s.d. Tw I 2025	% Realisasi s.d. Tw I 2025
1	Kab. Banjar	2.957,21	459,26	15,53%
2	Kab. Tanah Laut	2.687,26	457,30	17,02%
3	Kab. Tapin	2.407,27	187,93	7,81%
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.912,06	274,49	14,36%
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.343,37	252,78	10,79%
6	Kab. Barito Kuala	1.765,06	205,91	11,67%
7	Kab. Tabalong	3.080,47	259,55	8,43%
8	Kab. Kotabaru	5.318,29	313,20	5,89%
9	Kab. Hulu Sungai Utara	1.799,14	234,79	13,05%
10	Kab. Tanah Bumbu	3.543,38	349,56	9,87%
11	Kab. Balangan	3.839,71	305,26	7,95%
12	Kota Banjarmasin	2.399,89	298,31	12,43%
13	Kota Banjarbaru	1.608,64	167,36	10,40%

Sumber : KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan fungsi, realisasi APBD mayoritas disalurkan untuk mendukung fungsi belanja pelayanan umum sebesar 43,18%, belanja pendidikan sebesar 21,26%, dan belanja kesehatan sebesar 17,55% (Grafik 2.3).



**Grafik 2.3** Realisasi Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) se-Kalimantan Selatan Menurut Fungsi



### BAB III

## Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan IV 2024 sebesar 1,95% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,03% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,84% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan I 2025 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,76% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi ketidakpastian global.

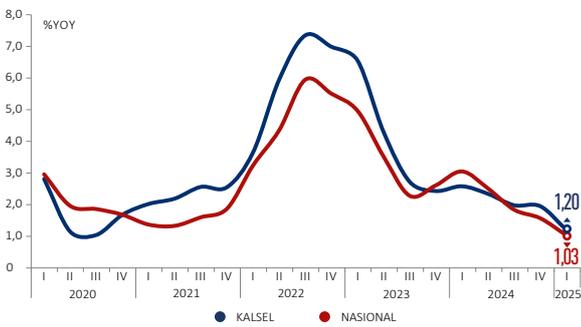


Pada April 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,20% (yoy). Tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II

2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan komoditas sewa rumah menjelang tahun ajaran baru serta kenaikan harga komoditas emas perhiasan seiring tren harga emas global yang masih tinggi di tengah ketidakpastian global.

### 3.1 PERKEMBANGAN INFLASI

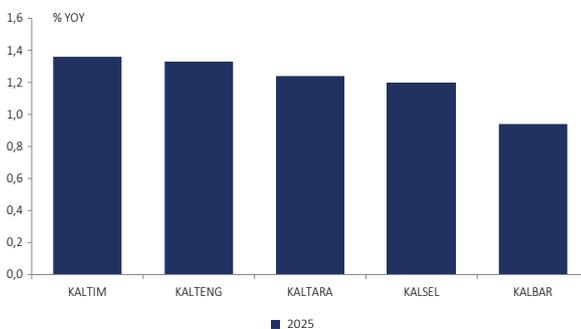
Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar **1,20% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan dengan **capaian triwulan IV 2024 sebesar 1,95% (yoy)**. Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar **1,03% (yoy)** (Grafik 3.1), dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar **3,84% (yoy)**.



Sumber: BPS (diolah)

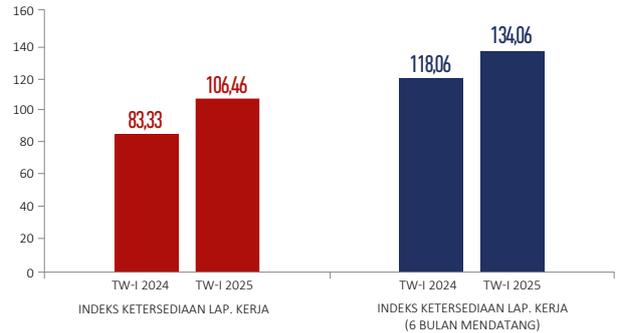
**Grafik 3.1** Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu yang terendah di wilayah Kalimantan, diatas Kalimantan Barat dan lebih rendah dibandingkan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah (Grafik 3.2). Sementara itu, secara spasial, Kab. Tanah Laut mencatatkan inflasi tertinggi yaitu sebesar **2,52% (yoy)**, diikuti oleh



Sumber: Berita Resmi Statistik Inflasi, BPS

**Grafik 3.2** Perbandingan Gabungan Kota Inflasi untuk Provinsi se-Kalimantan pada Triwulan I 2025



Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 3.3** Perkembangan Inflasi Kota Banjarmasin, Tanjung, Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Tanah Laut

Kota Tanjung sebesar **2,28% (yoy)**, Kotabaru sebesar **1,16% (yoy)**, Kota Banjarmasin sebesar **0,76% (yoy)** dan Kab. Hulu Sungai sebesar **0,74% (yoy)** (Grafik 3.3).

**Inflasi pada triwulan I 2025 utamanya bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 0,90% (yoy) dan 0,46% (yoy).** Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah kondisi ketidakpastian global. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat mengalami inflasi sejalan dengan tingginya inflasi harga komoditas ikan gabus, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin. Meningkatnya tekanan inflasi komoditas ikan gabus disebabkan oleh gangguan produksi akibat curah hujan tinggi. Lebih lanjut, kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025 mendorong peningkatan harga jual tembakau, salah satunya komoditas sigaret kretek mesin.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada tarif listrik dan beberapa komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau, antara lain beras, telur ayam ras, dan tomat. (Tabel 3.3).

**Tabel 3.1** Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025

No	Kelompok	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
1	Makanan, minuman dan tembakau	1,50	0,46
2	Pakaian dan alas kaki	2,29	0,12
3	Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	-7,17	-1,05
4	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,78	0,03
5	Kesehatan	2,30	0,08
6	Transportasi	2,60	0,28
7	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0,02	0,00
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	-0,07	0,00
9	Pendidikan	1,65	0,06
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	2,56	0,32
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	12,79	0,90

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 3.2** Komoditas Utama Penyumbang Inflasi (yoy) pada Triwulan I 2025

No	Komoditi	Kelompok
1	EMAS PERHIASAN	perawatan pribadi dan jasa lainnya
2	IKAN GABUS	makanan, minuman dan tembakau
3	TARIF PARKIR	transportasi
4	CABAI RAWIT	makanan, minuman dan tembakau
5	SIGARET KRETEK MESIN	makanan, minuman dan tembakau
6	TERONG	makanan, minuman dan tembakau
7	BAWANG MERAH	makanan, minuman dan tembakau
8	MINYAK GORENG	makanan, minuman dan tembakau
9	UDANG BASAH	makanan, minuman dan tembakau
10	KOPI BUBUK	makanan, minuman dan tembakau

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 3.3** Komoditas Utama Penyumbang Deflasi (yoy) pada Triwulan I 2025

No	Komoditi	Kelompok
1	TARIF LISTRIK	perumahan, air, listrik, dan bbrt
2	BERAS	makanan, minuman dan tembakau
3	TELUR AYAM RAS	makanan, minuman dan tembakau
4	TOMAT	makanan, minuman dan tembakau
5	DAGING AYAM RAS	makanan, minuman dan tembakau
6	IKAN NILA	makanan, minuman dan tembakau
7	PEPAYA	makanan, minuman dan tembakau
8	CABAI MERAH	makanan, minuman dan tembakau
9	AIR KEMASAN	makanan, minuman dan tembakau
10	BUNCIS	makanan, minuman dan tembakau

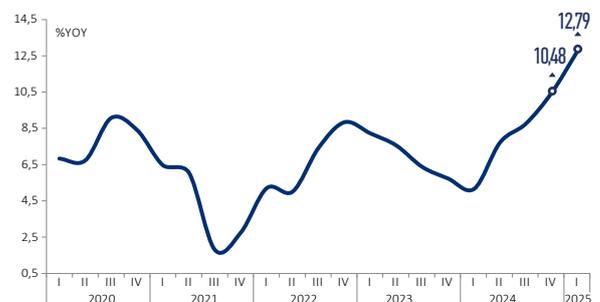
Sumber: BPS, diolah

## 3.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITAS PENGELUARAN

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan I 2025 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (andil 0,90%, yoy); kelompok makanan, minuman dan tembakau (andil 0,46%, yoy); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (andil 0,32%, yoy); kelompok transportasi (andil 0,28%, yoy); kelompok pakaian dan alas kaki (andil 0,12%, yoy), kelompok kesehatan (andil 0,08%, yoy); kelompok pendidikan (andil 0,06%, yoy); dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (andil 0,03%, yoy). Di sisi lain, kelompok Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan signifikan dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (andil 0,00%, yoy). Sedangkan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat deflasi dengan andil sebesar -1,05% (yoy).

### 3.2.1 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan I 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 12,79% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 10,48% (yoy) (Grafik 3.4). Subkelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi, masing-masing sebesar 29,26% (yoy) dan 1,26% (yoy), sedangkan subkelompok perlindungan sosial tidak



Sumber: BPS (diolah)

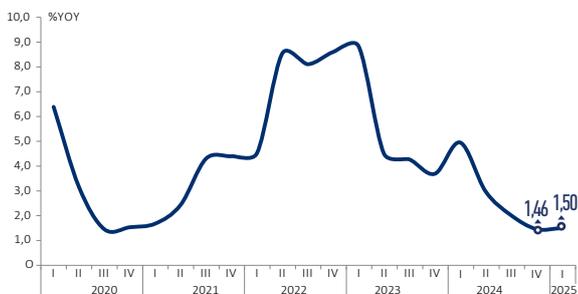
**Grafik 3.4**

Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

mengalami perubahan dibandingkan triwulan IV 2024. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,76% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi oleh sentimen negatif atas ketidakpastian global.

### 3.2.2 Kelompok Makanan, Minuman Dan Tembakau

Pada triwulan I 2025, kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 1,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,46% (yoy) (Grafik 3.5). Kenaikan inflasi utamanya berasal dari subkelompok yang mengalami inflasi terbesar, yaitu subkelompok rokok dan tembakau sebesar 4,84% (yoy) dan terendah yaitu subkelompok makanan sebesar 0,97% (yoy). Kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025 mendorong kenaikan harga rokok khususnya sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan, sehingga subkelompok rokok dan tembakau mencatat nilai inflasi tertinggi. Pada subkelompok makanan, curah hujan tinggi yang dicatat oleh BMKG sepanjang triwulan laporan di wilayah Kalimantan Selatan juga berdampak pada gangguan pasokan pangan, terutama pada komoditas seperti ikan gabus, cabai rawit, dan bawang merah. Disisi lain, beberapa komoditas mengalami deflasi seperti beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Beberapa komoditas yang mengalami deflasi tersebut ditopang oleh masifnya



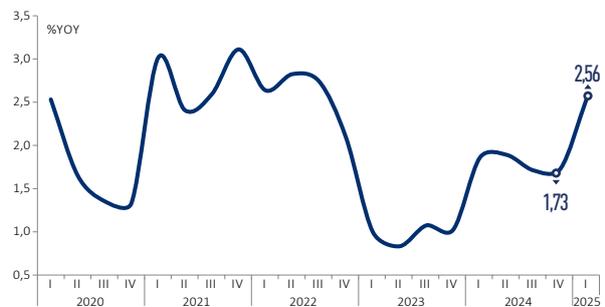
Sumber : BPS (diolah)

**Grafik 3.5** Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

upaya perbaikan produksi seperti program Optimalisasi Lahan (OPLAH) untuk komoditas padi. Adapun komoditas daging dan telur ayam ras mengalami deflasi seiring dengan kelebihan pasokan *livebird* di tengah harga pakan jagung yang menurun.

### 3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran

Pada triwulan I 2025, inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tercatat sebesar 2,56% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,73% (yoy) (Grafik 3.6). Komoditas penyumbang andil inflasi pada kelompok ini di antaranya adalah nasi dengan lauk, kue kering berminyak, bubur, sop, ayam goreng dan soto. Adapun meningkatnya tekanan inflasi komoditas tersebut terutama sejalan dengan meningkatnya harga komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau, seperti minyak goreng dan aneka ikan. Lebih lanjut, tingginya permintaan masyarakat pada momen Ramadan 1446H turut menyumbang inflasi pada kelompok ini.

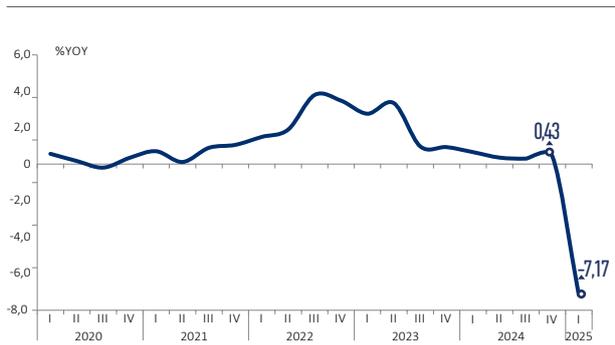


Sumber : BPS (diolah)

**Grafik 3.6** Perkembangan Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

### 3.2.4 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Pada triwulan I 2025, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat deflasi sebesar 7,17% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Deflasi utamanya disumbangkan oleh subkelompok



Sumber : BPS (diolah)

**Grafik 3.7** Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 0,22 persen dan subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 26,46 persen. Komoditas penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik seiring dengan masih berlanjutnya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pengguna di bawah 2200 VA khususnya pada pelanggan Prabayar.

### 3.3 PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN II 2025

Pada April 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,20% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,95% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historis inflasi bulan April selama 3 tahun terakhir yang sebesar 4,50% (yoy).

Inflasi terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 14,16% (yoy). Subkelompok yang mengalami inflasi tahunan tertinggi, yaitu subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 32,02 persen dan terendah yaitu subkelompok jasa lainnya sebesar 1,81 persen. Sedangkan subkelompok perlindungan sosial tidak

mengalami perubahan. Adapun komoditas utama penyebab inflasi adalah emas perhiasan. Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman juga mengalami inflasi sebesar 2,20% (yoy) yang disumbangkan oleh komoditas kue basah dan nasi dengan lauk. Kemudian, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 3,25% (yoy) utamanya disebabkan oleh komoditas baju muslim wanita.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi dan makanan, minuman, dan tembakau yang masing-masing mengalami deflasi sebesar -0,62% (yoy) dan -0,08% (yoy). Deflasi disumbangkan oleh komoditas angkutan udara dan bensin serta beras, daging ayam ras, dan bawang merah.

**Tabel 3.4** Komoditas Utama Pendorong Inflasi bulan April 2025 secara tahunan (%yoy)

No	Komoditi	Kelompok
1	EMAS PERHIASAN	perawatan pribadi dan jasa lainnya
2	IKAN GABUS	makanan, minuman dan tembakau
3	MINYAK GORENG	makanan, minuman dan tembakau
4	CABAI RAWIT	makanan, minuman dan tembakau
5	SIGARET KRETEK MESIN	makanan, minuman dan tembakau
6	KOPI BUBUK	makanan, minuman dan tembakau
7	BAJU MUSLIM WANITA	perawatan pribadi dan jasa lainnya
8	NASI DENGAN LAUK	penyediaan makanan dan minuman/ restoran
9	TERONG	makanan, minuman dan tembakau
10	KUE BASAH	makanan, minuman dan tembakau

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 3.5** Komoditas Utama Penahan Inflasi bulan April 2025 secara tahunan (%yoy)

No	Komoditi	Kelompok
1	BERAS	makanan, minuman dan tembakau
2	DAGING AYAM RAS	makanan, minuman dan tembakau
3	ANGKUTAN UDARA	transportasi
4	TOMAT	makanan, minuman dan tembakau
5	BAWANG MERAH	makanan, minuman dan tembakau
6	IKAN NILA	makanan, minuman dan tembakau
7	TELUR AYAM RAS	perawatan pribadi dan jasa lainnya
8	SEMANGKA	perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga
9	IKAN PEDAS	makanan, minuman dan tembakau
10	BENSIN	makanan, minuman dan tembakau

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 3.6** Inflasi Kalimantan Selatan April 2025 Menurut Kelompok (yoy)

No	Kelompok	Inflasi (%yoy)	Andil (%yoy)
1	Makanan, minuman dan tembakau	-0,08	-0,02
2	Pakaian dan alas kaki	3,25	0,16
3	Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,49	0,07
4	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,71	0,03
5	Kesehatan	2,17	0,08
6	Transportasi	-0,62	-0,07
7	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,35	-0,02
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	-0,01	0,00
9	Pendidikan	1,65	0,06
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	2,20	0,27
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	14,16	1,01

Sumber: BPS, diolah

Pada April 2025, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi tertinggi sebesar **14,16% (yoy)** dengan andil sebesar **1,01%**. Inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 12,79% (yoy) dengan andil sebesar 0,90%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok perawatan pribadi sebesar 32,02% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas dunia sejalan dengan meningkatnya permintaan di tengah ketidakpastian global.

Kemudian, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tercatat mengalami kenaikan tekanan inflasi sebesar **2,20% (yoy)** dengan andil **Inflasi sebesar 0,27% (yoy)**. Komoditas nasi dengan lauk menjadi pendorong utama kenaikan tekanan inflasi kelompok ini sebesar 0,08% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan selama HBKN Idulfitri 1446H, hal ini diikuti juga oleh komoditas bubur yang mengalami inflasi sebesar 0,03% (yoy), serta sop, bakso siap santap, ayam goreng, gado-gado dan soto dengan Inflasi sebesar 0,02% (yoy).

Selanjutnya, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami penyumbang inflasi tahunan sebesar **3,25% (yoy)** dengan andil inflasi sebesar **0,16% (yoy)**. Inflasi kelompok ini didorong oleh komoditas

baju muslim wanita seiring adanya peningkatan permintaan masyarakat selama HBKN Idulfitri 1446H.

Di sisi lain, kelompok transportasi menjadi penyumbang andil deflasi terdalam sebesar **0,07% (yoy)** dengan deflasi tahunan sebesar **0,62% (yoy)**. Deflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas angkutan udara sejalan dengan kebijakan diskon tarif pesawat oleh pemerintah sepanjang periode HBKN Idulfitri 1446H. Lebih lanjut, komoditas bensin juga mengalami deflasi seiring penurunan harga bensin nonsubsidi (pertamax) yang berlaku pada 1 April 2025 sejalan dengan penurunan harga minyak global.

Dengan perkembangan pada bulan April 2025, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan komoditas sewa rumah menjelang tahun ajaran baru. Kemudian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan mengalami inflasi sejalan dengan kenaikan harga komoditas emas perhiasan seiring tren harga emas global yang masih tinggi di tengah ketidakpastian global. Kendati demikian, adanya kebijakan pemerintah memberikan diskon tarif pesawat pada periode libur sekolah diperkirakan menahan inflasi kelompok transportasi ke depan. Lebih lanjut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan menurun sejalan dengan periode panen beras serta perbaikan produksi pada komoditas hortikultura dan aneka sayuran seiring mulai masuknya musim kemarau.

### 3.4 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai *stakeholders* strategis di daerah.

Koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) atau *High Level Meeting* (HLM), dukungan penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah. Lebih lanjut, Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan keberlanjutan upaya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi tetap terjaga dalam kisaran  $2,5 \pm 1\%$ .

Beberapa rangkuman kegiatan TPID di Provinsi Kalimantan Selatan selama triwulan I 2025 sebagai berikut:

### **Keterjangkauan Harga**

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan telah diselenggarakan untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti beras minyak goreng, tepung terigu, bawang, dan telur ayam ras. Pada triwulan I 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar sebanyak 129 kali yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

### **Ketersediaan Pasokan**

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya mulai adanya panen padi dari hasil program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) seluas 41ribu Ha yang tersebar di 8 Kab/Kota di Kalimantan Selatan. Selain itu BULOG Kalimantan Selatan gencar dalam melaksanakan penyerapan gabah dan beras dari petani langsung dengan realisasi 110% dari target.

### **Komunikasi Efektif**

Dalam pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, perlu adanya sinergi dan koordinasi dalam merumuskan serta pelaksanaan upaya pengendalian inflasi pangan. Adapun kegiatan terkait perwujudan komunikasi efektif yang telah dilaksanakan, di antaranya:

- Pada tanggal 11-12 Februari 2025 telah dilaksanakan *Capacity Building* Penyusunan *Self Assessment* Kinerja TPID dan *One Page Summary* Program Unggulan TPID Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas TPID
- Pelaksanaan kegiatan *capacity building* TPID Prov. Kalimantan Selatan dalam rangka penyusunan kebijakan pengendalian Inflasi ke depan yang akan dituangkan dalam *roadmap* TPID 2025-2027.
- Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID dan TP2DD Prov. Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Maret 2025 dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan” dalam rangka pengendalian inflasi selama Ramadhan dan HBKN Idulfitri 1446 H.

### **Kelancaran Distribusi**

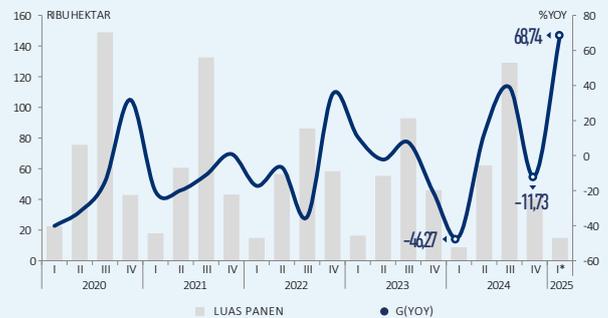
Dalam mendukung kelancaran distribusi, telah dilaksanakan *launching* kajian BUMD pangan dalam acara HLM TPID Provinsi Kalimantan Selatan. Ke depan, diharapkan BUMD pangan memiliki peran strategis sebagai *offtaker* untuk meningkatkan kelancaran distribusi dari hulu ke hilir. Selain itu, dilakukan melalui pemberian subsidi ongkos angkut serta upaya pendahuluan/prioritisasi angkutan pangan dengan bekerja sama dengan Dishub.

## MENJAGA MOMENTUM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DALAM PENGENDALIAN INFLASI



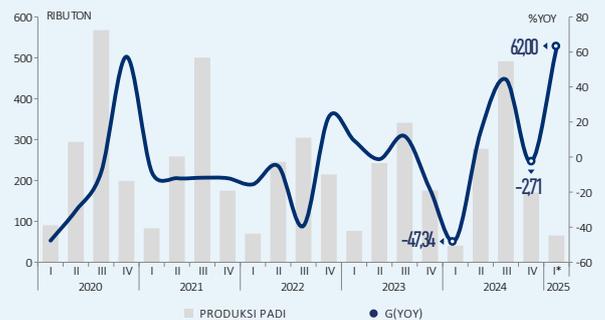


Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi lumbung pangan di wilayah Kalimantan memiliki peran penting dalam mendukung kecukupan pangan, khususnya komoditas beras. Pada triwulan I 2025, Kalimantan Selatan kembali mulai mengalami puncak panen pada bulan akhir triwulan. Sepanjang triwulan I 2025 luas panen padi sebesar 14,68 ribu Ha atau tumbuh 68,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -11,73% (yoy). Dari sisi produksi padi, Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 berhasil produksi padi sebesar 65,11 ribu Ha atau tumbuh 62,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -2,71% (yoy).



Sumber: BPS Kalsel (diolah)

Grafik B2.1 Luas Panen Padi Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Kalsel (diolah)

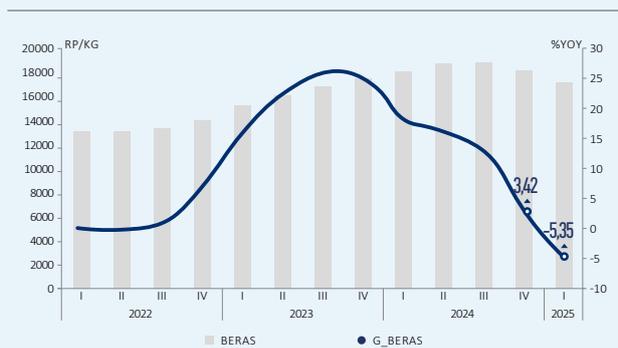
Grafik B2.2 Produksi Padi Kalimantan Selatan

Salah satu faktor utama di balik peningkatan produksi adalah keberhasilan pelaksanaan program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) yang telah berlangsung dari tahun 2024 dan mulai panen pada akhir triwulan I 2025. Program ini memanfaatkan potensi lahan rawa yang selama ini belum digarap secara optimal. Adapun program OPLAH di Kalimantan Selatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu ditanam pada luas sawah sebesar 41,82 ribu Ha di beberapa Kab/Kota di Kalimantan Selatan. Implementasi OPLAH mencakup berbagai kegiatan seperti rehabilitasi saluran air, perbaikan tata kelola air, penyediaan benih unggul, dan pelatihan petani. Dampak langsung dari program ini adalah peningkatan produktivitas lahan serta keberlanjutan sistem pertanian rawa yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga dan ketersediaan cadangan beras pemerintah, BULOG Kalimantan Selatan telah aktif menyerap hasil panen petani. Hingga akhir Maret 2025, BULOG telah menyerap sebanyak 11,2 ribu ton setara beras atau setara dengan 87,6% dari target pengadaan. Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala menjadi dua daerah dengan kontribusi serapan tertinggi. Keberhasilan ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara BULOG, pemerintah daerah, dan petani dalam menjaga rantai pasok dan penyerapan hasil produksi di tingkat petani. Serapan tinggi ini juga memberikan jaminan pasar bagi petani sehingga meningkatkan motivasi dan pendapatan petani secara langsung.

Panen raya yang terjadi membawa dampak positif terhadap stabilitas harga beras di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data PIHPS, pada triwulan I 2025 harga beras mengalami penurunan sebesar -5,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,42% (yoy). Penurunan menjadi faktor penahan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Penurunan harga ini merupakan indikator dari keseimbangan antara suplai dan permintaan. Dengan meningkatnya pasokan beras di pasar, harga cenderung stabil bahkan menurun, yang kemudian membantu pengendalian inflasi secara umum. Namun demikian,



Sumber: PIHPS

Grafik B2.3

### Harga Beras Kalimantan Selatan

terdapat beberapa tantangan ke depan berupa penyesuaian target program swasembada pangan di Kalimantan Selatan akibat efisiensi anggaran. Program OPLAH ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 17,45 ribu Ha, sedangkan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) ditargetkan adanya penambahan sawah sebesar 30 ribu Ha dari sebelumnya 150 ribu Ha. Hal ini dapat menjadi potensi risiko ke depan khususnya bagi inflasi beras.

Untuk menjaga momentum peningkatan produksi padi di Kalimantan Selatan, diperlukan berbagai langkah strategis yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Beberapa upaya mitigasi yang dapat diterapkan antara lain:

- Menjaga keberlanjutan program OPLAH serta percepatan realisasi program CSR lewat sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait.
- Penguatan peran brigade pangan di daerah sebagai agen penyuluhan dan pendampingan petani dalam penerapan praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*).
- Mendorong penggunaan varietas bibit unggul yang memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit, sehingga mengurangi risiko gagal panen.
- Penerapan teknologi budidaya padi apung khususnya pada lahan rawa sebagai bentuk inovasi adaptasi terhadap perubahan iklim dan keterbatasan lahan produktif.
- Memastikan penyerapan hasil panen petani oleh lembaga penyangga seperti BULOG agar harga tetap stabil di tingkat petani dan konsumen, serta menjaga keseimbangan pasokan di pasar.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## BAB IV

# Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Kredit perbankan tetap tumbuh positif sebesar 12,17% (yoy) dengan *outstanding* Rp103,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tumbuh 9,47% (yoy) dengan *outstanding* Rp100,99 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tecermin dari NPL yang terjaga pada level 2,58%.

Kredit konsumsi pada triwulan I 2025 dengan *outstanding* sebesar Rp34,21 triliun, tumbuh 14,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 13,02% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp33,69 triliun, sejalan dengan peningkatan kinerja LU perdagangan dan indeks penghasilan konsumen pada triwulan I 2025. Berdasarkan distribusinya, kredit multiguna (42,00%), kredit kepemilikan rumah/KPR (37,83%) dan kredit kendaraan bermotor/KKB (8,28%) memiliki pangsa terbesar terhadap seluruh penyaluran kredit di Kalimantan Selatan.

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 19,70% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp51,72 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh



24,12% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp 50,65 triliun. Perlambatan pertumbuhan pada kredit korporasi terutama bersumber dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan (dengan proporsi terbesar mencapai 55,01% dari kredit korporasi) yang tumbuh 45,91% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp28,45 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 71,15% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp27,82 triliun, sejalan dengan kinerja LU Pertambangan yang berkontraksi pada triwulan I 2025 akibat melambatnya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama.

Pada triwulan I 2025, kredit UMKM di Kalimantan Selatan berkontraksi 0,12% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp23,66 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,18% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp23,88 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 22,81%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 23,65%.

## 4.1 PEMBIAYAAN DAERAH

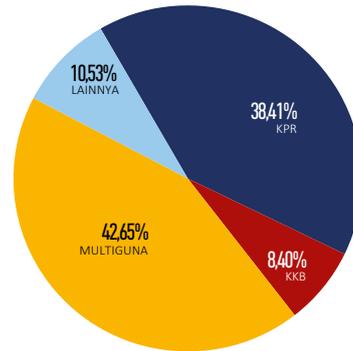
**Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan.**

Kredit perbankan tetap tumbuh positif sebesar 12,17% (yoy) dengan *outstanding* Rp103,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tumbuh 9,47% (yoy) dengan *outstanding* Rp100,99 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tecermin dari NPL yang tetap terjaga pada level 2,19% (triwulan I 2025). Pertumbuhan kinerja penyaluran kredit terutama bersumber dari pertumbuhan kredit di LU utama yang tumbuh tinggi, terutama pada LU Pertambangan. Berdasarkan penggunaan, peningkatan penyaluran kredit terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit kredit investasi dan kredit konsumsi yang memiliki proporsi terbesar dalam struktur kredit. Sementara itu, kredit modal kerja pada triwulan I 2025 tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2025 berkontraksi 0,12% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,18% (yoy), terutama bersumber dari pertumbuhan kredit skala menengah yang berkontraksi cukup dalam sebesar 8,50% (yoy).

### 4.1.1 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

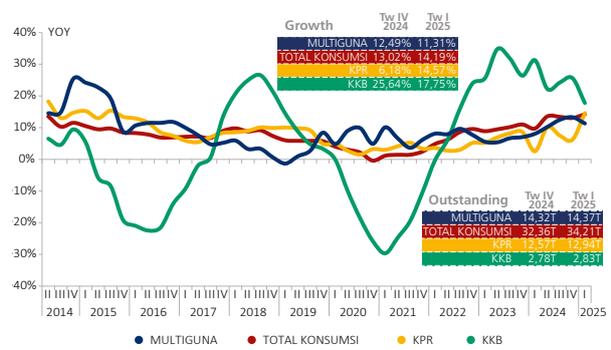
**Kredit konsumsi pada triwulan I 2025 dengan *outstanding* sebesar Rp34,22 triliun, tumbuh 14,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 13,02% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp33,69 triliun.** Berdasarkan komponen penyusunnya, peningkatan kredit konsumsi bersumber dari peningkatan pertumbuhan kredit kepemilikan rumah atau KPR yang memiliki pangsa kedua terbesar terhadap seluruh penyaluran kredit konsumsi di Kalimantan Selatan (Grafik 4.1).

Pada triwulan I 2025, penyaluran KPR tercatat tumbuh 14,57% (yoy) dengan *outstanding* Rp12,94 triliun,



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.1** Distribusi Kredit Konsumsi Periode Triwulan I 2025

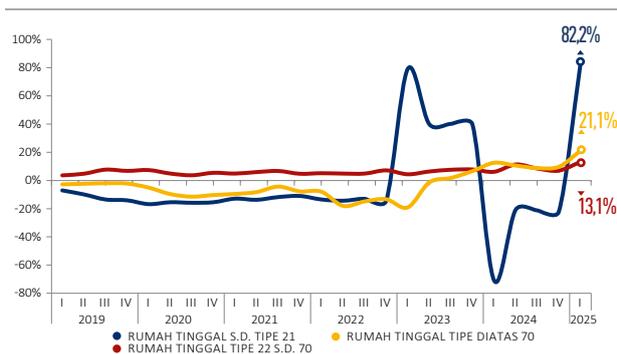


Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.2** Pertumbuhan Kredit Konsumsi Berdasarkan Jenisnya Periode Triwulan I 2025

lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh 6,18% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp12,57 triliun (Grafik 4.2).

Peningkatan pertumbuhan KPR didorong oleh peningkatan penyaluran kredit untuk seluruh tipe rumah tinggal. Kredit untuk rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang memiliki pangsa terbesar dalam penyaluran KPR tumbuh 13,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,02% (yoy). Di samping itu, tipe rumah tinggal di atas 70 yang memiliki proporsi terbesar kedua dalam penyaluran KPR tumbuh 21,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,73% (yoy). Selain itu, kepemilikan rumah tinggal s.d. tipe 21 tumbuh tinggi 82,24% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 22,14% (yoy) (Grafik 4.3).

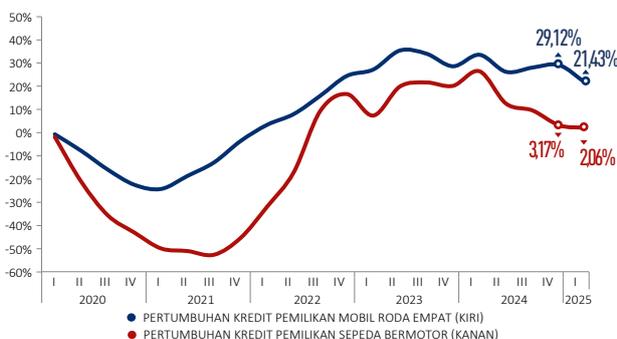


Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.3** Pertumbuhan Kredit Konsumsi – KPR s.d. Tipe 21, Tipe 22 s.d. 70, dan Tipe Di atas 70 Periode Triwulan I 2025

Sementara itu, sebagai kredit dengan pangsa terbesar pertama terhadap penyaluran kredit konsumsi di Kalimantan Selatan, penyaluran kredit multiguna tetap tumbuh positif 11,31% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp14,38 triliun, meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,29% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp14,32 triliun.

Sementara itu, penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,75% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp2,83 triliun (Grafik 4.2), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan *outstanding* senilai Rp2,78 triliun atau tumbuh sebesar 25,64% (yoy). Perlambatan tersebut bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit kepemilikan mobil roda empat yang memiliki proporsi terbesar terhadap penyaluran KKB yang tumbuh 21,43% dengan *outstanding* Rp2,56 triliun, sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 29,12% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp2,49 triliun (Grafik 4.4).



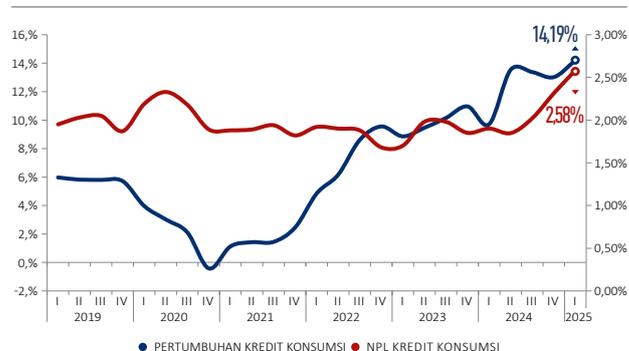
Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.4** Pertumbuhan Kredit Konsumsi – Pemilihan Mobil Roda Empat dan Sepeda Bermotor Periode Triwulan I 2025

Stabilitas penjualan penyaluran KKB didorong oleh terjaganya ekspektasi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional serta relaksasi suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) yang turun sebesar 25 bps ke level 5,75% pada Januari 2025.

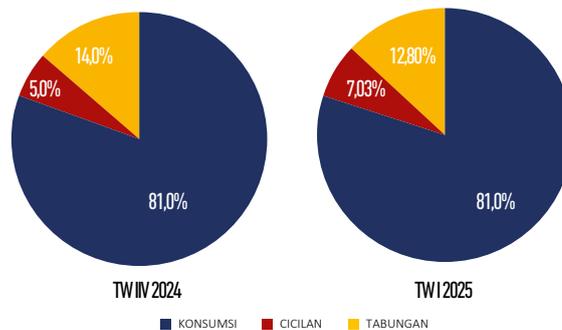
Pada triwulan I 2025, kualitas kredit konsumsi tetap terjaga dengan NPL sebesar 2,58% atau terjaga di bawah ambang batas (*threshold*) 5% (Grafik 4.5).

Berdasarkan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada triwulan I 2025, penggunaan penghasilan untuk konsumsi tercatat sebesar 80,20%; sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 81,00%. Penggunaan penghasilan untuk tabungan juga mengalami penurunan dari 14,00% menjadi 12,80%. Sementara itu, penggunaan penghasilan untuk cicilan meningkat dari 5,00% menjadi 7,03% (Grafik 4.6).



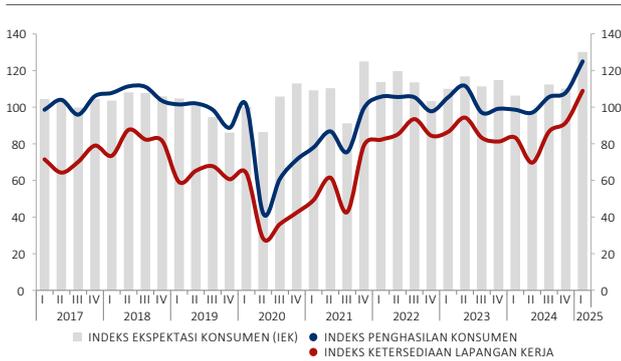
Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.5** Pertumbuhan dan NPL Kredit Konsumsi Periode Triwulan I 2025



Sumber : Survei Konsumen (diolah)

**Grafik 4.6** Presentase Penggunaan Penghasilan RT Periode Triwulan I 2025



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (Diolah)

**Grafik 4.7** Indeks Penghasilan Konsumen & Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini Periode Triwulan I 2025

Pertumbuhan penyaluran kredit yang tetap positif dan konsumsi masyarakat yang tinggi sejalan dengan peningkatan indeks penghasilan konsumen pada triwulan I 2025 yang berada di atas zona optimis. Indeks penghasilan konsumen pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 125,03, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 108,06 (Grafik 4.7).

Indeks Penghasilan Konsumen meningkat tinggi seiring dengan jumlah rumah tangga dengan penghasilan “sedikit meningkat” dan “meningkat cukup banyak” lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Rumah tangga dengan tingkat penghasilan “meningkat cukup banyak” naik dari 0,8% pada triwulan IV 2024 menjadi 2,9% pada triwulan I 2025. Di sisi lain, rumah tangga yang menyatakan pendapatan “sedikit meningkat” tumbuh secara signifikan dari 22,5% pada triwulan IV 2024 menjadi 39,2% pada triwulan I 2025 (Tabel 4.1).

Selain itu, optimisme konsumen juga tercermin dari indeks ekspektasi konsumen terhadap penghasilan

**Tabel 4.1** Perubahan Tingkat Pendapatan RT Triwulan I 2025

Kondisi Penghasilan RT	TW I'24	TW II'24	TW III'24	TW IV'24	TW I'25
Meningkat cukup banyak	0,4%	0,0%	0,4%	0,8%	2,9%
Sedikit meningkat	21,7%	19,6%	19,6%	22,5%	39,2%
Sama	55,4%	55,8%	57,1%	62,5%	47,5%
Sedikit menurun	17,1%	20,4%	20,8%	13,3%	10,0%
Menurun cukup banyak	5,4%	4,2%	4,2%	0,8%	0,4%

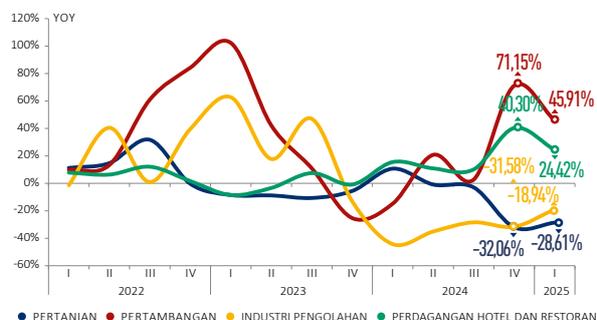
Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia (Diolah)

ke depan yang tetap terjaga pada area optimis yaitu sebesar 151,00, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 137,78.

### 4.1.2 Pembiayaan Korporasi

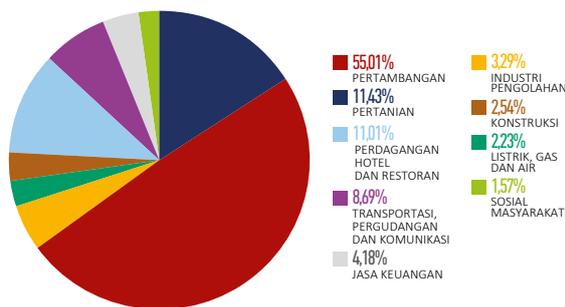
Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 19,70% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp51,72 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh sebesar 24,12% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp50,65 triliun. Perlambatan kredit korporasi bersumber dari perlambatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan yang tumbuh 45,91% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 71,15% (yoy) dan LU Perdagangan yang tumbuh 24,42% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 40,30% (yoy) (Grafik 4.8), sejalan dengan kinerja LU Pertambangan yang berkontraksi pada triwulan I 2025 akibat melambatnya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama.

Berdasarkan pangsa, kredit korporasi yang diberikan berdasarkan lokasi proyek, mayoritas disalurkan pada LU Utama (Grafik 4.9), yaitu LU Pertambangan (dengan pangsa 55,01%), LU Pertanian (dengan pangsa 11,43%), LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (dengan pangsa 12,33%), dan LU Transportasi dan Pergudangan (dengan pangsa 8,69%).



Sumber: LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.8** Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha Ekonomi Utama Periode Triwulan I 2025

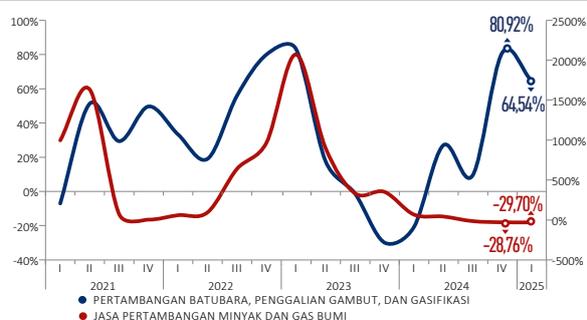


Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.9** Komposisi Kredit Korporasi Periode Triwulan I 2025

Perlambatan kredit di LU Pertambangan terutama didorong oleh perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit pada sub-Lapangan Usaha (Sub-LU) pertambangan batu bara, penggalian gambut, dan gasifikasi batu bara yang memiliki proporsi terbesar pada LU pertambangan (proporsi sebesar 90,5%) yang tumbuh 64,54% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp25,75 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 80,92% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp25,76 triliun (Grafik 4.10).

Penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2025 berkontraksi -18,94% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -31,58% (yoy) (Grafik 4.8). Kontraksi pada kredit LU Industri Pengolahan terutama bersumber dari pertumbuhan kredit pada sub-LU industri minyak goreng dari kelapa sawit mentah yang memiliki proporsi terbesar kedua pada LU Industri Pengolahan

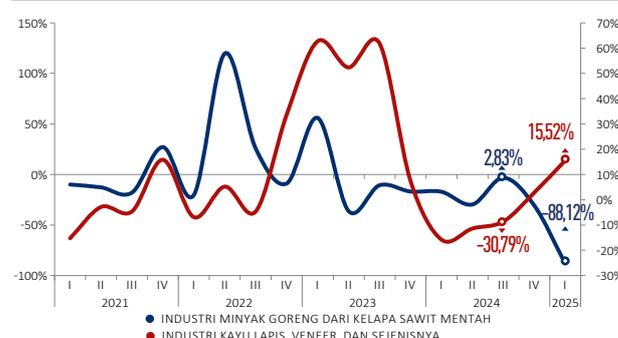


Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.10** Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Pertambangan dan Penggalian Periode Triwulan I 2025

(dengan proporsi sebesar 24,6%). Kredit sub LU tersebut tercatat berkontraksi sebesar 88,12% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp101,98 miliar, lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2024 yang berkontraksi 30,79% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp565,13 miliar (Grafik 4.11). Disisi lain, sub-LU industri kayu lapis, veneer, dan sejenisnya yang memiliki proporsi terbesar ketiga pada LU Industri Pengolahan (dengan proporsi sebesar 22,2%) tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 15,52% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp737,69 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,83% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp764,28 miliar (Grafik 4.11).

Penyaluran kredit pada LU Pertanian berkontraksi 28,61% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,91 triliun, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 32,06% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,19 triliun (Grafik 4.8). Peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit korporasi pada LU Pertanian yang lebih tinggi, tertahan oleh penyaluran kredit pada sub-LU perkebunan kelapa sawit (dengan pangsa sebesar 88,5% dari total kredit LU Pertanian) yang tercatat berkontraksi sebesar 41,23% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,24 triliun, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 25,19% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,84 triliun. Di sisi lain, sub-LU Perusahaan Hutan Alam yang memiliki proporsi terbesar kedua (proporsi sebesar 3.1%) pada triwulan I 2025 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.11** Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Industri Pengolahan Periode Triwulan I 2025



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.12** Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertanian Periode Triwulan I 2025

Selain itu, sub-LU Pengusahaan Hutan Alam tercatat terkonstraksi 20,10% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp182,54 miliar, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkonstraksi 12,77% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp201,28 miliar (Grafik 4.12).

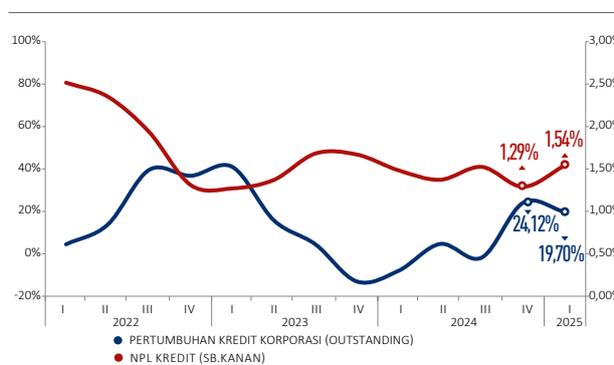
Sementara itu, penyaluran kredit pada LU Perdagangan terkonstraksi 24,42% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,69 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 40,30% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,97 triliun (Grafik 4.8). Perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit pada LU Perdagangan disebabkan oleh sub-LU perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis yang memiliki proporsi terbesar pada LU perdagangan (proporsi sebesar 48,4%) tercatat tumbuh sebesar 53,35% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp2,76 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 56,74% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp2,74 triliun. Di sisi lain, sub-LU perdagangan penjualan mobil terkonstraksi 67,23% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp163,3 miliar, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkonstraksi 16,03% atau dengan *outstanding* senilai Rp398,84 miliar. (Grafik 4.13).

Kualitas kredit korporasi tetap terjaga baik, meskipun mengalami sedikit peningkatan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) menjadi 1,54%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,29% (Grafik 4.14).



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.13** Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Perdagangan Periode Triwulan I 2025

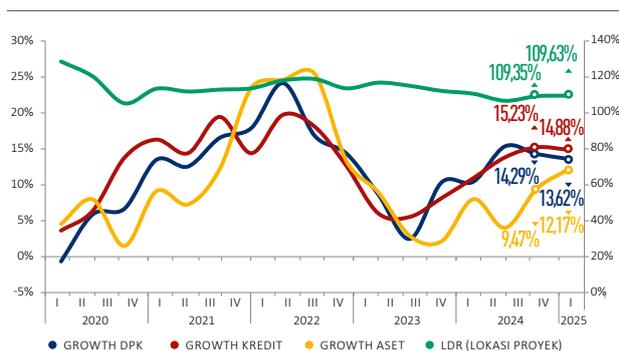


Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.14** NPL Kredit Korporasi Periode Triwulan I 2025

### 4.1.3 Total Aset dan Intermediasi Perbankan

Pada triwulan I 2025, total aset perbankan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 13,62% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai 119,48 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,29% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp116,43 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 14,88% (yoy) dengan nilai Rp94,60 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,23% (yoy) dengan nilai Rp92,36 triliun (Grafik 4.15). Di sisi lain, penyaluran kredit juga tercatat tumbuh 12,17% (yoy) dengan nilai Rp103,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,47% (yoy) atau senilai dengan Rp100,99 triliun (Grafik 4.15). Seiring dengan perkembangan tersebut, fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari perbandingan antara penyaluran kredit/pembiayaan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) atau

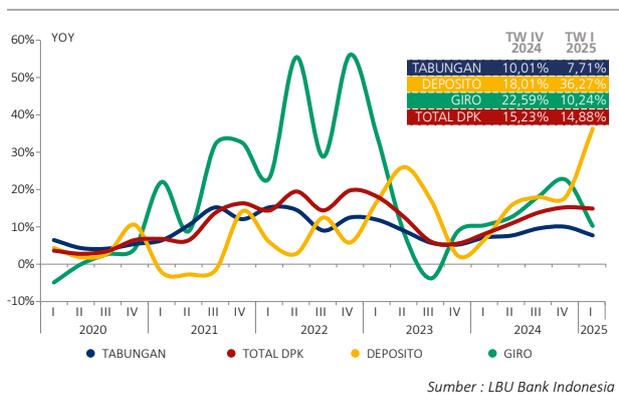


Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.15** Pertumbuhan Aset, DPK, Kredit dan LDR Periode Triwulan I 2025

disebut *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) mengalami sedikit peningkatan. LDR tercatat sebesar 109,63% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 109,35% (yoy).

Perlambatan DPK utamanya didorong oleh sejumlah perlambatan pertumbuhan Tabungan dan Giro yang memiliki pangsa terbesar dalam komponen penyusun DPK. Tabungan tumbuh 7,71% dengan *outstanding* Rp44,38 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,01% (yoy) dengan *outstanding* Rp44,61 triliun. Selanjutnya diikuti oleh giro yang tumbuh 10,24% (yoy) dengan *outstanding* Rp23,47 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,59% (yoy) dengan *outstanding* Rp27,13 triliun. Namun, perlambatan DPK yang lebih dalam ditopang oleh peningkatan deposito yang tercatat tumbuh 36,27% (yoy) dengan *outstanding* Rp26,76 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,01% (yoy) dengan *outstanding* Rp20,63 triliun (Grafik 4.16).



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.16** Pertumbuhan DPK Periode Triwulan I 2025

Perlambatan pertumbuhan tabungan utamanya bersumber dari tabungan pada sektor swasta (dengan pangsa 99,68%) yang tumbuh 7,71% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp44,23 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,01% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp44,45 triliun. Selanjutnya, perlambatan pertumbuhan giro utamanya bersumber dari giro pada sektor swasta (dengan pangsa 62,26%) yang tumbuh 15,64% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp14,61 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,87% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp17,13 triliun. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan deposito terutama bersumber dari deposito pada sektor pemerintah (dengan pangsa 59,68%) yang tumbuh 59,68% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp6,10 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -2,18% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp1,50 triliun.

Secara spasial, pangsa DPK terbesar berada di Kota Banjarmasin sebesar Rp38,04 triliun atau dengan proporsi 40,43%; diikuti Kabupaten Tanah Bumbu Rp17,89 triliun (proporsi 19,11%); Kota Banjarbaru Rp7,41 triliun (proporsi 7,88%); dan Kabupaten Banjar Rp5,53 triliun (proporsi 5,88%) (Tabel 4.2). Dari sisi kinerja, pertumbuhan DPK tertinggi pada triwulan I 2025 berada di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 54,51% (yoy); sementara pertumbuhan DPK terendah pada triwulan I 2025 berada di Kabupaten Tapin yang berkontraksi 3,11% (yoy).

Dari sisi pembiayaan, kredit perbankan pada triwulan I 2025 tumbuh 12,17% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp103,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,47% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp100,99 triliun (Grafik 4.17).

Pertumbuhan kredit bersumber dari meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi dan investasi. Kredit Investasi tumbuh 19,45% (yoy) dengan *outstanding* Rp34,68 triliun, meningkat dibandingkan triwulan

**Tabel 4.2** Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan I 2025 (Lokasi Proyek)

No	Kabupaten/Kota	DPK TW I 2024		Pertumbuhan	
		Rp. (miliar)	TW IV 2024 (yoy)	TW I 2025 (yoy)	Arah Pertumbuhan
1	Kab. Banjar	5.534,61	13,57%	16,08%	↑
2	Kab. Tanah Laut	3.327,43	2,68%	6,95%	↑
3	Kab. Tapin	3.797,31	7,25%	-3,11%	↓
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.773,77	-0,03%	-1,19%	↓
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.837,42	6,59%	1,52%	↓
6	Kab. Hulu Sungai Utara	2.400,05	9,93%	13,81%	↑
7	Kab. Barito Kuala	1.487,15	20,33%	13,83%	↓
8	Kab. Kota Baru	4.583,37	15,82%	17,24%	↑
9	Kab. Tabalong	4.273,24	10,18%	10,63%	↑
10	Kab. Tanah Bumbu	17.989,35	49,98%	54,51%	↑
11	Kab. Balangan	1.646,01	22,75%	32,81%	↑
12	Kota Banjarmasin	38.046,36	0,99%	6,58%	↑
13	Kota Banjarbaru	7.416,47	12,47%	9,61%	↑
<b>Prov. Kalimantan Selatan</b>		<b>94.112,54</b>	<b>11,70%</b>	<b>14,86%</b>	<b>↑</b>

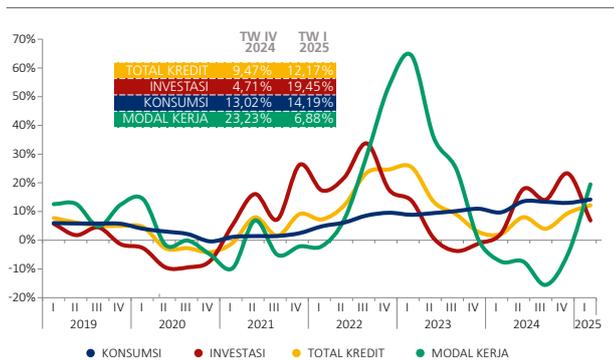
Sumber: LBU Bank Indonesia  
Angka dalam Rp Miliar

sebelumnya yang terkontraksi 4,71% (yoy) dengan *outstanding* Rp28,42 triliun. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 14,19% (yoy) dengan *outstanding* Rp34,22 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,02% (yoy) dengan *outstanding* Rp33,69 triliun. Perbaikan kredit konsumsi tersebut bersumber dari penyaluran kredit pada LU utama yang membaik, seperti LU Pertambangan. Di sisi lain, kredit modal kerja tumbuh sebesar 6,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp34,82 triliun, melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,23% (yoy) atau dengan *outstanding* Rp40,21 triliun.

Secara spasial, kredit terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan *outstanding* senilai Rp29,87 triliun atau dengan proporsi 28,81%; Kabupaten Banjar Rp16,00 triliun (proporsi 15,43%), Tanah Laut Rp10,99 triliun (proporsi 10,61%); Kabupaten Tanah Bumbu Rp10,98 triliun (proporsi 10,59%) (tabel 4.3). Lebih lanjut, pertumbuhan kredit konsumsi tertinggi pada triwulan I 2025 berada di Kabupaten Banjar sebesar 49,83% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp6,37 triliun dan terendah berada di Kabupaten Kota Baru yang terkontraksi 11,02% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp5,68 triliun.

Pada triwulan I 2025, risiko kredit masih tetap terjaga baik, meskipun sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercermin dari NPL 2,19%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,99% (Grafik 4.18).



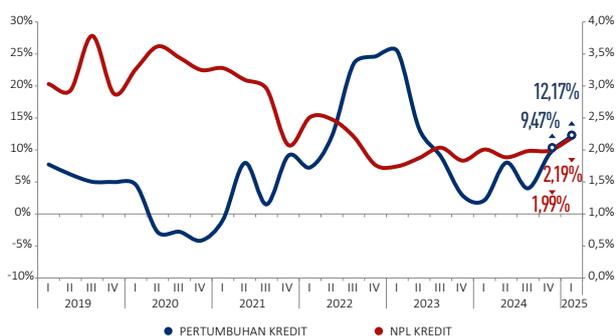
Sumber: LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.17** Pertumbuhan Kredit Periode Triwulan I 2025

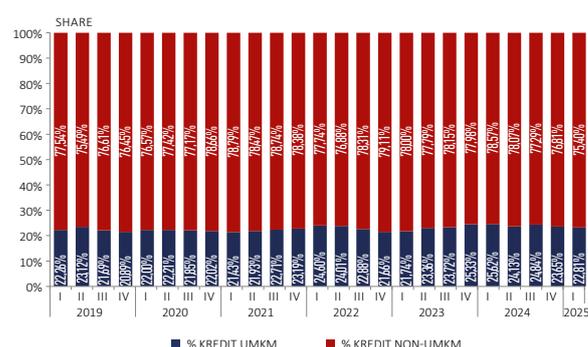
**Tabel 4.3** Perkembangan Kredit di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan I 2025 (Lokasi Proyek)

No	Kabupaten/Kota	KREDIT TW IV 2024		Pertumbuhan		Arah Pertumbuhan
		Rp. (miliar)	TW IV 2024 (yoy)	TW I 2025 (yoy)		
1	Kab. Banjar	16.008,06	35,27%	49,83%	↑	
2	Kab. Tanah Laut	10.999,56	31,40%	34,17%	↑	
3	Kab. Tapin	6.371,86	15,20%	4,76%	↓	
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.109,72	-0,86%	-3,58%	↓	
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.984,45	8,90%	8,20%	↓	
6	Kab. Hulu Sungai Utara	1.976,74	6,74%	5,61%	↓	
7	Kab. Barito Kuala	3.794,57	0,49%	1,38%	↑	
8	Kab. Kota Baru	5.684,77	-21,83%	-11,02%	↑	
9	Kab. Tabalong	5.628,82	-15,54%	-7,53%	↑	
10	Kab. Tanah Bumbu	10.982,31	8,94%	17,70%	↑	
11	Kab. Balangan	891,15	13,87%	12,74%	↓	
12	Kota Banjarmasin	29.875,61	12,76%	6,98%	↓	
13	Kota Banjarbaru	7.406,71	0,79%	0,98%	↑	
<b>Prov. Kalimantan Selatan</b>		<b>103.714,33</b>	<b>9,47%</b>	<b>12,17%</b>	<b>↑</b>	

Sumber: LBU Bank Indonesia  
Angka dalam Rp Miliar



Sumber: LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.18** Pertumbuhan dan NPL Kredit Periode Triwulan I 2025


Sumber: LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.19** Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Periode Triwulan I 2025

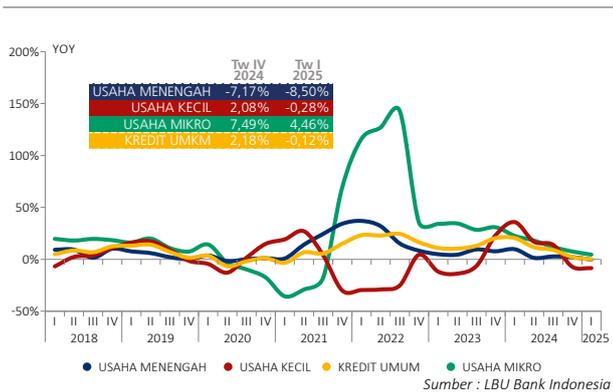
## 4.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

### 4.2.1 Rasio Kredit UMKM

Pada triwulan I 2025, penyaluran kredit UMKM di Kalimantan Selatan terkontraksi 0,18% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp23,66 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,18% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp23,88 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 22,81%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 23,65% (Grafik 4.19).

### 4.2.2 Penyaluran Kredit UMKM

Penurunan penyaluran kredit UMKM dibandingkan triwulan sebelumnya bersumber dari perlambatan pertumbuhan penyaluran seluruh kredit UMKM yang mencakup kredit usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kredit usaha mikro tumbuh 4,46% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp10,63 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,49% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp10,66 triliun. Sementara itu, kredit usaha kecil terkontraksi 0,28% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp8,10 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,08% (yoy) dengan *outstanding* Rp8,08 triliun. Lebih lanjut, kredit usaha menengah

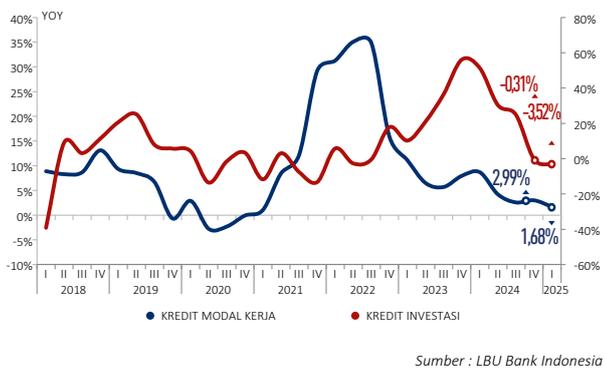


**Grafik 4.20** Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Periode Triwulan I 2025

terkontraksi 8,50% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp4,93 triliun, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,17% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp5,14 triliun (Grafik 4.20).

Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit UMKM mayoritas pada triwulan I 2025 masih disalurkan pada Kredit Modal Kerja (KMK) dengan pangsa sebesar 67,28%, diikuti oleh Kredit Investasi (KI) sebesar 32,72%.

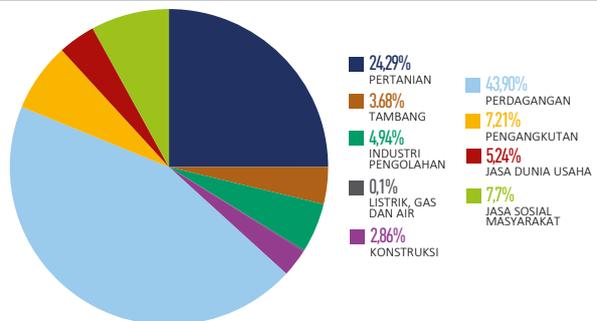
Pada triwulan I 2025, penyaluran KMK tumbuh 1,68% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp15,78 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,99% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp16,05 triliun. Selaras dengan hal tersebut, kredit investasi terkontraksi 3,52% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp7,88 triliun, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,31% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp7,76 triliun (Grafik 4.21).



**Grafik 4.21** Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Periode Triwulan I 2025

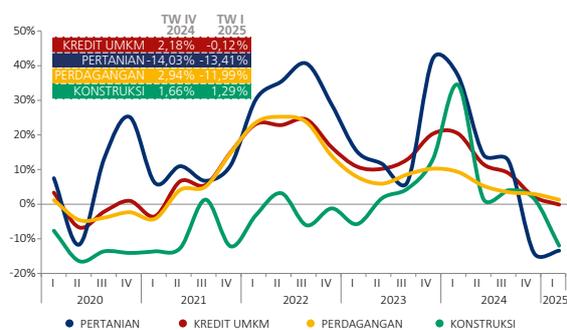
Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama bersumber dari penyaluran kredit pada LU utama, seperti LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (dengan pangsa 44,30%) dan LU Pertanian (dengan pangsa 28,32%) (Grafik 4.22). Penyaluran kredit UMKM pada LU perdagangan yang memiliki pangsa terbesar dalam kredit UMKM pada triwulan I 2025 tumbuh 1,29% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp10,39 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,94% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp5,75 triliun (Grafik 4.23).

Selain itu, penyaluran kredit UMKM pada LU Pertanian yang memiliki proporsi terbesar kedua dalam penyaluran kredit UMKM terkontraksi 13,41% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,75 triliun, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,03% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp5,69 triliun (Grafik 4.22).



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.22** Distribusi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Periode Triwulan I 2025



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.23** Pertumbuhan Kredit UMKM Lapangan Usaha Utama Periode Triwulan I 2025



Sumber : LBU Bank Indonesia

**Grafik 4.24** Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM Periode Triwulan I 2025

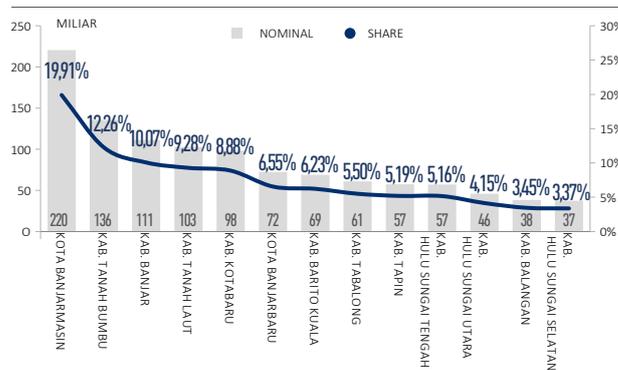
Sementara itu, kualitas kredit UMKM masih tetap terjaga baik meskipun sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari NPL yang tetap berada di bawah *threshold* 5%, yaitu sebesar 3,80%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,34% (Grafik 4.24).

### 4.2.3 Peningkatan Akses Keuangan UMKM

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Kalimantan Selatan, pemerintah juga mendorong penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan. Sampai dengan triwulan I 2025, program KUR yang disalurkan di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp1,11 triliun. Berdasarkan kabupaten/kota, realisasi KUR tertinggi terdapat di Kota Banjarmasin dengan proporsi 19,91% atau senilai Rp220,36 miliar, diikuti oleh Kabupaten Tanah Bumbu (dengan proporsi 12,26% atau senilai Rp135,70 miliar), Kabupaten Banjar (dengan proporsi 10,07% atau senilai Rp111,39 miliar), dan Kabupaten Tanah Laut (dengan proporsi 9,28% atau senilai Rp102,73 miliar) (Grafik 4.25).

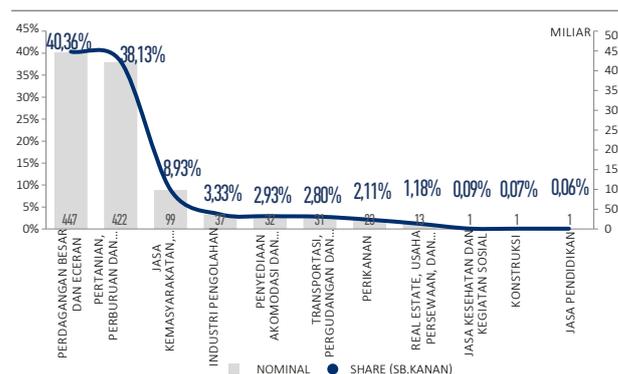
Total debitur yang menerima manfaat KUR sampai dengan triwulan I 2025 tercatat sebanyak 19,19 ribu debitur dengan sebaran debitur terbanyak di Kota Banjarmasin mencapai 3,2 ribu debitur (dengan proporsi 16,75%).

Sektor utama penerima KUR pada triwulan I 2025 adalah LU Perdagangan Besar dan Eceran dengan proporsi mencapai 40,36% atau senilai Rp446,67 miliar; diikuti oleh LU Pertanian dengan proporsi mencapai 38,13% atau senilai Rp421,91 miliar; dan LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya dengan proporsi mencapai 8,93% atau senilai Rp98,77 miliar dari total KUR yang disalurkan (Grafik 4.26).



Sumber: DJPB Prov Kalsel

**Grafik 4.25** Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Kabupaten/Kota Periode Triwulan I 2025



Sumber: DJPB Prov Kalsel

**Grafik 4.26** Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Triwulan I 2025

## BAB V

# Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat terkontraksi 4,89% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,26% (yoy). Sementara itu, transaksi Kliring (SKNBI) juga terkontraksi sebesar 9,75% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,23% (yoy). Penurunan transaksi bernilai besar (RTGS) sejalan dengan melambatnya kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2025 akibat adanya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran. Sementara itu, penurunan transaksi kliring (SKNBI) terjadi seiring dengan masifnya penggunaan kanal pembayaran *real-time* seperti BI-FAST dan QRIS dalam aktivitas transaksi ritel yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal.

Transaksi belanja menggunakan kartu ATM/debit pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 19,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,49% (yoy). Sementara itu, penarikan tunai menggunakan kartu ATM pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 4,47% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,14% (yoy). Selanjutnya, transaksi belanja menggunakan kartu kredit pada triwulan I 2025 tercatat terkontraksi 5,18% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,40% (yoy).



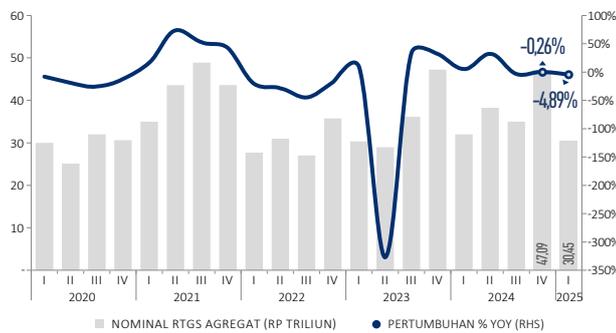
Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan pada triwulan laporan mengalami *net inflow* sebesar Rp0,15 triliun, kondisi yang berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp1,45 triliun. *Net inflow* pada triwulan I 2025 sejalan dengan pola historis penurunan kebutuhan uang kartal pasca momen HBKN Nataru dan libur akhir tahun. Namun, peningkatan *net inflow* yang lebih tinggi tertahan oleh adanya peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri.

Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi terus mengalami peningkatan, tecermin dari peningkatan jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 23,85% (yoy) atau mencapai 441,48 ribu *merchant*. Selain itu, Kalimantan Selatan mampu mempertahankan pencapaian skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2024 dengan status 100% digital.

## 5.1 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI KALIMANTAN SELATAN

### 5.1.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Pada triwulan I 2025, pertumbuhan nominal transaksi sistem pembayaran menggunakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mengalami penurunan. Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp30,45 triliun atau berkontraksi 4,89% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,26% (yoy) atau sebesar Rp47,09 triliun (Grafik 5.1). Penurunan tersebut sejalan dengan melambatnya kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2025 yang hanya tumbuh sebesar 1,18% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 2,57% (yoy) akibat adanya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran.

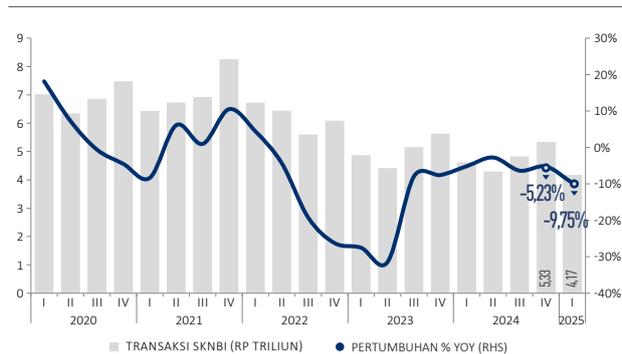


Sumber: Bank Indonesia, Transaksi RTGS

Grafik 5.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

### 5.1.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sejalan dengan transaksi nilai besar (BI-RTGS), transaksi ritel yang diproses melalui SKNBI pada triwulan I 2025 juga mengalami penurunan. Nominal transaksi kliring tercatat sebesar Rp4,17 triliun atau berkontraksi sebesar 9,75% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,23% (yoy) atau sebesar Rp5,33 triliun. (Grafik 5.2).



Sumber: Bank Indonesia, Transaksi SKNBI

Grafik 5.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Penurunan transaksi kliring terjadi seiring dengan masifnya penggunaan kanal pembayaran *real-time* seperti BI-FAST dan QRIS dalam aktivitas transaksi ritel yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal.

### 5.1.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

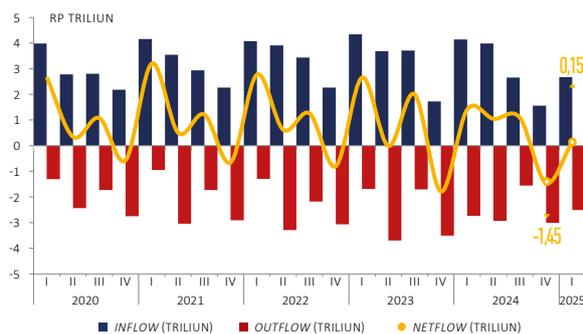
Transaksi belanja menggunakan kartu ATM/debit pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp1,22 triliun atau tumbuh 19,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,49% (yoy) atau sebesar Rp1,12 triliun. Meningkatnya transaksi APMK sejalan dengan adanya peningkatan konsumsi musiman menjelang dan selama HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1446 H yang jatuh tepat pada bulan Maret 2025, sehingga puncak konsumsi rumah tangga terjadi dalam triwulan I 2025, ditandai dengan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada bulan Maret 2025 sebesar 8,3% (mtm).

Sementara itu, penarikan tunai menggunakan kartu ATM pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp13,58 triliun atau tumbuh 4,47% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,14% (yoy) atau sebesar Rp13,29 triliun. Selanjutnya, transaksi belanja menggunakan kartu kredit pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp357,25 miliar atau berkontraksi 5,18% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,40% (yoy) atau sebesar Rp385,42 miliar. Perlambatan penggunaan kartu kredit seiring dengan tersedianya alternatif metode pembayaran kredit seperti aplikasi *paylater*

yang semakin masif penggunaannya, disertai pencairan THR yang mendorong masyarakat untuk berbelanja.

### 5.1.4 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan I 2025, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengalami *net inflow* sebesar Rp0,15 triliun. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp1,45 triliun (Grafik 5.3). Kondisi *net inflow* pada triwulan I 2025 sejalan dengan pola historis kebutuhan libur akhir tahun. Namun, peningkatan *net inflow* yang lebih tinggi tertahan oleh adanya peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.3

Penarikan dan Setoran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia di Kalimantan Selatan

## 5.2 PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

### 5.2.1 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran terus mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penggunaan instrumen nontunai (elektronifikasi), antara lain pada lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah terus berupaya mendukung

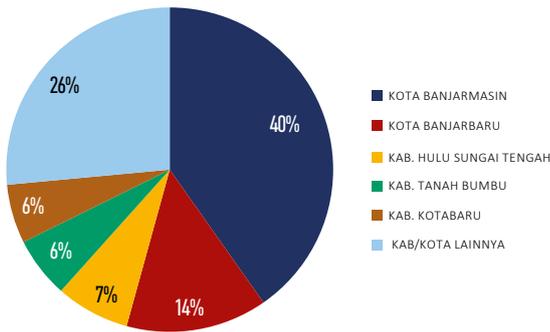
pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kalimantan Selatan pada semester II 2024 tercatat sebesar 100% digital, berhasil mempertahankan pencapaian yang sama pada semester I 2024. Pencapaian tersebut didorong oleh implementasi kanal pembayaran digital pada transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan daerah dengan pemanfaatan berbagai kanal pembayaran seperti QRIS, *e-commerce*, EDC, serta kanal pembayaran lainnya. Upaya elektronifikasi tersebut meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat aspek transparansi transaksi keuangan pemerintah daerah, mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, serta mendukung kemudahan masyarakat dalam bertransaksi.

Sampai dengan triwulan laporan, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah berada dalam kategori digital. Pemerintah daerah tersebut yakni: Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

### 5.2.2 Implementasi QRIS di Wilayah Kalimantan Selatan

Pada triwulan I 2025, jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah *merchant* QRIS tumbuh 23,85% (*yoy*) atau mencapai 441,48 ribu *merchant*, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,29% (*yoy*) atau sebanyak 412,64 ribu *merchant*.

Peningkatan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong elektronifikasi di masyarakat. Secara spasial, jumlah *merchant* QRIS



Sumber: Bank Indonesia

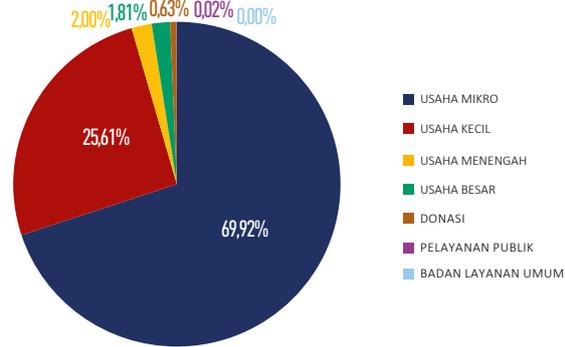
**Grafik 5.4** Jumlah Merchant QRIS Berdasarkan Kota/ Kabupaten

terbanyak terdapat di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru<sup>1</sup> (Grafik 5.4). Dominasi jumlah merchant QRIS di kedua kota ini, sejalan dengan posisi kedua daerah yang merupakan sentra ekonomi (Banjarmasin) serta sentra pemerintahan (Banjarbaru) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya aktivitas ekonomi pada dua kota tersebut didukung banyaknya pusat hiburan dan belanja yang telah memanfaatkan QRIS sebagai instrumen pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat. Selain itu, penetrasi QRIS yang tinggi juga merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Bank Indonesia, perbankan dan Pemerintah Daerah dalam memperkenalkan QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal).

Sementara itu, berdasarkan skala usahanya, Usaha Mikro (UMI) tercatat menjadi segmen usaha yang memiliki jumlah merchant QRIS terbanyak. Pada triwulan I 2025, tercatat sebanyak 308,70 ribu merchant kategori UMI atau sebesar 69,92% dari total jumlah merchant QRIS, diikuti oleh Usaha Kecil (UKE) dengan 113,06 ribu merchant (25,61%). (Grafik 5.5)

**Selain itu, untuk meningkatkan volume transaksi dan pengguna baru QRIS, dilakukan berbagai upaya sosialisasi maupun edukasi oleh KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan.** Pada triwulan I 2025, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan

<sup>1</sup> Pada triwulan I 2025, jumlah merchant QRIS di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru masing-masing sebanyak 177.820 merchant dan 61.691 merchant.



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 5.5** Jumlah Merchant QRIS Menurut Skala Usaha

kegiatan Banua Balimpuar QRIS (BBQ) bekerja sama dengan program Cici Rosa PT Permodalan Nasional Madani (PNM); Road to FESYAR, Road to Karya Kreatif Indonesia dan Pasar Raya TPID dalam Rangkaian National Halal Fair (NHF); dan kunjungan ke SMKN 1 Banjarmasin, yang bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan dan keunggulan transaksi digital yang ditawarkan oleh QRIS. Pelaksanaan kampanye tersebut bertujuan untuk memperluas akseptasi QRIS, peningkatan literasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) serta Cinta Bangga dan Paham (CBP) Rupiah.

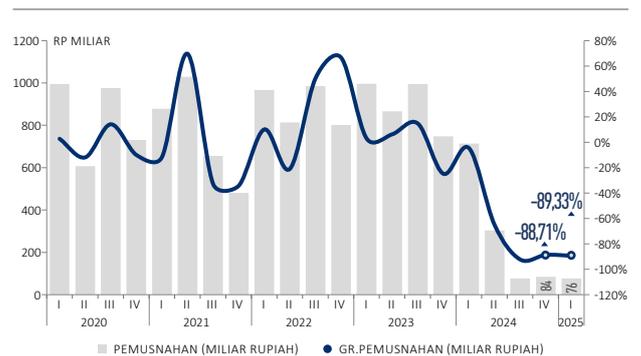
Selanjutnya, guna mendukung program nasional 58 juta pengguna QRIS pada tahun 2025, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan melanjutkan kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga, antara lain sosialisasi kepada berbagai kalangan masyarakat, seperti melalui media sosial KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan dan kegiatan QRISTival dengan *output* adanya peningkatan transaksi QRIS secara volume dan nominal transaksi serta pengguna baru. Hingga triwulan I 2025, terdapat 761.436 pengguna QRIS di Kalimantan Selatan tumbuh 17,07% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,19% (yoy). Harapannya, pengguna QRIS di Kalimantan Selatan akan terus bertambah seiring dengan semakin kuatnya infrastruktur digital di Kalimantan Selatan.

### 5.3 UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa menciptakan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan layanan sistem pembayaran tunai. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain kerja sama penukaran uang pecahan kecil dengan perbankan; optimalisasi kas titipan dan kas keliling; dan melakukan supervisi terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank. KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pengawasan rutin secara langsung (*on-site inspection*) maupun tidak langsung (*off-site inspection*) terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank sebagai upaya menanggulangi risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Saat ini, terdapat 1 KUPVA Bukan Bank terdaftar di wilayah Kalimantan Selatan.

#### 5.3.1 Penyediaan Uang Rupiah

Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar, pengolahan uang Rupiah, serta menggantinya dengan uang Rupiah layak edar sebagai bentuk penerapan *clean money policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Penerapan *clean money policy* melalui pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar pada triwulan I 2025 mencapai Rp76,17 miliar, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp84,49 miliar (Grafik 5.6). Penurunan tersebut seiring dengan aktivitas penukaran uang yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setinggi pada triwulan sebelumnya.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.6

#### Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan uang kartal di masyarakat, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen melaksanakan program pelayanan perkasas yang lebih baik. Salah satu di antaranya melalui program kas keliling yang bertujuan menyerap langsung uang tidak layak edar di masyarakat.

Selanjutnya, dalam upaya menjaga ketersediaan uang rupiah, saat ini terdapat 2 (dua) lokasi kas titipan yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Batulicin, dan Kabupaten Tabalong, Kecamatan Tanjung. Total distribusi uang dari Kas Titipan selama triwulan I 2025 sebesar Rp727,54 miliar atau tumbuh 2,35% (*yoy*), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,17% (*yoy*) atau sebesar Rp854,46 miliar (Tabel 5.1). Sementara itu, total penukaran uang oleh masyarakat di loket Bank Indonesia pada triwulan laporan sebesar Rp17,50 miliar atau terkontraksi 16,40% (*yoy*), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,46% (*yoy*) atau sebesar Rp11,00 miliar (Tabel 5.2). Penurunan penukaran uang di loket Bank Indonesia

Tabel 5.1 Data Triwulanan Kas Titipan Triwulan I 2025 (Rp Juta)

PERIODE	PECAHAN UANG KERTAS								PECAHAN UANG LOGAM					Grand Total	
	100.000	75.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	1.000	500	200	100	50		25
Januari	80.700	-	34.450	600	700	1.505	406	149	65	33	30	11	-	-	118.649
Februari	110.200	-	59.100	400	450	270	0	0	10	3	0	0	-	-	170.433
Maret	283.000	-	145.250	1.020	3.050	4.335	1.400	292	75	23	8	4	-	-	438.457
Tw I	473.900	-	238.800	2.020	4.200	6.110	1.806	441	150	58	38	15	-	-	727.538

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

**Tabel 5.2** Data Triwulanan Penukaran Uang Kartal Triwulan I 2025 (Rp Juta)

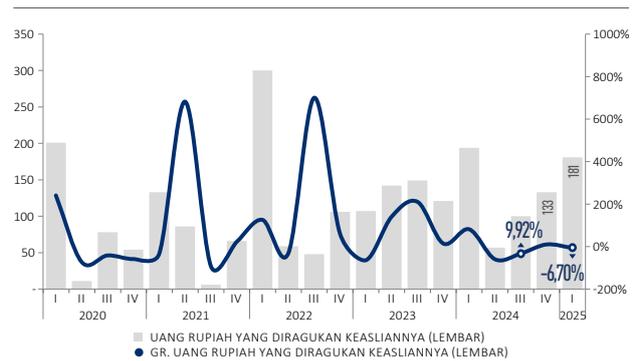
PERIODE	PECAHAN UANG KERTAS								PECAHAN UANG LOGAM					Grand Total	
	100.000	75.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	1.000	500	200	100	50		25
Januari	1.759	8	642	120	76	191	79	22	39	19	3	1	-	-	2.958
Februari	920	-	186	276	168	119	66	23	38	32	2	1	-	-	1.831
Maret	895	30	2.965	1.968	3.175	2.819	681	176	-	2	1	1	-	-	12.713
<b>Tw I</b>	<b>3.575</b>	<b>38</b>	<b>3.793</b>	<b>2.364</b>	<b>3.419</b>	<b>3.129</b>	<b>826</b>	<b>221</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.502</b>

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

ini dikarenakan faktor *base effect* dan masyarakat yang masih menyimpan uang hasil penukaran pada triwulan sebelumnya untuk digunakan pada triwulan I 2025.

### 5.3.2 Penanganan Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya

**Jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya pada triwulan I 2025 menurun.** Pada triwulan laporan, temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya mencapai 181 lembar atau terkontraksi 6,70% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,92% (yoy) atau sebanyak 133 lembar (Grafik 5.7). KPw BI Kalimantan Selatan secara aktif melakukan berbagai langkah untuk meminimalisir persebaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya, yaitu dengan konsisten meningkatkan fitur keamanan uang, mendorong keterjangkauan



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 5.7** Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

dan ketersediaan Uang Layak Edar secara luas di masyarakat, mendorong penggunaan pembayaran nontunai guna meminimalkan peluang pemalsuan uang, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang Rupiah.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## BAB VI

# Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan semester I 2024. Hal tersebut terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), meskipun terdapat peningkatan di Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) karena ada tenaga kerja yang belum terserap secara optimal. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan lapangan pekerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I 2025 (Februari 2025) didominasi oleh LU Pertanian dengan pangsa sebesar 31,42%, relatif tidak berubah dibandingkan triwulan dan tahun sebelumnya.



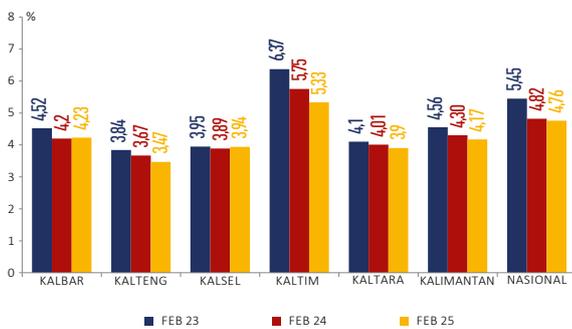
Optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan menunjukkan peningkatan sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 120,69 lebih tinggi dibanding triwulan IV 2024 yang sebesar 115,43.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 75,19 meningkat dari tahun 2023 sebesar 74,66. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

## 6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN

**Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan semester I 2024.** Hal tersebut terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meski terjadi sedikit peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan meningkat bersamaan dengan perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,94%, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 3,89%. Peningkatan ini terjadi diiringi peningkatan TPAK, yang memberi indikasi bahwa masih ada tenaga kerja yang masih dapat diserap ke depannya. Secara spasial, TPT seluruh provinsi di Kalimantan masih mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan kondisi TPT Nasional yang juga mengalami penurunan dari 4,82% menjadi 4,76% pada semester I 2025 (Februari 2025).



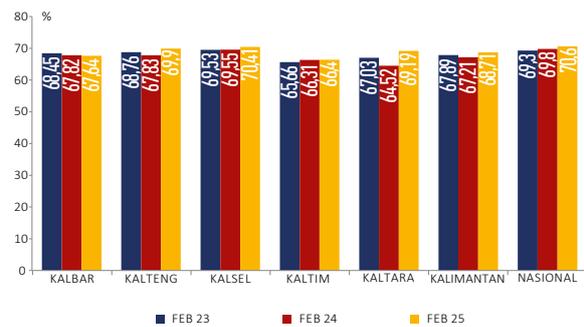
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, diolah

**Grafik 6.1** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.** TPAK pada periode Februari 2025 tercatat sebesar 70,41%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,55%.

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan populasi usia kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK pekerja laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,16 persen poin menjadi 84,95% dan TPAK pekerja perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,56 persen poin menjadi 55,66%.

Apabila ditinjau secara spasial, TPAK Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tertinggi di pulau Kalimantan (70,41%) dan sedikit lebih rendah dari TPAK Nasional yang sebesar 70,60% (Grafik 6.2). Ditinjau dari trennya, TPAK Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada 3 tahun terakhir (2022-2024).



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, diolah

**Grafik 6.2** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

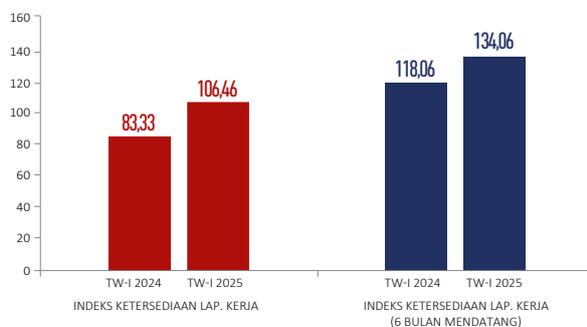
**Jumlah penduduk usia kerja pada triwulan I (Februari 2025) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.** Jumlah penduduk usia kerja Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I (Februari 2025) tercatat sebesar 3,18 juta jiwa, atau meningkat sebanyak 46,99 ribu jiwa (1,50%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini bersumber jumlah penduduk angkatan kerja yang naik sebesar 2,75% menjadi 2,22 juta jiwa (Tabel 6.1). Di sisi lain, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat mengalami penurunan sebesar 1,38% dari 955,77 juta jiwa pada periode Februari 2024 menjadi 942,61 juta jiwa pada Februari 2025.

Tabel 6.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

Uraian	Feb-23	Feb-24	Feb-25	Perubahan	
	Ribu Jiwa	Ribu Jiwa	Ribu Jiwa	Ribu Jiwa	Persen
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	<b>3.108,53</b>	<b>3.139,07</b>	<b>3.186,06</b>	<b>46,99</b>	<b>1,50</b>
1. Penduduk Angkatan Kerja	2.161,29	2.183,30	2.243,44	60,14	2,75
a. Bekerja	2.075,99	2.098,39	2.154,97	56,58	2,70
b. Pengangguran	85,30	84,91	88,49	3,58	4,22
2. Penduduk Bukan Angkatan Kerja	947,25	955,77	842,61	-13,16	-1,38
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b>	<b>69,53</b>	<b>69,55</b>	<b>70,41</b>		<b>0,86</b>
Laki-Laki (%)	83,92	83,79	84,95		1,16
Perempuan (%)	54,91	55,10	55,66		0,56
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>3,95</b>	<b>3,89</b>	<b>3,94</b>		<b>0,05</b>
Laki-Laki (%)	4,16	4,28	4,03		-0,25
Perempuan (%)	3,62	3,29	3,81		0,52

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2024, BPS Kalsel (diolah)

Indikator ketenagakerjaan membawa indikasi positif dan optimisme bagi sektor tenaga kerja Kalimantan Selatan, sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia periode triwulan I 2025. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada enam bulan mendatang meningkat dibandingkan dengan indeks ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini, di mana Indeks ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang tercatat sebesar 134,6; lebih tinggi dari indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini sebesar 106,32. Optimisme ini juga lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan I 2024 yang mengindikasikan bahwa perbaikan kondisi ketenagakerjaan saat ini dan dalam 6 bulan ke depan terus berlanjut (Grafik 6.3).



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada semester I 2025 (Februari 2025) masih didominasi oleh LU Pertanian, LU Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi, serta LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Komposisi penduduk bekerja berdasarkan lapangan utama pada semester I 2025 memiliki pola yang sama dengan tahun sebelumnya, di mana lapangan pekerjaan utama di Kalimantan Selatan didominasi oleh LU Pertanian dengan pangsa sebesar 31,42%, diikuti oleh LU Perdagangan sebesar 26,32% dan LU Jasa Kemasyarakatan sebesar 18,28%. Meskipun menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, pangsa tenaga kerja pada LU Pertanian mengalami penurunan sebesar 0,52%. Sementara itu, LU Perdagangan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar kedua stabil dengan kenaikan 0,01%. Peningkatan penyerapan sebesar 1,16% terjadi pada LU Jasa Kemasyarakatan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar ketiga pada triwulan I 2025.

Tabel 6.2 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral

Lapangan Pekerjaan Utama	Feb-23	Feb-24	Feb-25	Perubahan (%yoy)
Pertanian	30,13	31,94	31,42	-0,52
Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	27,52	26,31	26,32	0,01
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17,37	17,12	18,28	1,16
Industri	9,15	7,39	7,27	-0,12
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,99	4,20	4,89	0,69
Konstruksi	3,98	4,63	4,67	0,04
Pertambangan	3,86	4,75	3,88	-0,87
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa	2,32	2,80	2,34	-0,46
Listrik, Gas dan Air Minum	0,68	0,86	0,93	0,07
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

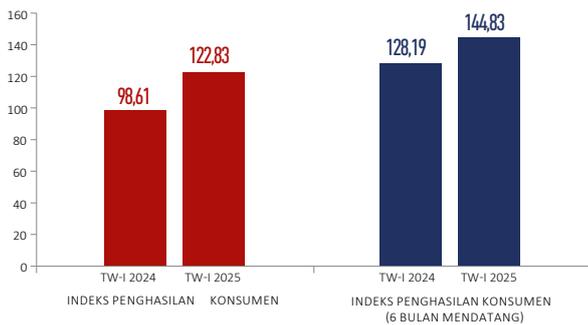
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Agt 2024 (diolah).

## 6.2 KONDISI KESEJAHTERAAN

### 6.2.1 Daya Beli Masyarakat

Optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan menunjukkan peningkatan sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Pada triwulan I 2025, kenaikan daya beli masyarakat

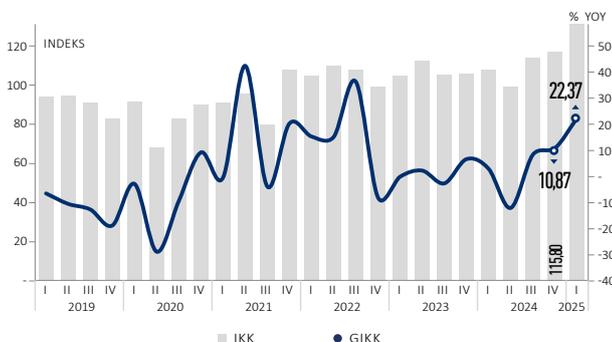
tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen saat ini yang meningkat sebesar 24,56% (yoy) dari 98,61 pada triwulan IV 2024 menjadi 122,83 pada triwulan I 2025. Sejalan dengan itu, optimisme penghasilan yang meningkat juga tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen enam bulan mendatang yang tumbuh 12,98% (yoy), dengan indeks sebesar 128,19 pada triwulan I 2024 menjadi 144,83 pada triwulan I 2025.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

**Grafik 6.4** Indeks Penghasilan Konsumen

**Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia pada triwulan I 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 130,10, tumbuh 22,37% (yoy). Indeks tersebut lebih tinggi dibanding dan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yang sebesar 115,80, atau tumbuh sebesar 10,87% (yoy). Hal menjadi indikasi optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang terus meningkat secara domestik (Grafik 6.5).



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

**Grafik 6.5** Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

### 6.2.2 Nilai Tukar Petani

**Pada triwulan I 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 120,69 lebih tinggi dibanding triwulan IV 2024 yang sebesar 115,43.** Hal tersebut sejalan dengan indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Indeks harga yang diterima (It) oleh petani mengalami peningkatan pada komponen penyusun subsektornya, yakni antara lain Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), dengan NTPP pada triwulan I 2025 tercatat 101,14 meningkat dibandingkan dari triwulan IV 2024 sebesar 99,33. Hal ini disumbang oleh produksi padi yang meningkat karena adanya panen raya pada bulan April 2025. Kenaikan NTP juga disumbang oleh kenaikan pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat seiring dengan kenaikan harga TBS dan karet dunia yang masih berada di level yang cukup tinggi. NTP pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat tercatat sebesar 154,51 pada triwulan I 2025, lebih tinggi dari triwulan IV 2024 yang sebesar 148,12. Lebih lanjut, Kenaikan NTP juga berasal dari subsektor Hortikultura yang meningkat dibandingkan triwulan IV 2024, hal ini disebabkan oleh adanya panen cabai merah, cabai rawit, serta aneka sayuran.

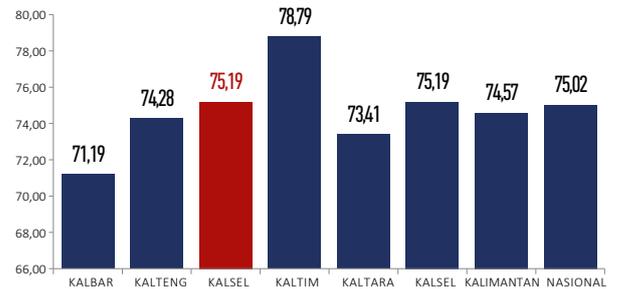
Namun, kenaikan NTP yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT). NTPT pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 105,28, lebih rendah dibanding triwulan IV 2024 yang sebesar 106,06. Penurunan NTPT sejalan dengan harga daging ayam ras dan telur ayam ras yang menurun.

Dengan demikian, kenaikan It sejalan dengan Indeks BPPBM yang meningkat, dari 119,28 pada triwulan IV 2024 menjadi 119,84 pada triwulan IV 2024.

### 6.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

**Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.** IPM tahun 2024 tercatat sebesar 75,19 meningkat dari tahun 2023 sebesar 74,66. Peningkatan IPM Kalimantan

Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi penyusunnya, yakni umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Secara umum, IPM Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan berstatus tinggi dengan capaian IPM di atas 70 meski masih berada di bawah Kalimantan Timur untuk wilayah Kalimantan. Selama periode 2020-2024, IPM Kalimantan Selatan rata-rata tumbuh sebesar 0,71% per tahun dan berada di atas nilai 70 sejak tahun 2020 (Tabel 6.4).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6.6

IPM Provinsi di Kalimantan dan Nasional

Tabel 6.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Sektor, Kelompok dan Subkelompok	2022				2023				2024				2025		Perubahan	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	%qtq	%yoy	
<b>Nilai Tukar Petani</b>																
Tanaman Pangan	100,08	93,18	100,74	103,07	111,36	109,21	110,79	114,24	115,85	103,99	102,48	99,33	104,20	-1,45	-7,50	
Holtikultura	107,59	111,21	105,91	99,25	95,02	98,42	99,22	105,48	101,72	99,74	99,23	97,88	109,81	-0,51	0,01	
Tanaman Perkebunan Rakyat	136,63	124,74	112,13	110,35	111,61	109,79	109,78	115,45	122,79	133,61	135,86	148,12	154,51	1,68	23,76	
Peternakan	101,49	104,42	101,54	102,48	101,86	103,15	105,32	103,88	105,06	106,75	105,78	106,06	107,00	-0,91	0,44	
Perikanan	101,61	104,19	98,51	98,84	98,11	100,29	98,83	98,11	100,83	99,73	98,87	98,86	98,26	-0,86	0,04	
<b>Gabungan</b>																
Nilai Tukar Petani	113,21	105,76	104,58	104,93	109,08	107,81	108,65	112,36	115,59	113,19	112,74	115,43	120,69	-0,40	3,76	
Indeks Harga yang diterima petani (%)	124,21	118,88	118,96	120,32	126,47	126,04	127,02	131,76	137,75	137,40	135,63	140,41	146,27	-1,29	6,78	
Indeks Harga yang dibayar petani (%)	109,72	112,41	113,75	114,67	115,95	116,91	116,90	117,26	119,16	121,38	120,30	121,64	121,20	-0,89	2,91	
a. Indeks Konsumsi Rumah Tangga	109,91	112,87	113,67	114,62	115,85	116,85	116,93	117,67	119,57	122,38	120,87	122,71	122,00	-1,23	3,37	
b. Indeks BPPBM	109,43	111,52	114,53	114,18	123,67	116,91	117,34	118,02	118,33	119,23	119,32	119,28	119,84	0,08	1,69	

Sumber: BPS Kalsel (diolah)

Tabel 6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Pergerakan
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	73,28	73,43	73,70	73,97	74,18	▲
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,52	12,81	12,82	12,86	12,87	▲
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,29	8,34	8,46	8,55	8,62	▲
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp.000	12.032	12.143	12.469	12.953	13.399	▲
<b>IPM</b>		<b>73,09</b>	<b>73,45</b>	<b>74,00</b>	<b>74,66</b>	<b>75,19</b>	▲
Pertumbuhan IPM	%yoy		0,49	0,75	0,89	0,71	▲

Sumber: BPS Kalsel (diolah)



## BAB VII

# Prospek Perekonomian

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditopang oleh permintaan domestik yang masih tetap kuat.

Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Perlambatan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh perkiraan penurunan permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan masifnya pengembangan *renewable energy*. Sementara itu, tekanan pada LU Konstruksi dan LU Perdagangan diperkirakan sejalan dengan

kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat, terutama ditopang oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diperkirakan meningkat, sejalan dengan penambahan luas lahan panen didukung program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan kondisi cuaca yang lebih kondusif, serta kebijakan implementasi B40.

Dari sisi pengeluaran, moderasi ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh tekanan kinerja net ekspor dan Konsumsi Pemerintah. Ekspor luar negeri diperkirakan melambat sejalan dengan moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diperkirakan



melandai. Konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun, Konsumsi Rumah tangga diperkirakan masih tumbuh kuat ditopang daya beli masyarakat yang tumbuh stabil, sejalan dengan NTP yang tetap kuat serta kenaikan UMP dan gaji ASN yang lebih tinggi di tahun 2025. Lebih lanjut, pertumbuhan juga ditopang oleh rencana bantuan subsidi upah dan bantuan sosial.

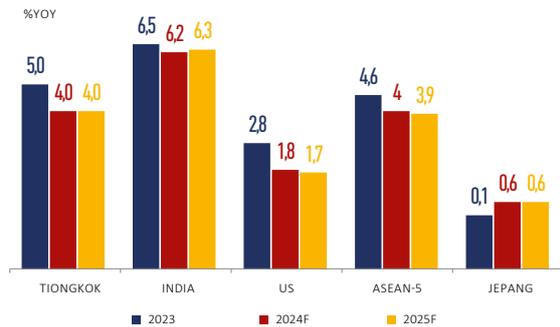
Secara keseluruhan 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy). Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) komoditas rokok yang sudah mulai diterapkan pada awal tahun 2025. kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan meningkat didorong oleh harga emas perhiasan seiring harga emas global yang diperkirakan masih tinggi sejalan dengan ketidakpastian global yang masih berlanjut. Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas nasi dengan lauk sejalan dengan peningkatan harga pada komoditas pangan strategis.

## 7.1 PRAKIRAAN KONDISI MAKRO EKONOMI

Secara umum, perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan mengalami perlambatan di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan melandai, lebih dalam dari proyeksi sebelumnya. Adapun penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat disebabkan oleh berlanjutnya ketidakpastian kebijakan Pemerintah AS di tengah ketegangan perdagangan yang masih berlanjut. Lebih lanjut, ketidakpastian kebijakan terkait tarif resiprokal turut merevisi ke bawah proyeksi perekonomian AS pada tahun 2026 ke angka 1,7% (yoy). Perekonomian Tiongkok diperkirakan melandai meskipun didukung berbagai insentif kebijakan fiskal untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan industri manufaktur sehingga berpotensi menahan penurunan yang lebih dalam terhadap permintaan komoditas utama di Kalimantan Selatan. Di sisi lain, kinerja perekonomian India diperkirakan stabil namun memiliki risiko penurunan yang lebih dalam, terdampak berlanjutnya tensi geopolitik di tengah berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global (Grafik 7.1).

**Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 diperkirakan tetap solid walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.** Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,60% – 5,40% (yoy). Pertumbuhan positif ini ditopang oleh permintaan domestik yang masih tetap kuat sejalan dengan UMP dan gaji ASN yang meningkat di tahun 2025.

**Dari sisi lapangan usaha, kinerja sebagian LU Utama Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh melambat.** Perlambatan tersebut utamanya bersumber dari LU Pertambangan yang diperkirakan terpengaruh perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari pemberlakuan tarif dagang Trump 2.0. Perlambatan permintaan komoditas batu bara dari Tiongkok juga dipengaruhi oleh akselerasi pemanfaatan *renewable energy*



Sumber : World Economic Outlook Jan 2025, International Monetary Fund

Grafik 7.1

Kondisi Negara Mitra Dagang Tahun 2024 dan Prospek ke Depan

sebagai sumber energi di negeri Tirai Bambu sejalan dengan implementasi UU Energi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dengan salah satu fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan pemanfaatan sumber energi rendah karbon. Selain itu, perlambatan juga turut ditopang oleh LU Konstruksi dan LU Perdagangan antara lain disebabkan oleh penurunan pagu belanja modal APBD Kalsel dan DAK Fisik yang berdampak pada penurunan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

**Namun, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan yang diperkirakan tetap kuat.** Peningkatan utamanya didorong oleh produksi padi yang diperkirakan tumbuh tinggi seiring dengan penambahan luas lahan panen, didukung program optimalisasi lahan. Selain itu, produksi TBS di tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan kondisi cuaca yang kondusif di tahun 2024. Dengan terjaganya produksi TBS, maka implementasi kebijakan *mandatory* biodiesel B40 diperkirakan optimal dalam meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan.

**Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor Kalimantan Selatan 2025 diperkirakan melambat seiring dengan proyeksi perlambatan ekonomi global.** Ekspor luar negeri diperkirakan melambat, didorong oleh penurunan permintaan mitra dagang utama yang mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut diperkirakan akan menekan harga komoditas ekspor utama Kalimantan Selatan. Selain itu,

meningkatnya kebutuhan komoditas ekspor utama untuk pemenuhan domestik juga turut menahan ekspor luar negeri. Secara spesifik, negara mitra dagang utama meningkatkan pemanfaatan sumber energi secara domestik guna mengurangi risiko dari konflik geopolitik dan geoekonomi yang masih berlangsung. Mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India melakukan prioritas pemenuhan kebutuhan energi domestik melalui peningkatan kapasitas pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) serta akselerasi produksi batu bara domestik. Sementara itu, ekspor CPO diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan peningkatan penyerapan domestik untuk kebutuhan mandatori biodiesel B40 dengan total alokasi mencapai 15,6 juta kL di tahun 2025. Lebih lanjut, tingkat harga CPO yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lain diperkirakan dapat mengurangi keunggulan kompetitif CPO di pasar global, sehingga membatasi potensi ekspor ke negara-negara mitra dagang utama.

**Impor juga diperkirakan melambat sejalan dengan deselerasi kinerja LU Pertambangan, Konstruksi, dan Transportasi.** Deselerasi impor tersebut diperkirakan merupakan mitigasi yang dilakukan dunia usaha terhadap potensi penurunan permintaan negara mitra dagang, moderasi jumlah proyek strategis pemerintah dan stagnansi kebutuhan transportasi. Adapun komoditas impor yang akan terpengaruh antara lain impor barang modal dan manufaktur terutama mesin, alat berat, dan kapal. Sementara itu, impor bahan baku industri diperkirakan masih meningkat seiring masih tingginya kebutuhan bahan baku dalam proses pengolahan industri turunan CPO utamanya untuk biodiesel.

**Konsumsi pemerintah tahun 2025 diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024.** Selain itu, penyesuaian pagu pendapatan TKDD setelah adanya efisiensi anggaran diperkirakan menurunkan kinerja fiskal daerah. Namun, anggaran sosial seperti

belanja bansos dan subsidi untuk ketahanan pangan dan energi, serta realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan menahan penurunan belanja pemerintah lebih dalam serta menjaga daya beli masyarakat.

**Investasi diperkirakan masih tumbuh kuat walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.** Kinerja investasi pada tahun 2025 masih ditopang oleh berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek *multiyears* baik pembangunan infrastruktur oleh pemerintah maupun swasta, antara lain perbaikan jalan, pembangunan bendungan, jembatan, irigasi, pembangunan pusat perbelanjaan dan kantor pemerintah daerah, berlanjutnya pembangunan swasta khususnya di Kawasan Investasi (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pembangunan proyek strategis di Kalimantan Selatan. Di samping itu, mulainya tahap awal program cetak sawah rakyat (CSR) di Kalimantan Selatan pada awal tahun berkontribusi terhadap kinerja investasi non-bangunan sepanjang tahun 2025. Namun, menurunnya pagu DAK Fisik akibat kebijakan efisiensi diperkirakan berdampak terhadap penyelesaian proyek pemerintah di daerah.

**Di sisi lain, kinerja konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih tumbuh kuat didukung oleh perayaan momen HBKN yang diperkirakan lebih *festive*.** Daya beli diperkirakan terjaga sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada tahun 2025. Berbagai program perlindungan sosial serta program ketahanan pangan pemerintah pusat diperkirakan menopang tingkat konsumsi dan mendukung terjaganya optimisme masyarakat Kalimantan Selatan. Kebijakan perpanjangan insentif fiskal terhadap PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas rumah tapak dan rumah susun<sup>1</sup> secara bertahap hingga Desember 2025, serta pelonggaran Kebijakan Makroprudensial yakni *Loan to Value* (LTV) dan

<sup>1</sup> PMK No. 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

*Financing to Value* (FTV)<sup>2</sup> hingga 100% sampai dengan akhir tahun 2025 diperkirakan turut mendorong konsumsi masyarakat khususnya pembiayaan pada sektor perumahan dan kendaraan bermotor.

Aktivitas belanja masyarakat dalam rangka akumulasi perayaan momen HBKN Tahun baru, HBKN Ramadhan dan Idulfitri yang lebih panjang, serta penyelenggaraan Haul Guru Sekumpul yang bergeser ke triwulan IV 2025 diperkirakan dapat berkontribusi dalam menopang kinerja positif konsumsi masyarakat di tahun 2025.

## 7.2 PRAKIRAAN INFLASI

**Tekanan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada keseluruhan tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024, namun masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy).** Dari sisi permintaan, meningkatnya permintaan masyarakat seiring adanya *festive event* khususnya Haul Guru Sekumpul yang akan dilaksanakan dua kali pada tahun 2025, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penawaran, dalam hal kemandirian pangan, Kalimantan Selatan masih bergantung pada provinsi lain dalam pemenuhan pasokan pangan. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala, antara lain kondisi tanah rawa yang kurang mendukung, potensi kekeringan, hama/penyakit pada tanaman pangan, keterbatasan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan akses terhadap modal.

**Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman.** Kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) komoditas rokok yang sudah mulai diterapkan pada awal tahun 2025. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya diperkirakan meningkat didorong oleh

harga emas perhiasan seiring harga emas global yang diperkirakan masih tinggi sejalan dengan ketidakpastian global yang masih berlanjut. Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas nasi dengan lauk sejalan dengan peningkatan harga pada komoditas pangan strategis.

**Di sisi lain, upaya perbaikan produksi tanaman pangan melalui program ekstensifikasi lahan, seperti Optimalisasi Lahan Rawa dan penggunaan bibit unggul diperkirakan menahan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.** Lebih lanjut, prakiraan kondisi cuaca yang lebih kondusif turut menjaga produktivitas tanaman pangan. Berlanjutnya upaya pengendalian inflasi pangan dalam kerangka TPID diperkirakan mampu menjaga tingkat inflasi pangan ke depan.

**Strategi pengendalian inflasi melalui KAD dan optimalisasi BUMD atau badan usaha milik pemerintah daerah lainnya menjadi bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan struktural disparitas harga antarwilayah dan antarwaktu, serta inefisiensi tata niaga pangan.** Lebih lanjut, saat ini kendala logistik dan distribusi masih menjadi permasalahan utama untuk melaksanakan KAD secara lebih efisien. Oleh karena itu, pembentukan KAD secara formal perlu didorong, baik untuk meningkatkan kepastian pasokan di Kalimantan Selatan sebagai pembeli maupun meningkatkan kepastian penyerapan pasokan di sentra produksi.

Dalam mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang Ramadhan dan Idulfitri 1446H dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh anggota TPID, dalam bentuk:

- 1) Menjaga komunikasi dan koordinasi antar TPID dan instansi terkait dalam merumuskan arah kebijakan pengendalian inflasi;

<sup>2</sup> PADG No. 19 tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas PADG Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG Perubahan Keenam LTV/FTV dan Uang Muka).

**Tabel 7.1** Risiko Inflasi Prov. Kalsel Tahun 2025

Faktor Pendorong/Penahan	Arah
Peningkatan permintaan pangan dan angkutan udara pada festive event khususnya Haul Guru Sekumpul pada Desember 2025	↑
Potensi kenaikan harga emas global yang lebih tinggi di tengah ketidakpastian global	↑
Penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) komoditas rokok	↑
Kegiatan SPHP, GPM, dan Pasar Murah yang berjalan masif menahan laju inflasi komoditas bahan makanan	↓
Upaya ekstensifikasi lahan pertanian (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR)	↓
Masifnya penyerapan beras oleh Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah	↓

- 2) Mendorong pembentukan BUMD pangan dalam rangka menjaga pasokan serta menjadi agen distribusi pangan di daerah;
- 3) Mendorong KAD dalam rangka pemenuhan pasokan ketersediaan pangan strategis;
- 4) Melakukan perluasan inovasi budidaya terutama untuk varietas tanaman yang tahan kekeringan.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **LAMPIRAN**

**Administered Price (AP)**

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

**Andil inflasi**

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

**APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

Program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

**BI 7 Days Reverse Repo Rate**

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

**BI RTGS**

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *online* atau seketika untuk setiap intruksi transfer dana.

**Bobot inflasi**

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

**BU BBN**

Merupakan singkatan dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, yakni perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam bisnis bahan bakar nabati, seperti biodiesel, di Indonesia.

**CPO**

CPO singkatan dari *Crude Palm Oil* atau minyak sawit mentah yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dari daging buah kelapa sawit.

**CSR**

Singkatan dari Cetak Sawah Rakyat, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani melalui penciptaan lahan sawah baru di daerah-daerah yang potensial.

**Dana Perimbangan**

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

**Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

**Ekspor dan Impor**

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

**Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah maupun valas. Terminologi FDR untuk bank syariah sementara LDR untuk bank konvensional.

**Indeks Ekspektasi Konsumen**

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

**Indeks Harga Konsumen (IHK)**

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

**Indeks Kondisi Ekonomi**

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

**Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)**

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

**Inflasi Inti**

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

**Inflow**

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

**Investasi**

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

**Liaison**

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

**MtM**

*Month to month*. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

**Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)**

*Ratio* pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional.

**Oplah**

Singkatan dari Optimalisasi Lahan, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya produksi padi dan jagung, serta mendukung swasembada pangan.

**Outflow**

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

**PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

**QtQ**

*Quarter to quarter*. Perbandingan antara data suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

**Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

**TBS**

Singkatan dari Tandan Buah Segar, adalah buah kelapa sawit yang sudah matang dan siap dipanen.

**TPID, TPIP**

Merupakan singkatan dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kotat. TPID dan TPIP merupakan anggota dari TPIN (Tim Pengendalian Inflasi Nasional) yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

**YoY**

*Year on year*. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

## **Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan**

### **Penanggung Jawab**

Fadjar Majardi

Aloysius Donanto H. W.

### **Editor**

Erwin Syafii

Firman Hidayat

Prayudhi Azwar

Teguh Arifyanto

### **Tim Penyusun**

Heryanto Handoko

Rizki Hildalia Putri

Dicky Prayudi

Prima Mega Purwatama

Prima Putra Pamungkas

Resti Nisaidha Rahmi

## **Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan**

### **Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi**

Jl. Lambung Mangkurat No.15 Banjarmasin

Telp. +62 511 3352027

Fax. +62 511 3354678

### **Email:**

dicky\_prayudi@bi.go.id

resti\_nisaidha@bi.go.id



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



 Laporan Perekonomian Kalsel

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Lambung Mangkurat No. 15  
Banjarmasin 70111  
Telp. (0511) 4368182, Fax (0511) 3354678

